



Pemerintah Daerah Kota Batam



**RENCANA AKSAI DAERAH  
PENDIDIKAN UNTUK SEMUA (PUS)  
KOTA BATAM 2008**

**Didi Supriadie &  
Tim PUS  
Kota Batam 2008**

## **Pengantar**

Pendidikan adalah upaya strategis dalam menumbuhkembangkan seluruh potensi yang dimiliki individu, pendidikan diyakini dapat membantu memberdayakan kemampuan kreatif dalam berpikir dan memecahkan masalah, mengembangkan kemampuan emosional, spritual, sosial, maupun kemampuan ekonomikal (vokasional). Pendidikan adalah hak dasar setiap individu dan juga menjadi kewajiban dasar setiap individu. Pendidikan sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah menjadi tanggung jawab bersama dan semua pihak, baik Negara, masyarakat, keluarga (orang tua) dan bahkan individu secara sendiri-sendiri. Pendidikan itu tidak terbatas dan pendidikan itu tidak "rasis", yakni tidak memandang usia, jenis kelamin, etnis, golongan, status sosial, ekonomi, maupun agama. Pendidikan adalah untuk semua.

Pendidikan Untuk Semua (Education For All) adalah gerakan untuk menguatkan dan mensinergikan berbagai program yang telah ada dan dilaksanakan oleh berbagai instansi, organisasi dan lembaga masyarakat. Untuk tujuan PUS tersebut, diperlukan data permasalahan pendidikan (pemerataan pendidikan, mum dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, otonomi daerah) sebagai tantangan dan sekaligus sebagai peluang bagi pendidikan yang sedang kita hadapi.

Berpijak pada hasil kesepakatan Dakkar untuk mewujudkan Pendidikan Untuk Semua, penyusunan Rencana Aksi Daerah Pendidikan Untuk Semua Kota Batam diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kbijakan dan pengembangan program-program pembangunan pendidikan, menuntaskan wajib belajar sembilan tahun dan pemberantasan buta aksara terutama bagi penduduk perempuan (PWB/PBA dalam Permendiknas 35 tahun 2006) dan coba pelajari PPRI NO. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar). Rencana Aksi Daerah dapat menjadi suatu referensi dalam membuat kebijakan tentang pendidikan khususnya tentang upaya pemecahan permasalahan pendidikan di

Kota Batam. Dengan segala keterbatasan data maupun kemampuan, Rencana Aksi Daerah Pendidikan Untuk Semua (PUS) ini disusun berdasarkan data yang diperoleh, dapat diungkap maupun ditemukan .

Akhirnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Aksi Daerah ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua terlebih bagi para pengambil kebijakan dan penyusun perencanaan pembangunan sumber daya manusia di Kota Batam maupun seluruh lapisan masyarakat yang peduli terhadap pendidikan.

Batam, September 2008

**Tim Pendidikan Untuk Semua  
Kota Batam**

## **PENGANTAR**

### **DAFTAR ISI**

1. Pendahuluan
2. Pelayanan Perawatan dan Pendidikan Anak Usia Dini
  - 2.1 Situasi dan Kondisi
  - 2.2 Kebijakan
3. Pendidikan Dasar
  - 3.1 Situasi dan Kondisi
  - 3.2 Kebijakan
4. Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill)
  - 4.1 Situasi dan Kondisi
  - 4.2 Kebijakan
5. Pendidikan Keaksaraan dan Berkelanjutan
  - 5.1 Situasi dan Kondisi
  - 5.2 Kebijakan
6. Pendidikan Berkeadilan Gender
  - 6.1 Situasi dan Kondisi
  - 6.2 Kebijakan
7. Mutu Pendidikan
  - 7.1 Situasi dan Kondisi
  - 7.2 Kebijakan

## I PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi dan daerah Kabupaten / Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Secara filosofis penyelenggaraan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dan memajukan perekonomian daerah. Untuk itu pemerintah daerah sebagai penyelenggara otonomi daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat (public participation), pemerataan dan keadilan (equity and equality), serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman. Tiga kandungan misi utama Otonomi daerah yaitu :

- (1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
- (3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Penyusunan perencanaan daerah untuk jangka menengah (**RPJMD**) maupun jangka panjang tentunya tidak hanya memperhatikan kebijakan pemerintahan pusat atau provinsi, namun tentunya harus memiliki kesejalan, sinergi, sehingga pencapaian tujuan pendidikan di daerah dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Sinergitas, kesejlanan dimaksud tentu tetap memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah sebagai daerah otonom. Dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab maka dibutuhkan adanya strategi pembangunan daerah yang mampu menjawab dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat secara komprehensif. Strategi pembangunan dimaksud adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi yang berpedoman pada prinsip-prinsip

kesemestaan, partisipasi masyarakat, keseimbangan, kontinuitas, pendekatan yang sistematis, mengandalkan kekuatan sendiri, kejelasan strategi dasar, skala prioritas, kelestarian ekologi dan pemerataan pembangunan yang disertai pertumbuhan.

Amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun secara berjangka meliputi;

(a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun.

(b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun.

(c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Mencermati hal tersebut di atas, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah dalam periode tahun 2006 – 2011, Pemerintah Kota Batam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dimana penyusunannya memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi, memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Program lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Kota Batam Tahun 2006 – 2011 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah serta sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian RPJMD Kota Batam menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan baik rencana kerja pemerintah daerah maupun dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam.

Sedangkan tujuan penyusunan RPJMD Kota Batam Tahun 2006 –2011 adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah, mewujudkan aspirasi masyarakat,

menampung pencapaian sasaran yang menjadi prioritas nasional, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kota Batam adalah suatu upaya pengejawantahan atas Visi dan khususnya Misi ke IV; yaitu : “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, menguasai IPTEK, dan bermuatan IMTAQ melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat serta pembinaan kepemudaan dan olahraga”.

Pendidikan diyakini merupakan upaya strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ketika ini diberikan pembenaran maka pendidikan yang menjadi tanggung jawab semua pihak, yakni pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, bahkan individu harus semakin menjadi lebih baik. Selain itu pendidikan tidak saja merupakan kewajiban bagi setiap orang, tetapi juga merupakan hak dasar bagi semua orang tanpa memandang ras, etnis, golongan, jenis kelamin, usia, dan tingkat sosial ekonomi. Artinya pendidikan hakekatnya adalah “untuk semua”.

Pendidikan untuk semua (PUS) secara internasional disebut dengan “*Education For All (EFA)*” adalah suatu gerakan internasional yang secara sistematis peduli akan pentingnya semua orang untuk memperoleh pendidikan dan layanan perawatan sejak dini, hatam pendidikan dasar, memiliki kecakapan hidup (*life skill*), tuntas buta aksara, pendidikan berkeadilan gender, dan mengembangkan pendidikan bermutu untuk semua. Gerakan ini merupakan bentuk kesadaran warga dunia, bahwa masih banyak anak-anak bangsa dan warga dunia yang belum tersentuh bahkan tidak dapat mengakses hal-hal yang disebutkan di atas; terutama di negara-negara berkembang dengan jumlah penduduk besar (baca: salah satunya Indonesia).

Gerakan pendidikan untuk semua (PUS) secara sistematis telah menjalani perjalanan panjang, yakni sejak tahun 1987 (Konferensi Asia Fasifik) hingga pertemuan Dakar (*World Education Forum*) tahun 2000 dan menghasilkan kesepakatan yang disebut

“*THE DAKAR FRAMEWORK FOR ACTION*” berisi tentang 6 (enam) program yakni: (1) memperbaiki, memperluas perawatan dan pendidikan anak usia dini (PAUD); (2) penuntasan pendidikan dasar menjelang tahun 2015 terutama anak perempuan dan etnis minoritas; (3) penjaminan kebutuhan belajar bagi “generasi muda” dan “orang dewasa” melalui pendidikan kecakapan hidup (*life skill*); (4) menurunkan angka buta aksara (50% menjelang tahun 2015 terutama perempuan) melalui pendidikan dasar dan berkelanjutan untuk semua orang dewasa; (5) menghapus “disparitas” gender pada pendidikan dasar dan menengah (menjelang tahun 2015 terutama perempuan); dan (6) memberikan pendidikan bermutu dan memiliki keunggulan. Kesepakatan ini yang selanjutnya dikenal dengan “KESEPAKATAN DAKAR” dan telah menjadi komitmen internasional, termasuk Indonesia untuk melaksanakannya.

“Kesepakatan Dakar” bagi Indonesia adalah pengejawantahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, Departemen Pendidikan Nasional RI sejak tahun 2002 menjadikan program ini sebagai “gerakan” yang secara serempak dan sistematis harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan dinas teknis yang relevan; serta menggunakan struktur dan mekanisme yang telah ada dalam rangka efektivitas dan efisiensi; dan menurut beberapa kesepakatan antara daerah dan pemerintah pusat (Depdiknas, Bappeda/Bappeda dan Dinas Pendidikan Provinsi/Kecamatan/kota) telah menentukan penjadwalan secara bertahap yakni menjelang tahun 2009 dan menjelang tahun 2015, melalui penyusunan analisis situasi dan kondisi (ASK) serta penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) pendidikan untuk semua (PUS). Bagi Indonesia menjadi penting, tidak hanya disebabkan IPM di tingkat dunia itu berperingkat terendah, tetapi secara faktual masalah ini adalah sebuah kenyataan yang harus diselesaikan sesuai dengan amanat undang-undang.

Kota Batam dengan segala potensi dan masalahnya terutama terkait dengan sektor pendidikan dan kesehatan akan menjadi tidak berbeda dengan daerah lain. Oleh karena itu, selain mengusung program secara nasional, kota Batam menganggap penting untuk segera melakukan Penyusunan Analisis Situasi dan Kondisi (ASK) dan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Pendidikan Untuk Semua (PUS) sebagai upaya menyelesaikan secara bertahap persoalan-persoalan pendidikan baik menyangkut



aksesibilitas maupun peningkatan mutu pendidikan, karena persoalan ini akan memberi kontribusi yang sangat signifikan terhadap “pencitraan” Kota Batam dalam hal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang seringkali menjadi takaran bagi kemajuan daerah lain sebab posisi selalu menjadi yang teratas dan terbaik di Provinsi Kepulauan Riau. Pendidikan menjadi pentingnya salah satunya karena posisinya strategis dalam mengembangkan sumber daya manusia. Mengamati upaya di berbagai negara dan sekarang menjadi negara maju secara mendasar telah membuktikan bahwa pendidikan dapat menghilangkan kebodohan, mengurangi kemiskinan, membangun peradaban yang tinggi, menjadikan masyarakatnya kritis terhadap berbagai permasalahan, berpikir kreatif, terbuka, terampil dan produktif. Salah satu sumber kekuatan negara adalah penduduk. Besarnya jumlah penduduk tanpa diimbangi kualitas yang memadai akan menyebabkan negara menanggung banyak beban sehingga alih-alih menjadi kekuatan, justru sebaliknya akan menjadi masalah tatanan Negara. Sebaliknya besarnya jumlah penduduk yang disertai berkualitas akan memperkuat Negara. Pendidikan sekali lagi diyakini akan menjadi solusi untuk membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Mengabaikan persoalan pendidikan berarti membiarkan anak-anak bangsa ini menjadi beban pemerintah (Pusat/daerah), keluarga, masyarakat, bahkan dirinya sendiri. Pendidikan harus menjadi perhatian semua pihak, yaitu individu itu sendiri, keluarga, masyarakat, dan tentunya pemerintah (Pusat maupun daerah). Kalau ditimbang dari siapa paling bertanggung jawab untuk pendidikan, semua yang disebutkan di atas adalah harus bertanggungjawab. Individu tidak hanya menuntut hak tetapi harus memahami bahwa pendidikan itu hukumnya wajib, karena dengan pendidikan diproyeksi akan mendapat ilmu (pengetahuan, sikap, dan keterampilan) dan diperkirakan akan dapat menolong diri dan juga diharapkan dapat menolong orang lain. Keluarga, bertanggungjawab terhadap pendidikan anak sejak dini (bahkan di dalam kandungan) karena anak harus ditumbuhkembangkan segala potensi dirinya, sehingga anak dapat tumbuh secara fisik dengan baik sejak dini, dan kemudian secara psikologis (nirfisik) berkembang kemampuan pikir, kemampuan rasa, kemampuan spiritualnya, kemampuan sosial dan vokasionalnya. Masyarakat, bertanggungjawab untuk berperan aktif menyediakan/ memfasilitasi dan membantu lembaga-lembaga pendidikan untuk terus berkisah mendidik, membelajar anak-anak bangsa ini agar tidak menjadi beban sosial

dan menjadi sampah masyarakat. Pemerintah (negara) merupakan institusi yang paling bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan, renungi pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, amnahnya dalah anak-anak bangsa ini harus dicerdaskan, dan disejahterakan secara adil dan merata, selain itu telah ditetapkan bahwa untuk kepentingan itu pemerintahj menetapkan 20% anggaran pendidikan dari keseluruhan APBN tiap tahunnya. UURI N0. 20/2003, mengamanahkan tentang wajib belajar sembilan tahun (Wajar Dikdas) dengan tanpa dipungut biaya dan dikuatkan dengan PPRI N0. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Amanah lainnya bahwa Pemerintah daan pemerintah daerah sama-sama bertanggungjawab untuk menyelenggarakan, memberikan pembinaan daan membiayai pendidikan bagi masyarakat, baik melalui jalur pendidikan formal, nonformal, maupun informal.

Kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi seluruh bangsa di dunia telah mendorong lahirnya kesepakatan-kesepakatan tingkat regional, nasional dan dunia yang terus ditindaklanjuti dengan serangkaian pertemuan tingkat tinggi antara lain Program AsiaPasifik tentang Pendidikan untuk Semua pada awal tahun 1987, Konperensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua, Jomtien, Thailand dalam bulan Maret 1990, Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) Pendidikan untuk Semua Sembilan Negara Berkembang Berpenduduk Besar, di New Delhi, India, 12-16 Desember 1993, kemudian Pertemuan 9 Menteri Pendidikan E-9 di Jenewa, Swiss tanggal 3-8 Oktober 1994. Partisipasi Indonesia dilanjutkan di Jakarta-Denpasar, Indonesia pada awal bulan Oktober 1995, lalu di Islamabad, Pakistan dalam bulan September 1997, kemudian di Recife, Brazil tanggal 31 Januari s.d. 2 Februari 2000 dan yang terakhir di Forum Pendidikan Dunia di Dakkar, Senegal tanggal 26-28 April 2000. Forum Pendidikan Dunia di Dakkar itu telah berhasil menyusun Kerangka Tindakan Dakkar yang memuat kesepakatan tentang apa, mengapa dan bagaimana pendidikan untuk semua dilaksanakan. Kesepakatan Dakkar yang diimplementasikan dalam Pendidikan Untuk Semua (PUS) atau *Education For All (EFA)* dan gerakan ini merupakan suatu upaya jangka panjang yaitu 2002-2015. PUS meliputi 6 (enam) komponen pokok dalam membangun dunia pendidikan. Keenam komponen pokok tersebut mencakup:

1. Pelayanan perawatan dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

2. Pendidikan Dasar
3. Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill)
4. Pendidikan Keaksaraan dan Berkelanjutan
5. Pendidikan Berkeadilan Gender
6. Mutu Pendidikan

Batam sebagai daerah yang memiliki komitmen terhadap pentingnya pembangunan sumber daya manusia, khususnya melalui pembangunan sektor pendidikan, memandang penting menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) jangka menengah 2008-2011. Penyusunan RAD melibatkan berbagai unsur baik unsur Pemerintah Daerah (BAPEDA, DINDIK, DINKES) dan instansi lain yang relevan serta Dewan Pendidikan Kota Batam yang tergabung dalam satu tim. Tim PUS bekerja untuk menghasilkan suatu rancangan aksi yang sebelumnya di susun dalam bentuk analisis situasi, dan kondisi. Rencana Aksi Daerah ini bisa menjadi salah satu bahan informasi dalam mengambil kebijakan sektor pendidikan. Rencana Aksi Daerah ini didasarkan pada hasil analisis situasi dan kondisi pendidikan (untuk semua) di daerah ( Kota Batam).

## II

### PELAYANAN PERAWATAN DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

#### 1. Gambaran Situasi dan Kondisi

Sejak pemerintahan ini diperjuangkan hingga kemerdekaan dikumandangkan para pejuang dan pendiri negara ini telah menyadari betapa pentingnya pembinaan sumber daya manusia sejak dini, hal ini secara nyata dituangkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mengejawantahkan cita-cita luhur itu, hal tersebut dituangkan dalam perencanaan nasional. Besarnya perhatian akan pentingnya pendidikan, masyarakat dunia telah melakukan berbagai komitmen international, seperti Millenium Goal 2002, Konveksi Hak-hak Anak termasuk Kesepakatan Dakar 2000 dan sejenisnya. Pemerintah juga telah memberikan arahan, bahwa pembinaan manusia yang berkualitas sudah harus dimulai sejak anak usia 0-6 tahun, bahkan sejak anak masih dalam kandungan. Sudut psikologi perkembangan menyebutkan bahwa apabila penanganan anak dilakukan dengan baik sejak dini, hasilnya akan menjadikan tumbuhkembang lebih optimal. Pengembangan anak sejak usia dini memiliki keuntungan multi dimensional, baik secara ilmiah, moral, ekonomi, pendidikan, sosial dan peningkatan kualitas generasi.

Anak usia dini yang perlu mendapat pelayanan perawatan dan pendidikan di Kota Batam jumlahnya cukup besar mencapai 55.564 dari total penduduk tahun 2006. Pada kelompok anak balita (0-4 tahun) terdapat 25.055, sedangkan anak usia 4-6 tahun sebesar 30.509. Jika dilihat dari jumlah anak usia 0-6 tahun antar kecamatan, maka kecamatan-kecamatan Bengkong yang memiliki jumlah paling besar yaitu sebanyak 3.717 anak usia 0-4 tahun, kemudian Kecamatan Batam Kota sejumlah 3.280 anak, dan Kecamatan Sagulung memiliki 3.302 anak dari total anak seusianya dan di Kota Batam, sedangkan yang memiliki jumlah terkecil ada di Kecamatan Bulang yaitu sebanyak 110 anak atau sekitar dari total anak seusianya. Sementara anak usia 0-6 tahun, jumlah terbesar berada di Kecamatan Batam Kota yaitu sebanyak 5.002 anak, Bengkong sebesar 4.958, dan Sekupang sebesar 3.435 anak dari total anak

seusianya. Sedangkan yang memiliki jumlah terkecil terdapat di Kecamatan Galang yaitu sebanyak 642 anak dari total anak seusianya.

Tabel 2.1

Jumlah Anak Usia Dini Menurut Kecamatan di Kota Batam

Kecamatan	Jumlah Anak Usia Dini	
	0-4 Tahun	4-6 Tahun
Sekupang	2,825	3,435
Batu Aji	1,361	2,118
Sagulung	3,302	3,981
Sei Beduk	2,326	2,137
Batam Kota	3,280	5,002
Nongsa	1,824	2,389
Lubuk Baja	3,147	1,836
Batu Ampar	1,745	2,372
Bengkong	3,717	4,958
Galang	575	642
Bulang	110	893
Belakang padang	843	746
Jumlah	25,055	30,509

Sumber : Profil Pendidikan Kota Batam 2006

Gambaran layanan perawatan dan pendidikan anak usia dini di Kota Batam pada tahun 2006 yang jumlah 55.564 anak dilayani oleh 202 Taman Kanak-kanak (bac: data RA,TPA, KB atau yang sederajat tidak diperoleh datanya). Namun demikian selain data yang bersumber dari Profil Pendidikan Kota Batam, diperoleh data lain dari Profil Dinas Kesehatan Kota Batam Tahun 2007 bahwa anak usia dini yang dikategorikan "balita" (0-5 Tahun) terdapat sebesar 93.042 anak.

Pemberian vitamin A sebanyak 2 kali terhadap balita menurut data yang disajikan dalam Profil Dinas Kesehatan Kota Batam menggambarkan secara umum bahwa dari 93.042 anak balita hanya 56.643 anak balita yang mendapat vitamin A 2 kali. Artinya masih terdapat 36. 399 anak balita yang terlantar dari pemberian vitan A 2 kali, untuk melihat data per kecamatan dapat mencermati tabel 2.2 di bawah. Sedangkan data status gizi buruk di Kota Batam, secara keseluruhan (dai 12 kecamatan) berjumlah 173 anak balita. Artinya terdapat 92.869 anak balita di Kota Batam yang memiliki status gizi baik. Namun demikian kekhawatiran munculnya generasi

berkemampuan rendah bagi anak-anak bangsa dan bahkan kekhawatiran tentang isu kejadian lost generation akibat gizi buruk mengimplikasikan semua jajaran pemerintah dan masyarakat untuk segera bekerja sama mengatasi hal ini walaupun anak yang bestatus gizi buruk jumlahnya belum cukup besar (173 anak).

Tabel 2.2  
Jumlah Balita Cakupan Pemberian Vitamin A dan Status Gizi Balita  
Per Kecamatan di Kota Batam 2007

Kecamatan	Jumlah Balita	Bayi BGM Gakin	Mendapat Vit A 2x	Gizi Buruk
Bengkong	8,886	0	7,112	0
Batu Ampar	6,373	2	4,388	4
Belakang Padang	2,656	7	1,040	2
Lubuk Baja	9,746	30	6,375	4
Galang	1,878	12	1,043	10
Bulang	1,148	7	733	11
Sekupang	19,571	1,823	8,530	89
Nongsa	5,126	18	3,384	11
Batam Kota	13,439	8	10,132	1
Sei Beduk	9,543	93	4,103	11
Sagulung	14,676	23	9,803	30
Batu Aji	0	0	0	0
Jumlah	93,042	2,023	56,643	173

Sumber : Profil Dinkes Kota Batam 2007

Angka kematian bayi (AKB) secara umum memberikan gambaran baik buruknya derajat kesehatan dan status sosial ekonomi masyarakat Kota Batam. Jika melihat sajian data pada tabel 3.3 di bawah tercatat bahwa angka lahir mati pada tahun 2007 sebesar 155 orang anak angka terbesar yaitu sebanyak 60 bayi lahir mati terjadi di Kecamatan Sekupang dan 4.845 lahir hidup , 37 bayi lahir mati dan 3.911 lahir hidup terjadi Kecamatan Batu Ampar, 23 bayi lahir mati dan 2.770 lahir hidup di Kecamatan Lubuk Baja, 22 bayi lahir mati dan 3.177 lahir hidup di Kecamatan Sei Beluk, dan 8 bayi lahir mati dan 2.253 lahir hidup di Kecamatan Sagulung (Baca : lihat Tabel 2.2).

Tabel 2.3  
 Angka Kelahiran dan Angka Kematian Bayi (AKB)  
 Menurut Kecamatan di Batam Tahun 2007

Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Balita	Lahir Hidup	Lahir Mati	Bayi Mati
Bengkong	Sei Panas	8.886	1.670	0	1
Batu Ampar	Tg. Sengkuang	6.373	3.911	37	2
Belakang Padang	Belakang Padang	2.656	263	2	1
Lubuk Baja	Lubuk Baja	9.746	2.770	23	0
Galang	Galang	1.878	347	3	1
Bulang	Bulang	1.148	98	0	0
Sekupang	Sekupang	19.571	4.845	60	0
Nongsa	Sambau	5.126	836	0	0
Batam Kota	Baloi Permai	13.439	2.062	0	0
Sei Beduk	Sei Pancur	9.543	3.177	22	0
Sagulung	Sei Lekop	14.676	2.253	8	0
Batu Aji		0	0	0	0
Jumlah		93.042	22.232	155	5

Sumber Profil Dinkes Kota Batam 2007

Keragaman ketersediaan program-program layanan pada tingkat Kecamatan itu diindikasikan oleh rerata banyaknya anak yang harus dilayani oleh setiap lembaga yang ada, dengan menyadari kemungkinan adanya anak yang memperoleh layanan ganda dari berbagai lembaga yang ada seperti BKB dan Posyandu jika dilihat dan proporsi jumlah ketersediaan layanan dan jumlah anak yang harus dilayani. Namun mengingat kondisi di lapangan menunjukkan bahwa secara kelembagaan antara program BKB dan Posyandu menyatu dan masih terbatasnya jumlah lembaga yang memberikan layanan pendidikan dan perawatan bagi anak usia dini saat ini akan sangat menghambat kesempatan anak untuk memperoleh layanan perawatan dan pendidikan bagi anak usia dini.

Tabel 2.4  
Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur  
Kota Batam 2007

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
< 1	10,378	9,891	20,269
1 - 4	37,163	35,121	72,284
5 - 9	28,685	27,114	55,799
10 - 14	19,171	18,556	37,727
15 - 19	21,516	33,241	54,757
20 - 24	59,338	110,442	169,780
25 - 29	66,967	64,226	131,193
30 - 34	46,609	29,814	76,423
35 - 39	25,666	16,297	41,963
40 - 44	15,177	9,637	24,814
45 - 49	9,749	6,119	15,868
50 - 54	6,013	3,616	9,629
55 - 59	3,534	2,395	5,929
60 - 64	2,383	1,673	4,056
65 - 69	1,672	232	1,904
70 - 74	1,029	140	1,169
75+	642	109	751
Jumlah	355,692	368,623	724,315

Sumber : Profil Dinkes 2007

Sarana layanan perawatan dan pendidikan anak usia dini seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga pendidikan baik formal, nonformal, dan informal, posyandu, dan Bina keluarga Balita (BKB). Gambaran data layanan pendidikan anak usia dini di Kota Batam dan sebarannya per kecamatan dapat dicermati pada Tabel 2.5 di bawah ini :



Tabel 2.5

## Ketersediaan Sarana Program Layanan Pendidikan Anak Usia Dini di Batam 2007

Kecamatan	TK		Rombel dan Kelas		Jumlah Murid		Jumlah Guru	
	Negeri	Swasta	Rombel	Kelas	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
Belakang Padang	0	3	11	10	0	219	0	14
Bulang	0	1	1	1	0	22	0	2
Galang	0	0	0	0	0	0	0	0
Sei Beduk	0	20	73	38	0	1262	0	58
Nongsa	0	16	37	45	0	656	0	54
Sekupang	1	17	64	53	286	1174	12	70
Lubuk Baja	0	18	102	73	0	2107	0	114
Batu Ampar	0	9	27	22	0	533	0	35
Batam Kota	0	38	90	77	0	2126	0	128
Sagulung	0	33	94	89	0	2104	0	176
Batu Aji	0	29	93	79	0	1821	0	117
Bengkong	0	17	54	51	0	1254	0	76
Jumlah	1	201	646	538	286	13278	12	844

Sumber: Batam Dalam Angka 2007

Sajian data pada Tabel 2.5 (di atas), Taman Kanak-kanak sebagai satuan pendidikan prasekolah yang melayani anak-anak usia dini, cukup mengambil peran besar walaupun belum dapat menyentuh semua anak usia dini. Ketersediaan sarana layanan pendidikan anak usia dini (Khususnya Taman Kanak-kanak) di Kota Batam, didominasi oleh pihak swasta (Masyarakat) sebagai penyelenggara dan tentunya pengelolaanya, dan jika melihat data dari 202 TK yang melayani 13.564 anak usia dini, dengan status 1 TK Negeri yang berlokasi di Kecamatan Sekupang melayani 286 anak dan dibina oleh 12 orang guru, sedangkan 201 TK Swasta tersebar di 11 kecamatan lainnya; yakni 3 TK di Kecamatan Belakang Padang melayani 219 anak yang dibina 14 orang guru, 1 TK di Bulang melayani 22 orang anak yang dibina oleh 2 orang guru, 20 TK di Sei Beduk melayani 1.262 orang anak yang dibina oleh 58 orang guru, 16 TK di Nongsa melayani 656 orang anak yang dibina 54 orang guru, 16 di Sekupang melayani 1.174 orang anak yang dibina oleh 70 orang guru, 18 TK di Lubuk Baja melayani 2.107 orang anak yang dibina oleh 114 orang guru, 9 TK di Batu Ampar melayani 533 orang anak yang dibina oleh 35 orang guru, 38 TK di Batam Kota melayani 2.126 orang anak yang dibina oleh 128 orang guru, 33 TK di Sagulung melayani 2.104 orang anak yang dibina oleh 176

orang guru, 79 TK di Batu Aji melayani 1.821 orang anak yang dibina oleh 117 orang guru, dan 17 di Kecamatan Bengkong melayani 1.254 orang anak yang dibina oleh 76 guru, sedangkan Kecamatan Galang sampai data ini di turunkan belum memiliki Taman Kanak-kanak. Selain layanan pendidikan melalui Taman kanak-kanak, terdapat angka sebesar 2.897 anak-anak usia dini di 5 (lima) kecamatan dilayani oleh 47 lembaga pendidikan prasekolah Raudhatul Athfal (RA). Lima (5) kecamatan itu adalah : Kecamatan Sei Beduk terdapat 21 RA, melayani 1.119 orang anak usia dini yang dibina oleh 41 orang guru, Nongsa memiliki 6 RA, melayani 280 orang anak usia dini yang dibina oleh 14 orang guru, Sekupang memiliki 6 RA, melayani 565 anak usia dini yang dibina oleh 25 orang guru, Kecamatan Lubuk Baja memiliki 6 RA, melayani 490 orang anak usia dini yang dibina oleh 3 orang guru, Kecamatan Batu Ampar memiliki 8 RA, melayani 443 orang anak usia dini yang dibina oleh 15 orang guru.

Tabel 2.6  
Distribusi Program Layanan Pendidikan Pra Sekolah Anak Usia Dini  
Menurut Kecamatan di Kota Batam 2007

Kecamatan	Jumlah Sekolah		Jumlah Murid		Jumlah Guru	
	TK	RA	TK	RA	TK	RA
Belakang Padang	3	0	219	0	14	0
Bulang	1	0	22	0	2	0
Galang	0	0	0	0	0	0
Sei Beduk	20	21	1,262	1,119	58	41
Nongsa	16	6	656	280	54	14
Sekupang	18	6	1,460	565	82	25
Lubuk Baja	18	6	2,107	490	114	3
Batu Ampar	9	8	533	443	35	15
Batam Kota	38	0	2,126	0	128	0
Sagulung	33	0	2,104	0	176	0
Batu Aji	29	0	1,821	0	117	0
Bengkong	17	0	1,254	0	76	0
Jumlah	202	47	13,564	2,897	856	98

Sumber: Batam Dalam Angka 2007 dan <http://pendis.depag.go.id/>

## 2. Gambaran Layanan Perawatan Anak Usia Dini

Meskipun program layanan perawatan bagi anak usia dini melalui posyandu adalah program yang sejak lama telah dikembangkan dan dilaksanakan sampai ke tingkat masyarakat di perdesaan sebagai sasaran utamanya. Data tahun 2007 mengungkapkan

bahwa terdapat sekitar 256 Poosyandu dengan berbagai "atribut level" yang disandangnya. Apabila dilihat sebaran pada tiap kecamatan datanya menunjukkan : Kecamatan Belakang Padang memiliki 48 Posyandu dengan status 4 Pratama, 17 Madiya,dan 7 Posyandu Mandiri. Kecamatan Bulang memiliki 14 Posyandu dengan status 13 Pratama, dan 1 Madiya. Kecamatan Sei Beduk memiliki 15 Posyandu dengan status 5 Pratama, dan 8 Madiya dan 2 Posyandu Mandiri, Kecamatan Nongsa memiliki 21 Posyandu dengan status 8 Pratama, dan 12 Madiya dan 1 Posyandu Mandiri. Kecamatan Sekupang memiliki 26 Posyandu dengan status 4 Pratama, dan 19 Madiya dan 1 Posyandu Mandiri, Kecamatan Lubuk Baja Kecamatan Batu Ampar Kecamatan Batam Kota memiliki 17 Posyandu dengan status 15 Prtama, dan 2 Madiya, Kecamatan Sagulung memiliki 32 Posyandu dengan status 6 Prtama, 20 Madiya, dan 6 Purna, Kecamatan Batu Aji memiliki 21 Posyandu dengan status 7 Prtama, 13 Madiya, dan 1 Purna, Kecamatan Bengkong memiliki 24 Posyandu dengan status 15 Madiya, dan 9 Purna, sedangkan Kecamatan Galang memiliki 27 Posyandu dengan status 26 Pratama, dan 1 Mandiri (Baca: Lihat Tabel 2.7).

Tabel 2.7  
Jumlah dan persentase posyandu menurut strata dan kecamatan  
Tahun 2007

Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Posyandu					Persentase Posyandu				Jumlah	% Posyandu Aktif
		Pratama	Madya	Purnama	Mandiri	Jumlah	Pratama	Madya	Purnama	Mandiri		
Bengkong	Sei Panas	-	9	15	-	14	-	100	-	-	100	-
Batu Ampar	Tg.Sengkuang	12	10	-	-	22	54.55	45.45	-	-	100	-
Blk Padang	Blk Padang	4	17	-	7	28	14.29	60.71	-	25.00	100	25.00
Lubuk Baja	Lubuk Baja	-	8	4	2	14	-	57.14	28.57	14.29	100	42.86
Galang	Galang	26	-	-	1	27	96.30	-	-	3.7	100	3.70
Bulang	Bulang	13	1	-	-	14	92.86	7.14	-	-	100	-
Sekupang	Sekupang	4	19	2	1	26	15.38	73.08	7.69	3.85	100	11.54
Nongsa	Sambau	8	12	1	-	21	38.10	57.14	4.76	-	100	4.76
Batam Kota	Baloi Permai	15	2	-	-	17	88.24	11.76	-	-	100	-
Sei Beduk	Sei Pancur	5	8	2	-	15	33.33	53.33	13.33	-	100	13.33
Sagulung	Sei Lekop	6	20	6	-	32	18.75	62.50	18.75	-	100	18.75
Batu Aji	Sekupang	7	13	1	-	21	33.33	61.9	4.76	-	100	4.76
Jumlah		100	119	16	11	246	40.65	48.37	6.5	4.47	100	10.98

Sumber:Profil Dinkes Kota Batam 2007

**Tabel 2.8**  
**Persentase Cakupan Imunisasi Bayi Menurut Kecamatan**  
**Kota Batam 2007**

Kecamatan	Puskesmas	Jml Bayi	Imunisasi												DO %
			BCG		DPT1+HB1		DPT3+HB3		Polio3		Campak		Hepatitis B3		
			Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	
Bengkong	Sei Panas	2080	2164	104.04	2102	101.06	1813	87.16	2010	96.63	1922	92.40	940	45.19	2010.56
Batu Ampar	Tg.Sengkuang	1411	1379	97.73	1379	97.73	1293	91.64	1494	105.88	1454	103.05	1419	100.57	1273.56
Blk Padang	Blk Padang	527	366	69.45	388	64.14	401	76.09	425	80.65	359	68.12	0	0.00	231.79
Lubuk Baja	Lubuk Baja	1936	1692	87.40	1980	102.27	1916	98.97	1879	97.06	1499	77.43	0	0.00	1904.29
Galang	Galang	374	372	99.47	156	41.71	180	48.13	156	41.71	390	104.28	0	0.00	94.00
Bulang	Bulang	228	227	99.56	312	136.84	254	111.40	276	121.00	230	100.88	249	109.21	238.28
Sekupang	Sekupang	3911	2947	75.35	3568	91.23	3332	85.20	3160	80.80	2738	70.01	0	0.00	3491.26
Nongsa	Sambau	1028	816	79.38	804	78.21	912	88.72	876	85.21	624	60.70	432	42.02	726.39
Batam Kota	Baloi Permai	2667	2484	93.14	2937	110.12	3045	114.17	2975	111.55	2740	102.74	0	0.00	2843.71
Sei Beduk	Sei Pancur	1895	1646	86.86	1878	99.1	1650	87.07	1543	81.42	1458	76.94	0	0.00	1800.36
Sagulung	Sei Lekop	2919	2066	70.78	2028	69.48	1715	58.75	1854	65.31	1719	58.89	422	14.46	1943.24
Batu Aji	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Jumlah		18976	16159	85.15	17482	92.13	16511	87.01	16648	87.73	15133	79.75	3462	18.24	17395.4

Sumber: Profil Dinkes kota Batam 2007

Layanan imunisasi (BCG, DPT 1+HB1, DPT 3+HB 3, Polio 3, Campak, Hepatitis B3) di yang dilakukan oleh 11 Puskesmas yang tersebar pada setiap kecamatan telah menjangkau angka sebesar 17.395 dari 18.976 bayi Kota Batam. Apabila dicermati sebarannya per kecamatan gambarannya sebagai berikut : **1) Kecamatan Bengkong** dengan jumlah bayi sebanyak 2.080 bayi, 2.164 atau 104,04% telah mendapat imunisasi BCG (84 bayi mungkin datang dari daerah lain), 2.102 bayi atau 101,06% telah mendapat imunisasi DPT1+HB1 (22 bayi mungkin datang dari daerah lain), 1.813 bayi atau 87,16% telah mendapat imunisasi DPT3+HB3, 2.010 bayi atau 96% telah mendapat imunisasi Polio 3, 1.922 bayi atau 92% telah mendapat imunisasi campak, dan 940 bayi atau 45,19% telah mendapat imunisasi Hepatitis B3. **2) Kecamatan Batu Ampar** dengan jumlah bayi sebanyak 1.411 bayi, 1.379 atau 97.73% telah mendapat imunisasi BCG, 1.379 bayi atau 97.73% telah mendapat imunisasi DPT1+HB1, 1.293 bayi atau 91.64% telah mendapat imunisasi DPT3+HB3, 1.494 bayi atau 105,88% telah mendapat imunisasi Polio 3 (83 bayi mungkin data dari daerahlain), 1.454 bayi atau 103,05” telah mendapat imunisasi campak (43 bayi mungkin data dari daerah lain), dan 1.419 bayi atau 100,57% telah mendapat imunisasi Hepatitis B3 (8 bayi mungkin datang dri daerah lain). **3) Kecamatan Belakang Padang** dengan jumlah bayi sebanyak 527 bayi, 366 atau 69.45% telah mendapat imunisasi BCG, 388 bayi atau 64,14% telah mendapat imunisasi DPT1+HB1, 401 bayi atau 746%09 telah mendapat imunisasi

DPT3+HB3, 425 bayi atau 80,65% telah mendapat imunisasi Polio3, 359 bayi atau 68,12% telah mendapat imunisasi campak, dan 0 bayi atau 0% tidak memperoleh imunisasi Hepatitis B3. **4)** Kecamatan Lubuk Baja dengan jumlah bayi sebanyak 1.936 bayi, 1.692 atau 69.45% telah mendapat imunisasi BCG, 1.980 bayi atau 102,27% telah mendapat imunisasi DPT1+HB1 (44 bayi mungkin datang dari daerah lain), 1.916 bayi atau 98,97% telah mendapat imunisasi DPT3+HB3, 1.879 bayi atau 97,06% telah mendapat imunisasi Polio3, 1.499 bayi atau 77,43% telah mendapat imunisasi campak, dan 0 bayi atau 0% tidak memperoleh imunisasi Hepatitis B3. **5)** Kecamatan Galang dengan jumlah bayi sebanyak 374 bayi, 372 atau 99,47% telah mendapat imunisasi BCG, 156 bayi atau 41,71% telah mendapat imunisasi DPT1+HB1, 180 bayi atau 48.13% telah mendapat imunisasi DPT3+HB3, 156 bayi atau 41,71% telah mendapat imunisasi Polio3, 390 bayi atau 104,28% telah mendapat imunisasi campak (16 bayi mungkin datang dari daerah lain), dan 0 bayi atau 0% tidak memperoleh imunisasi Hepatitis B3. **6)** Kecamatan Bulang dengan jumlah bayi sebanyak 228 bayi, 227 atau 99,56% telah mendapat imunisasi BCG, 312 bayi atau 136,84% telah mendapat imunisasi DPT1+HB1 (24 bayi mungkin datang dari daerahlain), 254 bayi atau 111,40% telah mendapat imunisasi DPT3+HB3 (34 bayi mungkin datang dari daerah lain), 276 bayi atau 121% telah mendapat imunisasi Polio3 ( 48 bayi mungkin datang dari daerah lain), 230 bayi atau 100,88% telah mendapat imunisasi campak (2 bayi mungkin datang dari daerah lain), dan 249 bayi atau 109,28% telah memperoleh imunisasi Hepatitis B3 (21 bayi mungkin datang dari daerah lain). **7)** Kecamatan Sekupang dengan jumlah bayi sebanyak 3.911 bayi, 2.947 atau 75,35% telah mendapat imunisasi BCG, 3.568 bayi atau 91,23% telah mendapat imunisasi DPT1+HB1, 3.332 bayi atau 85,20% telah mendapat imunisasi DPT3+HB3, 3.160 bayi atau 80,80% telah mendapat imunisasi Polio3, 2.738 bayi atau 70,01% telah mendapat imunisasi campak , dan 0 bayi atau 0% tidak memperoleh imunisasi Hepatitis B3. **8)** Kecamatan Nongsa dengan jumlah bayi sebanyak 1.028 bayi, 816 atau 79,38% telah mendapat imunisasi BCG, 804 bayi atau 78,21% telah mendapat imunisasi DPT1+HB1, 912 bayi atau 88,72% telah mendapat imunisasi DPT3+HB3, 876 bayi atau 85,21% telah mendapat imunisasi Polio3, 624 bayi atau

60,70% telah mendapat imunisasi campak , dan 432 bayi atau 42,02% telah memperoleh imunisasi Hepatitis B3.

**9)** Kecamatan Batam Kota dengan jumlah bayi sebanyak 2.667 bayi, 2.484 atau 93,14%% telah mendapat imunisasi BCG, 2.937 bayi atau 110,12% telah mendapat imunisasi DPT1+HB1 (270 bayi mungkin datang dri daerah lain), 3.045 bayi atau 114,17% telah mendapat imunisasi DPT3+HB3 (378 bayi mungkin datang dari daerah lain), 2.975 bayi atau 111,55% telah mendapat imunisasi Polio3 (308 bayi mungkin datang dari daerah lain), 2.740 bayi atau 102,74% telah mendapat imunisasi campak (73 bayi mungkin data dari daerah lain) , dan 0% bayi atau 0% tidak memperoleh imunisasi Hepatitis B3. **10)** Kecamatan Sei Beduk dengan jumlah bayi sebanyak 1.895 bayi, 1.646 atau 86,86% telah mendapat imunisasi BCG, 1.878 bayi atau 99,1% telah mendapat imunisasi DPT1+HB1, 1.650 bayi atau 87,07% telah mendapat imunisasi DPT3+HB3, 1.543 bayi atau 81,42% telah mendapat imunisasi Polio3, 1.458 bayi atau 76,94% telah mendapat imunisasi campak, dan 0% bayi atau 0% tidak memperoleh imunisasi Hepatitis B3. . **11)** Kecamatan Sagulung dengan jumlah bayi sebanyak 2.919 bayi, 2.066 atau 70,78% telah mendapat imunisasi BCG, 2.028 bayi atau 69,48% telah mendapat imunisasi DPT1+HB1, 1.715 bayi atau 58,75% telah mendapat imunisasi DPT3+HB3, 1.854 bayi atau 65,31% telah mendapat imunisasi Polio3, 1.719 bayi atau 58,89% telah mendapat imunisasi campak, dan 422% bayi atau 14,46% telah memperoleh imunisasi Hepatitis B3. **12)** Kecamatan Batu Aji (tidak ada data/nihil).

### **3. Gambaran Layanan Perawatan dan Pendidikan serta Kesenjangan dengan Target Dakkar**

Berdasarkan Target Dakkar bahwa pada tahun 2015 semua anak harus mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dan pendidikan sejak dini, maka berdasarkan analisis data di Kota Batam, Layanan imunisasi (BCG, DPT 1+HB1, DPT 3+HB 3, Polio 3, Campak, Hepatitis B3) di yang dilakukan oleh 11 Puskesmas yang tersebar pada setiap kecamatan telah menjangkau angka sebesar 17.395 dari 18.976 bayi Kota Batam, artinya terdapat kesenjangan 1.581 bayi yang belum mendapat layanan perawatan imunisasi, 56.643 balita telah mendapat pemberian Vitamin A dari 93.042 jumlah balita di Kota Batam, artinya masih terdapat sebesar 36.399 balita yang belum mendapat

pemberian Vitamin A. Selanjutnya terdapat angka sebesar 173 balita berstatus Gizi Buruk dari 93.042 jumlah balita di Kota Batam.

Layanan pendidikan bagi anak usia dini (0-6) yang jumlahnya 55.564 anak, dilayani oleh 202 Taman kanak-kanak (1 Negeri dan 201 Swasta) yang menampung sejumlah 13.564 anak (286 anak ditampung oleh TK Negeri dan 13.278 ditampung oleh TK Swasta).

Selain dilayani oleh Taman Kanak-kanak, anak-anak ini dilayani juga oleh Raudlatul Athfal (RA) sebanyak 47 sekolah yang melayani 2.897 anak. Apabila dipersandingkan dengan usia 4-6 (sebagai usia TK), maka 30.509 dikurangi 13.278 sama dengan 17.231 anak usia TK yang belum terlayani oleh pendidikan setingkat Taman kanak-kanak, dan 17.231 dikurangi oleh anak yang terlayani oleh RA sebanyak 2.897 anak, maka jumlah anak 0-6 tahun yang belum terlayani berjumlah 14.334 anak.

#### **4. Gambaran Permasalahan dan rekomendasi**

Menganalisis data secara umum, layanan perawatan dan pendidikan anak usia dini di Kota Batam menggambarkan hal yang cukup baik, walaupun jika dikaji secara detail masih terdapat hal yang harus ditingkatkan bahkan diupayakan dengan sangat terencana dan sistematis serta melalui kerja sama antara keluarga/orangtua, masyarakat, dan pemerintah (sampai pada tingkat yang paling bawah). Sejumlah permasalahan dan kendala yang dihadapi, antara lain:

- a) Masih terdapat sejumlah 14.334 anak usia dini yang belum terlayani oleh pendidikan prasekolah setingkat TK/RA
- b) Masih terdapat 1.581 bayi yang belum terlayani oleh imunisasi BCG, DPT1+HB1, DPT3+HB3, Polio 3, Campak, dan Hepatitis B3, dan terdapat 4 (empat) kecamatan yaitu : Kecamatan Sei Beduk, Batam Kota, Belakang Padang, dan Sekupang tidak memperoleh imunisasi Hepatitis B3, serta 1 (satu) kecamatan yaitu Kecamatan Batu Aji yang angka imunisasinya Nihil (NoI) untuk semua jenis.
- c) Masih terdapat angka 36.399 balita yang belum mendapatkan pemberian Vitamin A, yaitu dari jumlah 93.042 balita hanya 56.643 balita yang memperoleh pemberian Vitamin A.
- d) Masih harus mengaktifkan kembali dan atau menambah intensitas kegiatan posyandu di beberapa kelurahan atau di lingkungan masyarakat, karena dengan

jumlah bayi dan balita yang ada tidak mungkin dapat dilayani dengan baik oleh 246 posyandu.

- e) Rendahnya tingkat sosial-ekonomi orang tua dan masyarakat yang seringkali menghambat dan menjadi alasan rendahnya aksesibilitas anak terhadap pendidikan maupun layanan dan perawatan anak usia dini.
- f) Secara intensif masih harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemberian layanan perawatan dan pendidikan kepada anak sejak usia dini.
- g) Kurangnya tenaga kependidikan PAUD yang profesional /ahli dibidang PAUD.
- h) Terbatasnya dana pemerintah dalam penanganan PAUD sehingga dukungan yang diberikan pemerintah guna mendukung pemerataan layanan pendidikan dan pelayanan perawatan bagi anak usia dini pun terbatas pula.
- i) Masih memerlukan pengembangan program layanan yang terpadu yang dapat memberikan layanan seutuhnya bagi anak usia dini, yang mencakup layanan pendidikan, kesehatan, perawatan dan gizi.
- j) Belum intensifnya kemitraan/jalinan kerjasama antara Pemerintah dengan berbagai lembaga, instansi dan organisasi yang terkait dalam pembinaan pendidikan dan layanan perawatan bagi anak usia dini.
- k) Kondisi geografis yang kurang mendukung pada beberapa wilayah tertentu sehingga akses ke pelayanan pendidikan dan perawatan terbatas.

Guna meningkatkan mutu dan perluasan layanan rawatan dan pendidikan bagi anak usia dini, khususnya bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung, beberapa hal yang perlu direkomendasikan agar tercapainya program pengembangan pendidikan anak usia dini sesuai dengan target Dakkar sebagai berikut:

- a) Perlunya pengembangan program bagi pendidikan anak usia dini yang terintegrasi dengan Posyandu dan BKB di tangani secara intensif.
- b) Pentingnya penyuluhan kepada masyarakat (Orang tua) tentang perawatan dan pendidikan anak usia dini/sosialisasi PAUD.
- c) Mengaktifkan lembaga-lembaga masyarakat untuk lebih berperan dalam penanganan anak usia dini.



- d) Perlunya upaya meningkatkan anggaran dan biaya operasional para kader PAUD dan pembentukan lembaga-lembaga PAUD terutama untuk daerah yang belum ada pusat PAUD nya seperti : Kecamatan dan Kecamatan.
- e) Melakukan pembinaan terhadap anak-anak jalanan yang seringkali menganggap dirinya termarginalkan melalui rumah singgah bagi Usia PAUD.
- f) Peningkatan sarana prasarana posyandu terutama daerah-daerah hinterland.

## **5. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Batam yang Terkait dengan PAUD**

Kebijakan pembangunan pendidikan Pemerintah Daerah Kota Batam terkait dengan Misi ke IV yang berbunyi : "Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, menguasai IPTEK dan bermuatan IMTAQ melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagimasyarakat serta pembinaan kepemudaan dan olahraga".

Beberapa kebijakan Pemerintah kota Batam yang dikatagorikan pada fokus 1 yaitu : Terwujudnya peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, dan pada Fokus II, yaitu : "Terwujudnya peningkatan kualitas dan pemerataan kesehatan serta peningkatan kualitas keluarga. Dan dalam rangka mendukung gerakan Pendidikan anak usia dini antara lain terinci dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2006-2011:

### **a) Kebijakan 2006 - 2011**

- 1) Secara umum kebijakan yang tertuang di dalam RPJMD Kota Batam adalah meningkatkan kualitas pendidikan, perluasan kesempatan belajar serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dan peserta didik.
- 2) Sedangkan kebijakan yang terkait dengan fokus II adalah meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana bagi masyarakat.

### **b) Program Pembangunan , Indikator Keluaran , dan target sasaran**

Program pembangunan pelayanan perawatan dan pendidikan anak usia dini, terkait dengan program penyelenggaraan pendidikan yang indikator keluaran serta target sarannya seperti berikut :

## **1) Program yang telah dilaksanakan 2006 s/d 2011**

Pengejawantahan program pembangunan yang terkait dengan layanan perawatan dan pendidikan anak usia dini dan dalam rangka turut serta dalam mencapai target Dakkar di Kota Batam, telah dilaksanakan berbagai program antara lain:

- 1.1) Layanan pendidikan anak usia dini di Kota Batam pada tahun 2006 yang jumlah 55.564 anak dilayani oleh 202 Taman Kanak-kanak yang melayani 13.564 anak usia dini.
- 1.2) Layanan pendidikan anak usia dini dilayani juga oleh Raudlatul Athfal (RA) sebanyak 47 sekolah yang melayani 2.897 anak.
- 1.3) Pemberian vitamin A sebanyak 2 kali terhadap balita menurut data yang disajikan dalam Profil Dinas Kesehatan Kota Batam telah diberikan kepada 56.643 anak balita yang mendapat vitamin A 2 kali.
- 1.4) Melakukan pendataan anak berstatus gizi buruk di Kota Batam yang secara keseluruhan (dari 12 kecamatan) ditemukan berjumlah 173 anak balita dari 92.869 anak balita di Kota Batam.
- 1.5) Memberi layanan dan perawatan bagi anak usia dini oleh sekitar 256 Poosyandu dengan berbagai "atribut level" yang disandangnya.
- 1.6) Layanan imunisasi (BCG, DPT 1+HB1, DPT 3+HB 3, Polio 3, Campak, Hepatitis B3) di yang dilakukan oleh 11 Puskesmas yang tersebar pada setiap kecamatan telah menjangkau angka sebesar 17.395 dari 18.976 bayi Kota Batam.
- 1.7) Pengembangan program BKB dan diintegrasikan dengan program pembinaan yang terkait dengan menekan angka kematian ibu dan anak.

## **2) Program yang direncanakan 2006 s/d 2011**

- 2.1) Pembangunan TK dari 1 unit menjadi 12 unit (baca : lihat fokus I Indikator Keluaran nomor 03)
- 2.2) Terlaksananya Pembinaan Anak Usia Dini sebanyak 750 orang (baca : lihat fokus I Indikator Keluaran nomor 23)

- 2.3) Penurunan rasio angka kematian bayi dari 20 menjadi 15 per 1.000 kelahiran hidup. Penurunan angka kematian ibu dari 20 menjadi 15 orang. (baca : lihat Fokus II Indikator Keluaran nomor 01)
- 2.4) Penurunan gizi buruk pada masyarakat dari 0,4% menjadi 0,35% dari 75.000 Balita(baca : lihat Fokus II Indikator Keluaran nomor 02)
- 2.5) Terlaksananya imunisasi dan surveylance untukmencapai UCI (Universal Child Immunization) 100% (baca : lihat Fokus II Indikator Keluaran nomor 06))
- 2.6 ) Terbinanya Posyandu dari 186 menjadi 240 posyandu, terlatihnya 320 orang kader posyandu, terpilihnya posyandu teladan sebanyak 20 (baca : lihat Fokus II Indikator Keluaran nomor 08)
- 2.7) Terlatihnya Guru UKS 200 orang, Dokter Kecil sebanyak 6 X 192 SD, petugas SBH di Puskesmas sebanyak 30 orang, terbentuknya desa siaga percontohan di 12 kecamatan20 (baca : lihat Fokus II Indikator Keluaran nomor 09).
- 2.8) Terlaksananya penyebarluasan informasi kesehatan pada masyarakat melalui media cetak dari 2 menjadi 5 program kesehatan, radio sport dari 630 menjadi 3.600 kali, media luar ruangan menjadi 10 buah, terlaksananya penyuluhan langsung ke kelompok masyarakat sebanyak 140 kali, **penyuluhan kelompok di sekolah** sebanyak 120 kali (baca : lihat Fokus II Indikator Keluaran nomor 10).
- 2.9) Terlaksananya diteksi dini bagi keluarga bagi keluarga rawan kesehatan (baca : lihat Fokus II Indikator Keluaran nomor 15).
- 2.10) Terlaksananya sosialisasi penyelenggaraan pelayanan puskesmas di perkotaan (baca : lihat Fokus II Indikator Keluaran nomor 16).
- 2.11) Terlaksananya pembinaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik oleh pemerintah maupun swasta (baca : lihat Fokus II Indikator Keluaran nomor 17).
- 2.12) Terbangunnya Puskesmas dari 11 maenjadi 21 Puskesmas (baca : lihat Fokus II Indikator Keluaran nomor 23).

**2.13)** Terbangunnya Polindes dari 30 menjadi 66 (baca : lihat Fokus II Indikator Keluaran nomor 24).

**3) Peta sasaran Prioritas Pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

- 3.1) Kecamatan Galang harus menjadi daerah prioritas sasaran pembangunan Taman Kanak-kanak (TK) atau RA/Sederajat , sebab sampai tahun 2007, kecamatan ini tidak memiliki satupun TK/RA/Sederajar
- 3.2) Kecamatan Batu Aji, Belakang Padang, Sei Beduk, Batam Kota, dan Sekupang harus menjadi daerah prioritas sasaran imunisasi khususnya Hepatitis B3, karena 5 kecamatan ini diperoleh data nihil (0%) bayi yang diimunisasi Hepatitis B3 atau 0% tidak memperoleh imunisasi Hepatitis B3.
- 3.2) Kecamatan Batu Aji harus menjadi daerah prioritas (khusus) pembinaan layanan perawatan khususnya imunisasi, karena kecamatan ini adalah satu-satunya kecamatan yang angka imunisasinya Nihil (NoI) untuk semua jenis.
- 3.3) Kecamatan Batu Aji juga harus menjadi daerah prioritas (khusus) pembinaan layanan perawatan khususnya pemberian Vitamin A 2 Kali karena kecamatan ini adalah satu-satunya kecamatan yang angkanya Nihil (NoI) untuk semua jenis termasuk data kondisi gizi balitanya.
- 3.4) 5 (lima) kecamatan di bawah ini harus menjadi perhatian khusus; karena tercatat bahwa angka lahir mati pada tahun 2007 sebesar 155 orang anak angka terbesar yaitu sebanyak 60 bayi lahir mati terjadi di Kecamatan Sekupang dan 4.845 lahir hidup , 37 bayi lahir mati dan 3.911 lahir hidup terjadi Kecamatan Batu Ampar, 23 bayi lahir mati dan 2.770 lahir hidup di Kecamatan Lubuk Baja, 22 bayi lahir mati dan 3.177 lahir hidup di Kecamatan Sei Beluk, dan 8 bayi lahir mati dan 2.253 lahir hidup di Kecamatan Sagulung.

### **III**

## **PENDIDIKAN DASAR**

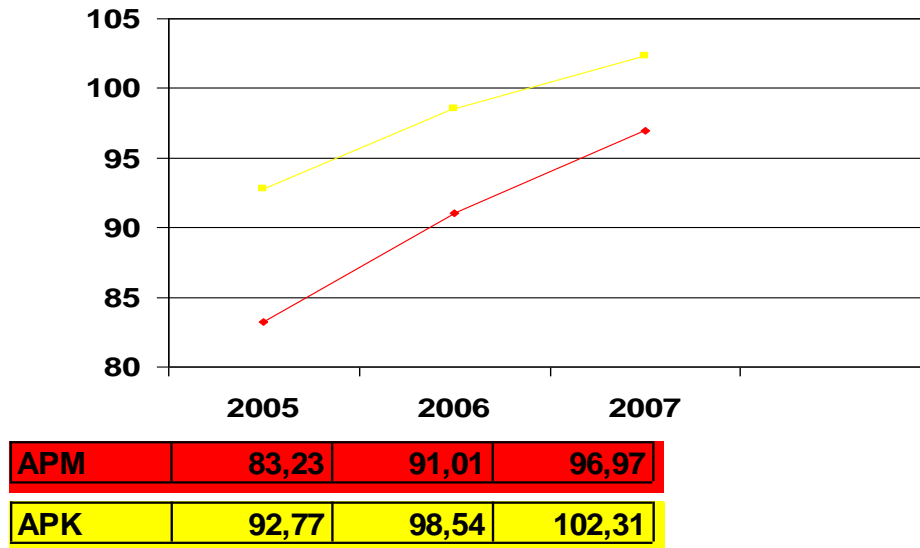
Kinerja pendidikan dasar dimulai dengan gambaran secara umum, selanjutnya tentang akses, kemudian bahasan diarahkan terhadap tiga isu pokok butir-butir kesepakatan Dakar tentang pendidikan dasar, pertama, akses terhadap pendidikan dasar yang bermutu, kedua, tingkat penyelesaian pendidikan dasar, ketiga, akses anak dari keluarga ekonomi lemah, anak di pedesaan/kepulauan, anak perempuan, dan anak berkebutuhan khusus terhadap pendidikan.

#### **1. Aksesibilitas Terhadap Pendidikan Dasar**

##### **1) Gambaran umum**

Tahun 2006, penduduk Kota Batam kelompok usia 7 sampai 12 tahun berjumlah 71.717 dan pada tahun 2007 berjumlah 72.913 orang, dilihat dari angka partisipasi, penyelenggaraan program pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dari tahun 2005 sampai tahun 2007 secara umum menggambarkan kenaikan angka yang signifikan anak kelompok usia ini mendapat layanan pendidikan. Gambaran aksesibilitas atau partisipasi atau APK dan APM anak usia Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah tahun 2005 sampai 2007 dapat divisualisasi di bawah ini :

Gambar 3.1  
Perkembangan APM dan APK SD/MI di Kota Batam, 2005 – 2007



Mencermati tabel 4.1 di atas, terdapat lonjakan APK dan APM Sekolah dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang sangat berarti pada setiap tahunnya (2005 ke 2006 ke 2007). Tahun 2005 APK berada pada angka 92,77% dengan APM 83,23%, tahun 2006 upaya layanan pendidikan untuk kelompok usia 7 – 12 tahun naik luar biasa yaitu untuk APK naik 5,77% menjadi sebesar 98,54%, dan untuk APM naik 7,78% yaitu menjadi 91,01%. Tahun 2006 ke 2007 juga tidak berbeda, yakni mengalami kenaikan yang sangat berarti; yakni untuk APK naik 3,77% menjadi sebesar 102,31%, dan APM naik 5,96% menjadi sebesar 96,97%. Inilah angka, ketika dilihat sepintas sepertinya tidak berarti, namun angka gap yang tersaji pada gambar 3.1 akan memberi gambaran kualitas layanan pendidikan bagi anak usia 7 – 12 tahun yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

Menganalisis APM atau tingkat aksesibilitas murni penduduk usia 7 – 12 tahun pada tahun 2005 ternyata memiliki angka gap sebesar 16,77%; dan ini artinya masih terdapat 10.023 (sepuluh ribu dua puluh tiga) anak usia 7 – 12 tahun di Kota Batam yang belum terlayani oleh pendidikan setingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sederajat dengan berbagai alasan. Tahun 2006 memiliki angka gap sebesar 8,99%; dan ini artinya masih terdapat 6.053 (enam ribu lima puluh tiga) anak usia 7 – 12 tahun di Kota Batam yang belum terlayani oleh pendidikan setingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sederajat.

Tahun 2007 memiliki angka gap sebesar 3,03%; dan ini artinya masih terdapat 2.209 (dua ribu dua ratus sembilan ) anak usia 7 – 12 tahun di Kota Batam yang belum terlayani oleh pendidikan setingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sederajat. Andai angka ini dapat dipercaya, tentu ada konsekuensi dan implikasi. 2.209 anak yang tidak terlayani melalui program pendidikan Sekolah dasar/Madrasah Ibtidaiyah/ sederajat adalah angka yang cukup besar. Inilah kenyataan yang dihadapi dan bagaimanapun ini adalah sebuah permasalahan yang dicarikan upaya-upaya solutif sehingga tanggung jawab sebagai penyelenggara, pengelola, pembina, pemberi layanan secara operasional dapat melakukannya dengan baik.

## 2) Keragaman Antar Kecamatan

Gambaran kondisi aksesibilitas terhadap pendidikan dasar Kota Batam digunakan data tahun 2007. Tahun 2007, tercatat rerata APM SD/MI di Kota Batam mencapai 96,97 %. Dibandingkan dengan rerata Kota, akses terhadap pendidikan SD/MI pada tingkat kecamatan menunjukkan adanya keragaman (tabel 4.1), keragaman tersebut sebesar 96,97% sampai serendah 95,47% Kecamatan Sagulung), 95,51% Kecamatan Bulang), dan 95,83% Kecamatan Bengkong). Secara keseluruhan, dibandingkan dengan rerata kecamatan terdapat satu kecamatan yang memiliki angka partisipasi murni lebih tinggi yaitu Kecamatan Belakang Padang, yaitu sebesar 101,76%.

Tabel 3.1  
Keragaman APK/APM SD/MI Antar Kecamatan di Kota Batam, 2007

Kecamatan	APM	APK
Bengkong	95.51	103.73
Batu Ampar	97.4	102.82
Belakang Padang	101.76	105.33
Lubuk Baja	98.25	104.13
Galang	98.76	102.3
Bulang	95.83	100.73
Kota Batam (Rerata)	96.97	102.31
Sekupang	98.24	102.99
Nongsa	98.1	102.49
Batam Kota	96.18	101.86
Sei Beduk	97.23	101.14
Sagulung	95.47	100.3
Batu Aji	96.36	100.96

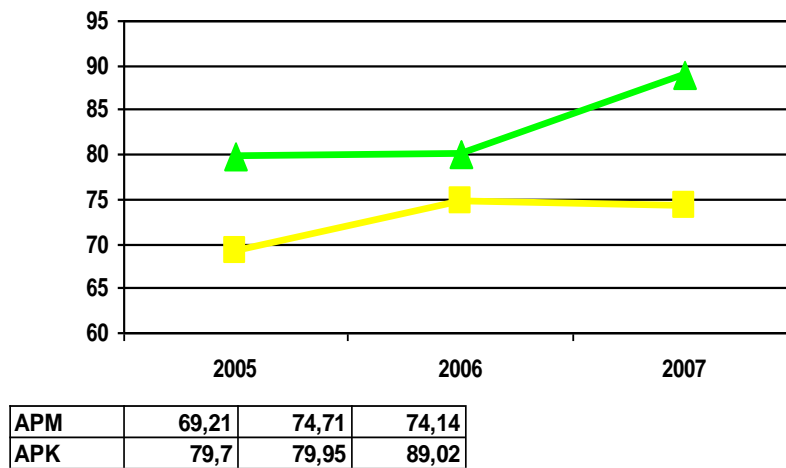
Sumber : Profil pendidikan Kota Batam 2007

Data tersebut mengindikasikan bahwa di setiap Kecamatan masih terdapat anak usia 7-12 tahun yang belum terlayani pendidikannya. Implikasi yang harus ditanggung adalah

bagaimana pemerintah daerah, masyarakat maupun orang tua/keluarga menyadari bahwa mereka harus diupayakan untuk kembali ke sekolah ataupun ke tempat belajar lainnya, sehingga mereka tidak menjadi beban bagi orang lain dan tidak memiliki beban diri karena tidak memiliki kompetensi sebagaimana yang diharapkan.

**b. Aksesibilitas Terhadap Pendidikan SLTP**  
**1) Gambaran Umum di Kota Batam**

Gambar 3.2  
 Perkembangan APM/APK SMP/MTs di Kota Batam, 2005-2007



Mencermati tabel 4.2 di atas, terdapat lonjakan APK dan APM SMP/MTs/Sederajat, menggambarkan cukup berarti pada setiap tahunnya (2005 ke 2006 ke 2007). Tahun 2005 APK berada pada angka 79,7% dengan APM 69,21%, tahun 2006 upaya layanan pendidikan untuk kelompok usia 13 – 15 tahun APK naik 0,25% menjadi sebesar 79,95%, dan untuk APM naik 5,50% yaitu menjadi sebesar 74,71%. Tahun 2006 ke 2007 justru berbeda, yang mengalami kenaikan berarti pada APK; yakni naik 9,07% menjadi sebesar 89,02%, namun APM turun sebesar 0,57% menjadi sebesar 74,14%. Inilah angka, ketika dilihat sepiintas sepiertinya tidak berarti, namun angka gap yang tersaji pada tabel 3.1 akan memberi gambaran kualitas layanan pendidikan bagi anak usia 13 – 15 tahun yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.



Menganalisis APM atau tingkat aksesibilitas murni penduduk usia 13 – 15 tahun pada tahun 2005 ternyata memiliki angka gap sebesar 30,79%; dan ini artinya masih terdapat 4.845 (empat ribu delapan ratus empat puluh lima) anak usia 13– 15 tahun di Kota Batam yang belum terlayani oleh pendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertrama/Madrasah Tsanawiyah/Sederajat dengan berbagai alasan. Tahun 2006 memiliki angka gap sebesar 25,3%; dan ini artinya masih terdapat 5.178 (lima ribu seratus tujuh puluh delapan ) anak usia 13 – 15 tahun di Kota Batam yang belum terlayani oleh pendidikan setingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sederajat. Tahun 2007 memiliki angka gap sebesar 25,9%; dan ini artinya masih terdapat 6.396 (enam ribu tiga ratus sembilan puluh enam ) anak usia 13 – 15 tahun di Kota Batam yang belum terlayani oleh pendidikan setingkat SMP/MTs/Sederajat. Andai angka ini dapat dipercaya, tentu ada konsekuensi dan implikasi. 6.396 anak yang tidak terlayani melalui program pendidikan SMP/MTs/sederajat adalah angka yang cukup besar dan trend-nya naik dari tahun 2006.

## **2) Keragaman Antar Kecamatan**

Gambaran kondisi aksesibilitas terhadap pendidikan dasar Kota Batam digunakan data tahun 2007. Tahun 2007, tercatat APM SMP/MTs/Sederajat di Kota Batam mencapai rerata sebesar 74,14 %. Dibandingkan dengan rerata kecamatan, akses terhadap pendidikan SMP/MTs/Sederajat pada tingkat kecamatan menunjukkan adanya keragaman (tabel 3.1), keragaman tersebut mulai dari 85,01% (Kecamatan Lubuk Baja), 83,73% (Kecamatan Batam Kota) sampai yang terendah 40,4% (Kecamatan Galang). Secara keseluruhan, dibandingkan dengan rerata Kota terdapat satu kecamatan yang memiliki angka partisipasi murni lebih tinggi yaitu Kecamatan Lubuk Baja, yaitu sebesar 85,01%.

Tabel 3.2  
Keragaman APK/APM SMP/MTs Antar Kecamatan  
di Kota Batam, 2007

<b>Kecamatan</b>	<b>APM</b>	<b>APK</b>
Belakang Padang	68.77	85.87
Batu Ampar	76.84	90.02
Sekupang	69.29	85.87
Nongsa	69.72	86.41
Bulang	60.59	87.19
Lubuk Baja	85.01	96.72
<b>Kota Batam (Rerata)</b>	<b>74.14</b>	<b>89.02</b>
Sei Beduk	67.22	82.73
Galang	40.4	60.1
Bengkong	74.39	91.71
Batam Kota	83.72	91.85
Sagulung	78.06	89.55
Batu Aji	66.69	90.28

Sumber : Profil Pendidikan kota Batam 2007

Data tersebut mengindikasikan bahwa di setiap Kecamatan masih terdapat anak usia 13-15 tahun yang belum terlayani pendidikannya. Implikasi yang harus ditanggung adalah bagaimana pemerintah daerah, masyarakat maupun orang tua/keluarga menyadari bahwa mereka harus diupayakan untuk kembali ke sekolah ataupun ke tempat belajar lainnya, sehingga mereka tidak menjadi beban bagi orang lain dan tidak memiliki beban diri karena tidak memiliki kompetensi sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan secara politis, pemerintah bertanggungjawab untuk menuntaskan program Wajib Belajar Sembilan Tahun.

## 2. Tingkat Penyelesaian Pendidikan Dasar

Menganalisis data tahun 2006 (Sumber : Profil Pendidikan 2006) terdapat 89,2% anak usia 7 -12 tahun yang menamatkan pendidikan setingkat SD/MI/Sederajat, artinya 10,77% (7.725) anak usia 7 -12 tahun lainnya yang tidak atau belum menamatkan pendidikan setingkat SD/MI/Sederajat. Sedangkan untuk anak usia 13 – 15 tahun terdapat sebesar 88,5% yang menamatkan pendidikan SLTP. Artinya, 16,47% (3.372) anak usia 13 – 15 tahun lainnya tidak atau belum dapat menyelesaikannya pendidikannya dalam

kurun waktu 9 tahun. Beberapa hal yang menjadi penyebab diantaranya putus sekolah baik di SD/MI maupun SMP/MTs, anak yang mengulang, dan masih terdapat anak lulusan Sekolah dasar tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi (SMP/MTs/Sederajat). Sekali lagi ada implikasi dan konsekuensi bagi semua pihak; baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun keluarga untuk segera mencari upaya solutif; baik dalam rangka memberikan layanan terhadap hak-hak dasar anak, maupun sebagai kewajiban bahwa Kota Batam harus menyelesaikan program Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Gerakkan Pemberantasan Buta Aksara, terlebih bagi kaum perempuan sebagaimana amanat Kesepakatan Dakar tentang Pendidikan Untuk Semua (PUS) atau "Education For All" (EFA).

### **1) Tingkat Mengulang Kelas**

Rata-rata angka mengulang (AU) SD/MI atas dasar data tahun 2005-2007 sebagai berikut: tahun 2005 sebesar 3,60%, pada tahun 2006 trendnya menjadi turun yakni hanya sebesar 0,17%; namun pada tahun 2007, naik kembali menjadi 3,0% (baca: lihat Tabel 2.11). Sedangkan rata-rata angka mengulang (AU) SMP/MTs tahun 2005 sebesar 0,75%, pada tahun 2006 naik menjadi sebesar 19,30%; namun pada tahun 2007, turun drastis menjadi 1,0% (baca: lihat bagian sebelumnya).

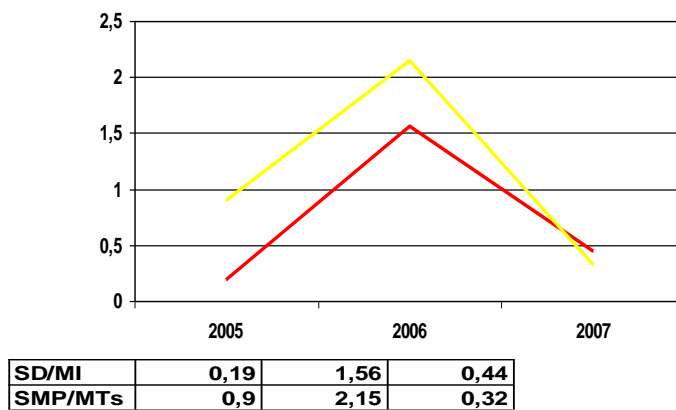
Angka mengulang kelas SD/MI dan SMP/MTs, keduanya mengalami pluktuasi yang angkanya cukup besar, seperti gambaran data di atas untuk SD/MI dari tahun 2005 ke 2006 trend-nya turun drastis, namun tahun 2007 trendnya naik cukup besar. Untuk SMP/MTs, rata-rata angka mengulangnya naik turun, seperti pada tahun 2005 ke 2006 trend-nya naik cukup besar, sedangkan tahun 2007 turun kembali pada angka 1,0%. Ada implikasi dan konsekuensi apabila menganalisis angka-angka tersebut, artinya tingkat pluktuasi angka mengulang kelas ini memerlukan perhatian yang memadai. Terdapat dua alasan untuk ini. *Pertama*, mengulang kelas berperan untuk terus mendorong anak memiliki minat bersekolah. *Kedua*, mengulang kelas mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap bertambahnya angka putus sekolah. Namun demikian ketika persoalan tidak dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal karena berbagai alasan anak yang bersangkutan, maka jalur pendidikan nonformal harus

dipersiapkan sebagai upaya solutif agar anak tetap didorong untuk mengakses dan memperhatikan pendidikan dasar-nya.

## 2) Tingkat Putus Sekolah

Menganalisis angka putus sekolah di Kota Batam, baik untuk SD/MI maupun SMP/MTs, cukup menarik manakala melihat sajian data dari mulai 2005 sampai dengan 2007. Gambaran data untuk tingkat SD/MI cukup rendah, pada tahun 2005 yaitu 0.19 persen, tahun 2006 naik sebesar 1,40 % yakni menjadi 1, 56%, sedangkan pada tahun 2007 turun secara tajam menjadi 0,44 % yaitu hanya sebanyak 29 orang (Lihat Tabel 3.3). Turun naik angka putus sekolah dasar ini harus menjadi perhatian khusus, karena dikhawatirkan mereka tidak masuk lagi ke sekolah atau pada pendidikan nonformal yang sederajat lainnya seperti Paket A; maka mereka akan menjadi buta akasara kembali. Angka putus sekolah tingkat SLTP-pun gambaran datanya tidak berbeda dengan SD yaitu pada tahun 2005 menunjukkan angka putus sekolah sebesar 0.90 %, tahun 2006 trennya naik sebesar 1,30 % yaitu menjadi 2,15 %, sedangkan pada tahun 2007 turun sangat tajam menjadi 0,32 % atau sebanyak 70 siswa (lihat gambat 3.3 adan tabel 3.3).

Gambar 3.3  
Angka Putus Sekolah SD dan SMP



Sumber: Profil Pendidikan Batam 2005, 2006, 2007

**Tabel 3.3**  
**Jumlah Lulusan, Siswa, Mengulang, Putus sekolah, Siswa tingkat VI SD/MI**  
**Kota Batam 2007**

Kecamatan	Lulusan 2007/2008		Siswa 2006/2007		Mengulang 2007/2008		Putus Sekolah 2007/2008		Siswa Tingkat VI 2006/2007	
	SD	MI	SD	MI	SD	MI	SD	MI	SD	MI
Belakang Padang	382	27	2,353	180	257	23	3	0	382	27
Batu Ampar	477	30	3,431	400	73	29	1	0	477	30
Sekupang	903	70	7,547	539	190	15	4	0	903	70
Nongsa	541	0	5,112	0	195	0	5	0	541	0
Bulang	185	0	1,309	58	59	0	2	0	185	0
Lubuk Baja	1,267	0	9,113	52	183	0	5	0	1,267	0
Sei Beduk	348	0	3,798	219	47	0	0	0	348	0
Galang	312	0	2,221	0	276	0	6	0	312	0
Bengkong	1,275	0	8,113	1,183	222	14	2	0	1,275	0
Batam Kota	948	0	9,945	0	69	0	0	0	948	0
Sagulung	1,115	65	10,475	1,014	266	26	0	0	1,115	65
Batu Aji	501	0	6,554	114	101	0	1	0	501	0
Jumlah	8,254	192	69,971	3,759	1,938	107	29	0	8,254	192

Sumber : Profil Pendidikan 2007

**Tabel 3.4**  
**Jumlah Lulusan, Siswa, Mengulang, Putus sekolah, SMP/MTs**  
**Kota Batam 2007**

Kecamatan	Lulusan 2007/2008		Siswa 2006/2007		Mengulang 2007/2008		Putus Sekolah 2007/2008		Siswa Tingkat III 2006/2007	
	SMP	MTs	SMP	MTs	SMP	MTs	SMP	MTs	SMP	MTs
Belakang Padang	240	32	749	214	10	0	3	0	240	43
Batu Ampar	293	47	1.743	132	0	0	0	0	303	50
Sekupang	503	55	1.970	230	0	0	0	0	523	55
Nongsa	205	61	1.137	288	33	1	8	1	287	61
Bulang	199	29	424	87	1	0	4	2	199	29
Lubuk Baja	645	0	2.365	0	25	0	20	0	660	0
Sei Beduk	195	23	1.689	565	6	0	0	0	204	23
Galang	124	8	426	75	8	0	10	0	136	8
Bengkong	295	202	1.757	672	6	2	7	3	302	204
Batam Kota	761	0	3.043	0	42	0	2	0	763	0
Sagulung	586	0	2.177	0	12	0	0	0	591	0
Batu Aji	344	0	1.214	0	6	0	10	0	347	0
Jumlah	4.390	457	18.694	2.263	149	3	64	6	4.555	473

Sumber : Profil Pendidikan 2007

### **3) Tingkat Melanjutkan ke SLTP/MTs.**

Apabila menganalisis angka melanjutkan atau angka transisi dari SD/MI ke SMP/MTs, memang masih terdapat angka yang cukup besar, menurut data tahun 2006 terdapat angka sebesar 2.880 anak yang tamat SD/MI tapi tidak melanjutkan ke SMP/MTs atau yang sederajat, jika ditambah dengan angka putus sekolah SMP/MTs yang angkanya sebesar 3.372, maka angka anak yang tidak lanjut ke jenjang yang lebih tinggi semakin besar yaitu menjadi 6.252 anak.

### **3. Akses terhadap pendidikan dasar yang bermutu**

Akses terhadap pendidikan yang bermutu akan dianalisis melalui keragaman mutu sekolah antar kecamatan dengan indikator melihat posisi nilai Ujian Nasional dibandingkan rerata Kota Batam, dengan cara ini akan diketahui distribusi tingkat mutu pendidikan SMP/MTs yang ada di setiap kecamatan.

#### **a. Keragaman antar-Kecamatan**

Untuk mengukur akses pendidikan dasar yang bermutu pada SD amat sulit untuk menggambarannya karena keterbatasan data dan perubahan sistem kelulusan pada SD. Sedangkan berdasarkan data NUN SMP/MTs. tahun 2007 diketahui rerata NUN untuk seluruh mata pelajaran di beberapa sekolah di enam kecamatan di di bawah rerata Kota Batam, yaitu 4,80. Tingkat pencapaian NUN ini dapat ditafsirkan bahwa secara rerata, lulusan hanya menguasai 4.80 persen dari seluruh materi yang seharusnya dikuasai oleh siswa SLTP. Tingkat mutu pendidikan SLTP memiliki keberagaman menurut kecamatan; dari 12 Kecamatan terdapat 1 Kecamatan yang memiliki rerata NUN yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat rerata Kota Batam (Tabel 4.5) yaitu Kecamatan Sei Beluk sebesar 8,45%. Sedangkan NUN terendah dari rerata Kota Batam adalah berada di Kecamatan Batu Ampar yaitu sebesar 2,42. Secara umum gambaran keragaman Hasil Ujian Nasional (UN) 2007 SMP/MTs antar kecamatan dan hubungannya dengan rerata Kota Batam; dari 12 Kecamatan menunjukkan bahwa enam kecamatan berada di posisi di atas rerata Kota Batam (4,80), yakni Kecamatan Nongsa (6,17), Bulang (6,68), Sei Beduk (8,45), Bengkong (6,11), Sagulung (5,92), dan Kecamatan Batu Aji (5,36). Sedangkan

enam kecamatan lainnya berada di bawah rerata Kota Batam (4,80); yaitu Kecamatan Belakang Padang (2,64), Bata Ampar (2,42), Sekupang (4,45), Lubuk Baja (2,70), Galang (2,81), dan Kecamatan Batam Kota (3,95)

Tabel 3.5  
Keragaman NUN SMP Antar Kecamatan Tahun 2007

Diatas Rerata Kota Batam (4.80)	Dibawah Rerata Kota Batam (4.80)
Nongsa (6.17)	Belakang Padang (2.64)
Bulang (6.68)	Batu Ampar (2.42)
Sei Beduk (8.45)	Sekupang (4,45)
Bengkong (6.11)	Lubuk Baja (2.70)
Sagulung (5.92)	Galang (2.81)
Batu Aji (5.36)	Batam Kota (3.95)

Sumber Profil Pendidikan 2007

#### b. Keragaman antar kecamatan

Berdasarkan hasil Ujian Nasional tahun 2006/2007, Nilai Ujian Nasional di Kota Batam tertinggi 8,45 di Kecamatan Sei Beduk dan terendah 2,42 di Kecamatan Batu Ampar. Rentang keragaman NUN tersebut dikelompokkan menjadi 2 kategori; yaitu dilihat dari rerata per kecamatan disandingkan dengan rerata Kota Batam. Kelompok pertama, dikenal dengan kategori di atas rerata dan di bawah rerata Kota Batam.

Keragaman hasil Ujian Nasional 2006/2007 menunjukkan bahwa NUN tertinggi dan berada pada posisi di atas rerata Kota Batam adalah pada sekolah (SMP/MTs) yang berada di Kecamatan Sei Beduk yaitu 8,45 dan terendah dari rerata Kota Batam adalah pada sekolah (SMP/MTs) yang berada di Kecamatan Batu Ampar yaitu sebesar 2,42 dan menjadi pertanyaan yaitu posisi Kecamatan Batam Kota berada di bawah rerata Kota Batam yaitu hanya sebesar 3,95 (gambaran sajian data keragaman NUN SMP/MTs dapat dilihat pada tabel 3.6).

Disadari bahwa mutu hasil pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor dimana sekolah itu berada, tetapi tentunya banyak faktor yang turut memberikan sumbangan terhadap bermutunya sebuah sekolah; seperti faktor raw input/intake, instrumental input (Tingkat kelayakan guru dan pemahamannya terhadap KTSP, sarana prasarana), Implementasi pembelajaran (termasuk manajemen kelasnya) maupun kemampuan guru dalam merumuskan alat, tafsir, serta memberikan balikan terhadap hal yang memungkinkan untuk terus diberikan pengayaan bagi para siswa.

#### 4. Aksesibilitas Anak Perempuan, dan Anak Berkebutuhan Khusus Terhadap Pendidikan

##### a. Akses terhadap pendidikan bagi perempuan

Akses terhadap pendidikan dasar bagi perempuan di Kota Batam menunjukkan sudah cukup baik. Data tahun 2007 menggambarkan sajian data akses anak perempuan pada pendidikan setingkat SD/MI yaitu rerata APK siswa perempuan pada SD/MI sebesar 86,44%, dan jika dilihat per kecamatan yang disandingkan dengan rerata Kota Batam gambaran datanya divisualisasikan pada tabel 4.8 di bawah ini :

Tabel 3.6  
APK Perempuan di SD, Kota Batam

Diatas Rerata Kota Batam (86.44)	Dibawah Rerata Kota Batam (86.44)
Batu Ampar (96.46)	Belakang Padang (82.20)
Sekupang (91.01)	Nongsa (79.12)
Lubuk Baja (91.15)	Bulang (61.15)
BatamKota (91.16)	Sei Beduk (82.91)
Sagulung (90.36)	Galang (55.56)
Batu Aji (87.44)	Bengkong (84.72)

Sumber Profil Pendidikan 2007

Kalau analisis per kecamatan maka didapat informasi tentang aksesibilitas terhadap pendidikan bagi perempuan sebagai berikut : terdapat 6 (enam) pada tingkat di atas rerata Kota Batam, yaitu Kecamatan Batu Ampar (tertinggi) yaitu sebesar 96,46 %, Batam Kota 91,16 %, Lubuk Baja 91,15 %, Sekupang 91,01 %, Sagulung 90,36 %, dan Kecamatan Batu Aji sebesar 87,44 %. Sedangkan 6 (enam) kecamatan lainnya berada di bawah rerata Kota Batam (86,44 %), yaitu Kecamatan Bengkong sebesar 84,72, Sei Beduk 82,91, Belakang Padang 82,20 %, Nongsa 79,12 %, Bulang 61,15, dan terendah adalah Kecamatan Galang yaitu sebesar 55,56 %.

Jika melihat gambaran rerata tingkat Kota Batam sepertinya menunjukkan gambaran data aksesibilitas perempuan terhadap pendidikan setingkat SD/MI yang cukup baik, namun jika melihat sebaran per kecamatan di atas menunjukkan bahwa masih terdapat angka partisipasi yang masih rendah, seperti Kecamatan Bulang dan Galang.



Tabel 3.7  
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 7-12 Tahun dan Anak Usia 13-15 tahun  
Menurut Kecamatan di Kota Batam

Kecamatan	Usia 7-12 Tahun	Usia 13-15 Tahun
Belakang Padang	2,382	1,111
Batu Ampar	3,690	1,753
Sekupang	7,919	3,032
Nongsa	4,946	1,744
Bulang	1,368	609
Lubuk Baja	8,817	2,441
Sei Beduk	4,041	1,025
Galang	2,175	990
Bengkong	8,952	2,534
Batam Kota	10,237	4,944
Sagulung	11,933	2,776
Batu Aji	6,453	1,738
Jumlah	72,913	24,697

Sumber data : Profil Pendidikan Kota Batam 2007

**b. Aksesibilitas Anak Berkebutuhan Khusus Terhadap Pendidikan.**

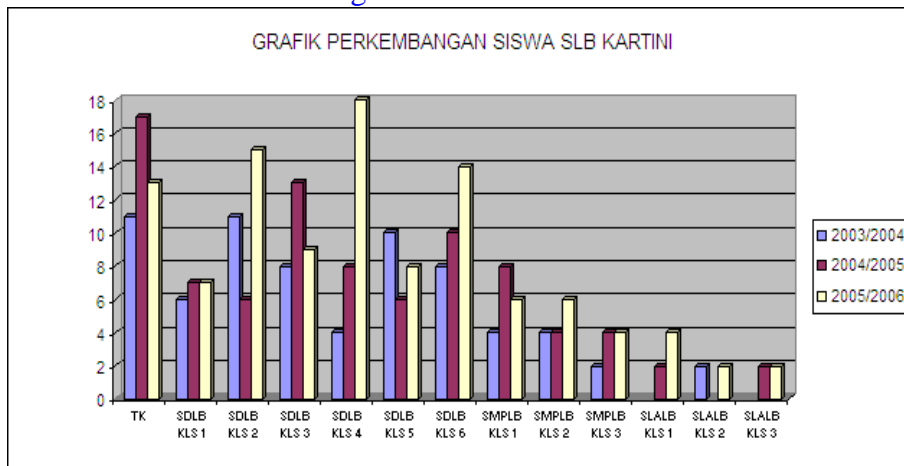
Data tentang sekolah luar biasa yang memberikan akses layanan terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK), hanya diperoleh data dari website [http://ykbatam.org/sekolah/slb\\_kartini/brosur.html](http://ykbatam.org/sekolah/slb_kartini/brosur.html) yang gambaran datanya sebagai berikut:

Tabel 3.8  
Data Sekolah dan Siswa Luar Biasa Kartini di Kota Batam

Tahun Pembelajaran	Kelas												Jumlah	
	TK	SDLB						SMPLB			SMLB			
	0	1	2	3	4	5	6	1	2	3	1	2		3
2003-2004	11	6	11	8	4	10	8	4	4	2	0	2	0	70
2004-2005	17	7	6	13	8	6	10	8	4	4	2	0	2	87
2005-2006	13	7	15	9	18	8	4	6	6	4	4	0	2	98

Sumber : [http://ykbatam.org/sekolah/slb\\_kartini/publish/data\\_siswa.htm](http://ykbatam.org/sekolah/slb_kartini/publish/data_siswa.htm)

Gambar 3.4  
 Grafik Perkembangan Siswa SLB Kartini Kota Batam



Sumber: [http://ykbatam.org/sekolah/slb\\_kartini/publish/data\\_siswa.htm](http://ykbatam.org/sekolah/slb_kartini/publish/data_siswa.htm)

Jika bersandar pada data yang ada, artinya layanan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) hanya sebesar 0,09% (61 anak) dari jumlah penduduk usia 7-12 tahun di Kota Batam, namun jika bersandar pada asumsi BPS dan atau UNESCO jumlah penduduk/anak yang terkatagori Berkebutuhan Khusus besarnya 2% (BPS) artinya sebesar 1.458 anak dari jumlah anak usia 7-12; dan jika dari 2,5% (UNESCO) maka besarnya menjadi 1.823 anak dari jumlah anak usia 7-12 tahun. Artinya jika mengambil data dari prediksi BPS, maka 1.458 dikurangi 61 anak maka menjadi 1.397 anak usia 7-12 yang terkatagori ABK belum dapat terlayani (baca: sampai data lain ditemukan). Sedangkan dari jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang jumlahnya 24.697 anak di Kota Batam hanya diakses oleh 16 orang ABK atau sebesar 0,06%. Namun jika bersandar pada asumsi BPS dan atau UNESCO jumlah penduduk/anak yang terkatagori Berkebutuhan Khusus besarnya 2% (BPS) artinya sebesar 494 anak dari jumlah anak usia 13-15 tahun; dan jika dari 2,5% (UNESCO) maka besarnya menjadi 617 anak dari jumlah anak usia 13-15 tahun. Artinya jika mengambil data dari prediksi BPS, maka 494 dikurangi 16 anak maka menjadi 478 anak usia 13-15 yang terkatagori ABK belum dapat terlayani (baca: sampai data lain ditemukan).

Jika dianalisis dari jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang jumlahnya 22.812 anak di Kota Batam, SLB Kartini Kota Batam diakses oleh 6 orang ABK atau sebesar 0,03%. Namun jika bersandar pada asumsi BPS dan atau UNESCO jumlah penduduk/anak yang

terkatagori Berkebutuhan Khusus besarnya 2% (BPS) artinya sebesar 456 anak dari jumlah anak usia 16-18 tahun; dan jika dari 2,5% (UNESCO) maka besarnya menjadi 570 anak dari jumlah anak usia 16-18 tahun. Artinya jika mengambil data dari prediksi BPS, maka 456 dikurangi 6 anak maka menjadi 450 anak usia 16-18 yang terkatagori ABK belum dapat terlayani (baca: sampai data lain ditemukan).

## **5. Gambaran Kesenjangan Dengan Target Dakkar**

Mencermati APK ataupun APM artinya mencermati tingkat aksesibilitas anak usia sekolah terhadap jenjang atau tingkat pendidikan tertentu. Gambaran APK untuk tingkat pendidikan SD/MI dari sajian data 2005 sampai dengan 2007 trendnya sangat baik; yaitu pada tahun 2005 APM SD/MI sebesar 92,77%, tahun 2006 sebesar 98,54%, dan tahun 2007 naik menjadi 102,31%. Sedangkan APM SD/MI tentunya tidak berbeda bahwa trendnyapun menjadi naik; yaitu pada tahun 2005 sebesar 83,23%, tahun 2006 sebesar 91,01%, dan pada tahun 2007 menjadi sebesar 96,97%. Artinya dari data yang tersaji Pemerintah Daerah Kota Batam memiliki tugas untuk mendorong sekitar 3,3% anak usia sekolah SD/MI untuk kembali ke sekolah atau ditangani oleh jalur pendidikan nonformal baik melalui Program Paket A ataupun Keaksaraan fungsional.

Gambaran APK untuk tingkat pendidikan SMP/MTs dari sajian data 2005 sampai dengan 2007 trendnya sangat baik; yaitu pada tahun 2005 APM SMP/MTs sebesar 79,70%, tahun 2006 sebesar 79,95%, dan tahun 2007 naik menjadi 89,02%. Sedangkan APM SMP/MTs terjadi pluktuasi walaupun pada angka yang relatif kecil; yaitu pada tahun 2005 sebesar 69,21%, tahun 2006 sebesar 74,71%, dan pada tahun 2007 terjadi penurunan yaitu menjadi sebesar 74,14%. Dari data yang tersaji dan jika disandingkan dengan target kesepakatan Dakar, maka Pemerintah Daerah Kota Batam memiliki tugas untuk mendorong sekitar 25,86% anak usia sekolah SMP/MTs (lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan atau yang drop out dari SMP/MTs) untuk kembali ke sekolah atau didorong untuk melanjutkan studinya atau ditangani oleh jalur pendidikan nonformal baik melalui Program Paket B, dan pelayanan terhadap ABK melalui SLB (SDLB/SMPLB/SMLB) harus menjadi perhatian karena pendidikan untuk semua ditujukan untuk semua anak bangsa ini.

Mengapa ini menjadi penting untuk Kota Batam, karena hal ini terkait dengan Program Nasional tentang Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Program Pemberantasan Buta Aksara secara nasional selain kesepakatan Dakar tentang Pendidikan Untuk Semua (Education For All).

## **7. Gambaran Masalah Aksesibilitas Terhadap Pendidikan Dasar**

Mencermati tingkat aksesibilitas penduduk usia 7-12 tahun terhadap jenjang pendidikan SD/MI secara umum, maka sajian data APK dan APM Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah tahun 2005 – 2007 seperti disajikan pada bagian diatas telah memberi gambaran tingkat aksesibilitas anak terhadap pendidikan SD/MI secara umum. Tahun 2005 APK berada pada angka 92,77% dengan APM 83,23%, tahun 2006 upaya layanan pendidikan untuk kelompok usia 7 – 12 tahun naik luar biasa yaitu untuk APK naik 5,77% menjadi sebesar 98,54%, dan untuk APM naik 7,78% yaitu menjadi 91,01%. Tahun 2006 ke 2007 juga tidak berbeda, yakni mengalami kenaikan yang sangat berarti; yakni untuk APK naik 3,77% menjadi sebesar 102,31%, dan APM naik 5,96% menjadi sebesar 96,97%. Inilah angka, ketika dilihat sepintas sepertinya tidak berarti, namun angka gap yang akan memberi gambaran kualitas layanan pendidikan bagi anak usia 7 – 12 tahun yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

Permasalahan yang terganbarkan jika menganalisis data APM atau tingkat aksesibilitas murni penduduk usia 7 – 12 tahun pada tahun 2005 ternyata memiliki angka gap sebesar 16,77%; dan ini artinya masih terdapat 10.023 (sepuluh ribu dua puluh tiga) anak usia 7 – 12 tahun di Kota Batam yang belum terlayani oleh pendidikan setingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sederajat dengan berbagai alasan. Tahun 2006 memiliki angka gap sebesar 8,99%; dan ini artinya masih terdapat 6.053 (enam ribu lima puluh tiga ) anak usia 7 – 12 tahun di Kota Batam yang belum terlayani oleh pendidikan setingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sederajat. Tahun 2007 memiliki angka gap sebesar 3,03%; dan ini artinya masih terdapat 2.209 (dua ribu dua ratus sembilan ) anak usia 7 – 12 tahun di Kota Batam yang belum terlayani oleh pendidikan setingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sederajat. Andai angka ini dapat dipercaya, tentu ada konsekuensi dan implikasi. 2.209 anak yang tidak terlayani melalui program pendidikan

Sekolah dasar/Madrasah Ibtidaiyah/ sederajat adalah angka yang cukup besar, karena kalau dihitung menjadi rombongan belajar artinya  $2.209 : 25 = 88$  rombongan belajar, manakala layanan dihitung per kelas 40 anak, artinya butuh 55 kelas, dan apabila layanan dihitung persatuan pendidikan menampung rata-rata 200 anak, artinya butuh 11 (sebelas) gedung Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah baru. Persoalan lain adalah manakala menganalisis data 2006 versi Profil Pendidikan Kota Batam tentang Data Keadaan Penduduk Kota Batam Menurut Tingkat Pendidikan tahun 2006, terdapat anak usia 7 – 12 tahun sebanyak 7.725 orang yang tidak tamat Sekolah dasar atau drop out dan jika dipersentasekan per kecamatan rata-rata 10,7%.

Gambaran permasalahan yang dihadapi Kota Batam tentang tingkat aksesibilitas terhadap pendidikan SD/MI masih menyisakan sejumlah anak yang harus dilayani dan mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya baik melalui jalur pendidikan formal, nonformal, maupun informal.

## **8. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Batam tentang Pendidikan Dasar**

Kebijakan pembangunan pendidikan Pemerintah Daerah Kota Batam terkait dengan Misi ke IV yang berbunyi : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, menguasai IPTEK dan bermuatan IMTAQ melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat serta pembinaan kepemudaan dan olahraga.

Pemerintah daerah telah menyikapi pembangunan pendidikan dan menganggap penting untuk mengambil langkah-langkah kebijakan dalam mengambil terobosan baru untuk mendukung program pembangunan, adapun kebijakan pembangunan pendidikan dasar di Kota Batam tertuang dalam RPJMD 2006-2011 sebagai berikut:

### **a) Kebijakan 2006 - 2011**

Secara umum kebijakan yang tertuang di dalam RPJMD Kota Batam adalah meningkatkan kualitas pendidikan, perluasan kesempatan belajar serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dan peserta didik. Kebijakan

ini berhubungan dengan upaya pencapaian Fokus I yaitu : Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan.

**b) Program Pembangunan , Indikator Keluaran , dan target sasaran**

Program pembangunan pendidikan, terkait dengan program penyelenggaraan pendidikan yang indikator keluaran serta target sasarnya seperti berikut :

**1) Program yang telah dilaksanakan 2006 s/d 2011**

Pengejawantahan program pembangunan yang terkait dengan layanan pendidikan dasar dan dalam rangka turut serta pencapaian target Dakkar di Kota Batam, telah dilaksanakan berbagai program antara lain:

- 1.1) Meningkatkan aksesibilitas pendidikan dasar setingkat SD/MI bagi perempuan di Kota Batam pada posisi rerata APK sebesar 86,44%, (baca: data tahun 2007)
- 1.2) Menekan angka putus sekolah untuk tingkat SD/MI dan tingkat SLTP pada angka yang relatif rendah.
- 1.3) Telah mengupayakan kenaikan APK SD/MI (2007) sebesar 3,77%, yaitu dari 91,01% (2006) menjadi sebesar 102,31%, dan APK SMP/Mts dari tahun 2006 sebesar 79,95% naik menjadi 89,02% pada tahun 2007.
- 1.4) Telah mengupayakan kenaikan APM SD/MI yaitu pada tahun 2006 sebesar 91,01% dan pada tahun 2007 menjadi sebesar 96,97%.
- 1.5) Telah melakukan pembangunan dan rehabilitasi serta penambahan sarana prasarana pendidikan baik berupa pembangunan RKB, perpustakaan, APE, laboratorium, rehabilitasi ruang kelas dan sekolah maupun perbaikan MCK sekolah dan semenisasi.
- 1.6) Telah mendorong sekolah-sekolah (SMP) untuk menaikkan NUN bagi anak-anak peserta Ujian nasional, dan terbukti menghasilkan NUN anak peserta Ujian Nasional SMP di 6 (enam) kecamatan berada pada posisi di atas rerata NUN SMP Kota Batam; dan yang paling tertinggi berada di Kecamatan Sei Beduk yaitu sebesar 8,45 dari rerata Kota Batam 4,80.

## **2) Program yang direncanakan 2006 s/d 2011**

- 2.1) Meningkatnya APK SD dari 92,75% menjadi 110%, SLTP dari 79,90% menjadi 95%, dan SLTA dari 58% menjadi 65% (baca : lihat fokus I Indikator Keluaran nomor 01)
- 2.2) Meningkatnya APM SD (98%), SLTP (85%), dan SLTA menjadi sebesar 60% (baca : lihat fokus I Indikator Keluaran nomor 02)
- 2.3) Meningkatnya rasio ruang kelas terhadap peserta didik : (SD 1 : 36), SLTP (1 : 30), dan SLTA 1 : 30. Selain itu pada poin berikutnya direncanakan terbangunnya RKB SD 410 lokal, SLTP 118 Lokal, terbangunnya Perpustakaan SD 20 Unit dan SMP 13 Unit, terbangunnya Sanggar Seni SD 12 unit dan SMP 12 unit, terbangunnya Ruang serba Guna SD dan SMP, terbangunnya sarana olahraga dan sanitasi SD dan SMP, dsb. (baca : lihat Fokus I Indikator Keluaran nomor 03)
- 2.4) Tersalurkannya beasiswa berprestasi SD/MI dan SMP/MTs...(baca : lihat Fokus I Indikator Keluaran nomor 04)
- 2.5) Tersalurkannya subsidi biaya penyelenggaraan pendidikan bagi siswa SD/MI, SMP/MTs... setiap tahunnya di 3 kecamatan hinterland (baca : lihat Fokus I Indikator Keluaran nomor 05)
- 2.6) Tersalurkannya subsidi biaya penyelenggaraan pendidikan bagi siswa tidak mampu SD/MI, SMP/MTs... setiap tahunnya di kecamatan perkotaan (baca : lihat Fokus I Indikator Keluaran nomor 06)
- 2.7) Tersedianya penunjang operasional sekolah di SD dan SMP, ... (baca : lihat Fokus I Indikator Keluaran nomor 07).

### **3) Peta sasaran Prioritas Pembangunan Pendidikan Dasar**

- 3.1) Dari 6 (enam) kecamatan yang harus menjadi sasaran daerah prioritas untuk ditingkatkan angka aksesibilitas anak perempuan atau APK anak perempuan usia 7-12 (SD/MI), karena di bawah angka rerata Kota Batam (86,44%), paling tidak 2 (dua) kecamatan yang lebih diutamakan; yaitu : Kecamatan Galang (55,56%) dan Kecamatan Bulang (61,15%).
- 3.2) Dari 6 (enam) kecamatan yang harus menjadi sasaran daerah prioritas untuk ditingkatkan angka aksesibilitasnya terutama APM bagi anak usia 13-15 tahun (SMP/MTs) karena di bawah angka rerata Kota Batam (74,14 ), paling tidak 2 (dua) kecamatan yang lebih diutamakan; yaitu : Kecamatan Galang (40,40%) dan Kecamatan Bulang (60,59 %).
- 3.3) Terdapat 7 (tujuh) kecamatan yang angka mengulanginya pada tingkat SD cukup tinggi, yaitu Galang (276 anak), Belakang Padang (257 anak), Sagulung (266 anak), Bengkong (222 anak), Sekupang (190 anak), Nongsa (195 anak), dan Lubuk Baja (183 anak). 7 (tujuh) kecamatan ini hendaknya menjadi prioritas pembinaan, supervisi (Akademik & Manajerial) untuk menganalisis tentang mengapa angka mengulanginya cukup besar; dan kemudian menjadi prioritas dalam memberikan treatment dan pembinaan yang solutif.
- 3.4) Terdapat 3 (tiga) kecamatan yang angka mengulanginya pada tingkat SMP cukup tinggi dibanding kecamatan lainnya, yaitu Batam Kota (42 anak), Nongsa (33 anak), dan Lubuk Baja (25 anak.) 3 (tiga) kecamatan ini hendaknya menjadi prioritas pembinaan, supervisi (Akademik & Manajerial) untuk menganalisis tentang mengapa angka mengulanginya cukup besar; dan kemudian menjadi prioritas dalam memberikan treatment dan pembinaan yang lebih solutif.



- 3.5) Kecamatan Lubuk Baja adalah kecamatan yang menjadi prioritas pengawasan, monev, dan bentuk pembinaan lainnya, karena kecamatan ini angka putus sekolah anak usia 13-15 tahun (SMP) lebih tinggi dari kecamatan lainnya.
- 3.6) Terdapat 6 (enam) kecamatan yang Hasil Nilai Ujian Nasional (HNUN) pada tingkat SMP di bawah rerata HNUN Kota Batam (4,80), yaitu Kecamatan Batu Ampar (2,42), Belakang Padang (2,60), Lubuk Baja (2,70), Galang (2,81) Batam Kota (3,95), dan Kecamatan Sekupang (4,45). 6 (enam) kecamatan ini hendaknya menjadi prioritas pembinaan, supervisi (Akademik & Manajerial) pada tahun berikutnya dapat memperoleh nilai di atas rerata Kota Batam.
- 3.7) Melakukan pemetaan ulang tentang jumlah lembaga pendidikan khusus, jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dengan jenis dan kategorinya.

## IV

### **PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILL)**

Pemerintah Kota Batam pasti akan menaruh perhatian khusus terhadap kesepakatan tingkat dunia atau internasional seperti AFTA (*Asean Free Trade Area*) tahun 2003 dan AFLA (*Asean Free Labour Area*), karena sejak tahun itu persaingan tenaga kerja akan semakin terbuka. Implikasi dan konsekuensinya bagi Pemerintahan Kota Batam tentunya harus mampu mempersiapkan masyarakatnya untuk mampu berkomparasi dan berkompetisi baik diantara masyarakat lokal, dengan masyarakat pendatang baik dari daerah lain di Indonesia maupun para pencari kerja dari luar negeri, terlebih Kota Batam menjadi gerbang internasional. Disadari bahwa masih banyak lulusan SLTP yang tidak mampu memanfaatkan ilmu yang diperolehnya untuk menghidupi diri terlebih untuk bersaing dengan orang lain. Menghadapi persoalan seperti ini ada hal yang perlu dikonsolidasikan agar pendidikan dapat membekali anak-anak/peserta didik memiliki kecakapan hidup; yaitu secara kreatif pendidikan/kursus/diklat mengintegrasikan dan mensinergikan berbagai mata pelajaran/mata latihan dengan kompetensi yang berhubungan penguasaan keterampilan kecakapan hidup (*Life Skill*), artinya pendidikan itu tidak hanya diorientasikan pada kemampuan akademik, akan tetapi juga diorientasi pada kemampuan vokasional, maka berikan bekal dengan "*learning how to learn sekaligus learning how to unlearn*"; jangan hanya belajar teori tetapi harus dengan mempraktikannya. Kecakapan hidup (dalam Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup (*Life Skill Education* (2002) Depdiknas Jakarta), adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk berani menghadapi problema hidup dan kehidupan dengan wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya. Kecakapan hidup (*life skill*) berdasarkan konsep yang digunakan WHO (1997), merupakan kemampuan berperilaku adaptif dan positif yang menjadikan seseorang mampu menguasai secara efektif kebutuhan dan tantangan hidup sehari-hari. Kecakapan hidup dapat dikelompokkan ke dalam empat, yaitu (1)

Kecakapan personal (*personal skill*) yang mencakup kecakapan mengenal diri (*self awareness*) dan kecakapan berpikir rasional (*thinking skill*), (2) Kecakapan sosial (*Social Skill*) atau (3) Kecakapan akademik (*academic skill*), dan (4) Kecakapan vokasional (*Vocational skill*). Dalam kehidupan sehari-hari kecakapan tersebut tidak berfungsi sendiri-sendiri melainkan terintegrasi dalam program pendidikan kejuruan (*vocational*) juga tidak dilakukan secara eksklusif untuk masing-masing kelompok

### 1. SMK Sebagai Lembaga Pendidikan Pengembang Kecakapan Hidup (*Life Skill*)

Mencermati data yang tersaji tahun 2007, jumlah SMK di Kota Batam berjumlah 17 buah, dan bila dilihat sebaran SMK menurut kecamatan, maka di Kecamatan Batam Kota memiliki jumlah terbanyak yaitu 4 buah, Batu Ampar 3 (tiga) buah, Baatu Aji 3 (tiga) buah), Bengkong 2 buah, sedangkan terdapat lima (5) kecamatan yang belum memiliki SMK yaitu di Kecamatan Belakang Padang, Galang, Bulang, Sekupang, dan Nongsa. Sedangkan di Kecamatan Sei Beduk 1 (satu) buah dan Sagulung 1 (satu) buah (lihat tabel 4.1)

Tabel 4.1  
Keadaan SMK di Kota Batam menurut Jenis Sekolah, Jumlah Siswa,  
dan Jumlah Guru dan Swasta Tahun 2007

Kecamatan	Keadaan		
	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Guru
Bengkong	2	740	44
Batu Ampar	3	1,288	76
Belakang Padang	0	0	0
Lubuk Baja	3	946	65
Galang	0	0	0
Bulang	0	0	0
Sekupang	0	0	0
Nongsa	0	0	0
Batam Kota	4	931	65
Sei Beduk	1	108	20
Sagulung	1	572	33
Batu Aji	3	1,038	87
<b>Batam</b>	<b>17</b>	<b>5,623</b>	<b>390</b>

Sumber Profil Pendidikan 2007

Selanjutnya bila dilihat dan banyaknya siswa seperti disajikan pada table 4.1 menunjukkan bahwa jumlah siswa tidak dikategorikan pada kelompok siswa laki-laki dan

perempuannamun disajikan secara keseluruhan. Jumlah siswa pada 17 SMK di Kota Batam secara keseluruhan sebanyak 5.623. Sajian data pada tabel 5.1 juga tidak dengan rinci menyajikan siswa per Satuan Pendidikan (SMK) tetapi menyajikannya jumlah siswa keseluruhan dari jumlah sekolah yang ada di tiap kecamatan. Apabila dideskripsikan, dari 2 (dua) SMK yang berada di Kecamatan Begkong, jumlah siswa sebanyak 740 siswa yang dilayani oleh 44 orang guru, sebanyak 1.288 siswa dari 3 SMK di Batu Amapar yang dilayani oleh 76 orang guru, 946 siswa dari 3 SMK di Lubuk Baja yang dilayani oleh 65 orang guru, 931 siswa pada 4 (empat) SMK di Kecamatan Batam Kota yang dilayani oleh 65 guru, 108 siswa pada 1 (satu) SMK di Kecamatan Sei Beduk yang dilayani oleh 20 orang guru, 572 siswa pada 1 SMK di Kecamatan Sagulung yang dilayani oleh 33 orang guru, dan 1.038 pada 3 SMK di Kecamatan Batu Aji dilayani oleh 87 orang guru. Jika dianalisis terdapat hal yang harus menjadi perhatian *pertama*, terdapat sejumlah anggota masyarakat yang akan kesulitan mengakses SMK terutama di lima (5) kecamatan yang belum memiliki SMK yaitu di Kecamatan Belakang Padang, Galang, Bulang, Sekupang, dan Nongsa. Anak-anak di daerah ini jika berminat studi lanjut ke SMK memerlukan upaya-upaya yang penuh juang, karena daya jangkau yang menjadikan daya beli masyarakat menjadi mahal. *Kedua*, sebaran jumlah guru memerlukan analisa dan pengembangan sistem penempatan yang berorientasi pada kebutuhan jumlah, kualifikasi dan kompetensi dalam rangka menjaga disvaritas mutu antar ekolah dan antar daerah serta menyeimbangkan rasio guru-siswa dan guru-mata pelajaran. *Ketiga*, harus menjaga jangan sampai terjadi pola pikir dikhotomi tentang sekolah swasta dan sekolah negeri, karena ini merugikan masyarakat. *Keempat*, mengembangkan jurusan, terkait dengan rumpun atau kelompok jurusan, program yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta minat anak (baca: melalui program "reengineering") adalah pilihan sangat bijak yang diambil oleh para pembina dan pengelola pendidikan.

Tabel 4.2  
Jumlah Sekolah, Siswa Baru, Siswa SMK dan Jumlah Guru

## Menurut Kecamatan di Kota Batam 2007

Kecamatan	Sekolah	Siswa Baru	Jumlah Siswa			Jumlah
	SMK	Tingkat I	L	P	Jumlah	Guru
Belakang Padang	0	0	0	0	0	0
Batu Ampar	3	1.060	732	556	1.288	76
Sekupang	0	0	0	0	0	0
Nongsa	0	0	0	0	0	0
Bulang	0	0	0	0	0	0
Lubuk Baja	3	408	351	595	946	65
Sei Beduk	1	108	79	29	108	20
Galang	0	0	0	0	0	0
Bengkong	2	482	361	379	740	44
Batam Kota	4	774	499	432	931	65
Sagulung	1	372	429	143	572	33
Batu Aji	3	646	653	385	1.038	87
Jumlah	17	3.850	3.104	2.519	5.623	390

Sumber Profil Pendidikan Kota Batam 2007

Upaya meningkatkan mutu lulusan SMK Di Kota Batam, SKPD yang bertanggungjawab untuk kepentingan ini (Dinas Pendidikan) telah melaksanakan pendidikan sistem ganda (PSG) atau "Dual System" yakni suatu sistem pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah dan melakukan kolaborasi, sinergitas, dan kolegialitas antara sekolah dunia industri melalui kerja sama secara legal dan saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan atau "simbiosis mutualitis" yakni bagi dunia industri merasa tidak terganggu proses manajemennya atau proses produksinya akan tetapi merasa terbantu oleh para siswa yang melakukan pemagangan/kerja praktek adan bagi siswa dan sekolah merasa diuntungkan karena dapat melakukan proses pembelajaran dan memberikan pengalaman nyata secara praktis bagi para siswa. PSG bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar secara nyata dan belajar melakukan penerapan ilmu yang telah didapatkan di sekolah yang cenderung kesulitan untuk menyeimbangkan bobot taksonomi dalam kegiatan pembelajaran karena terbatas oleh sarana/prasaran pembelajaran. Melalui program PSG diharapkan para siswa mendapatkan pengalaman kerja sebelum mereka memasuki dunia kerja yang sebenarnya.

## 2. Kursus Para Profesional, Kejuruan dan Pelatihan Keraja dan Pemagangan

Dalam rangka memberikan pendidikan kecakapan hidup (Life Skill) bagi masyarakat, sejumlah jumlah program pelatihan baik dalam bentuk kursus, latihan kerja maupun pemagangan yang didanai oleh APBD II Kota Batam maupun oleh APBN (Dana Dekonsentrasi) pada tahun 2007, masing-masing sebanyak 5 program di danai dari APBD Kota Batam, yaitu : a) Pelatihan anyaman Lidi diikuti oleh 15 orang peserta, b) Pelatihan Anyaman Pandan diikuti oleh 15 orang peserta, c) Pelatihan Motor Tempel/Diesel Masyarakat Hinterland diikuti oleh 30 orang peserta, d) Pelatihan Pembuatan Paving Blok diikuti oleh 20 orang peserta, dan e) Pelatihan pengecoran Logam diikuti oleh 15 orang peserta; secara keseluruhan dana APBD 2007 melalui SKPD Disnaker c.q BLK telah memberikan pendidikan kecakapan hidup (life skill) kepada 95 orang penduduk dari berbagai kelurahan dan kecamatan termasuk dari masyarakat hinterland. Sedang 5 program yang didanai oleh APBN terdiri atas : Kegiatan ini telah dilaksanakan oleh Disnaker Kota Batam seperti divisualisasikan di bawah ini: a) Pelatihan Las dasar diikuti oleh 160 orang peserta, b) Pelatihan Menjahit diikuti oleh 160 orang peserta, c) Pelatihan Tata Rias dan Spa diikuti oleh 160 orang peserta, d) Pelatihan Kewirausahaan diikuti oleh 20 orang peserta, dan e) Pelatihan Padat Karya Produktif diikuti oleh 44 orang peserta; secara keseluruhan dana APBN 2007 melalui SKPD Disnaker telah memberikan pendidikan kecakapan hidup (life skill) kepada 544 orang penduduk dari berbagai kelurahan dan kecamatan termasuk dari masyarakat hinterland.

Tabel 4.3

Pelatihan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Yang di Danai APBD II

Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta
Pelatihan Anyaman Lidi	15
Pelatihan Anyaman Pandan	15
Pelatihan Motor Tempel / Diesel masy. Hinterland	30
Pelatihan paving Blok	20
Pelatihan Pengecoran Logam	15
Jumlah	95

Sumber Profil Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

Tabel 4.4

Pelatihan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Yang di Danai APBN

Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta
Pelatihan Las Dasar	160
Pelatihan Menjahit	160
Pelatihan Tata Rias dan Spa	160
Pengembangan Kewirausahaan	20
Pelaksanaan Padat Karya Produktif	44
Jumlah	544

Sumber Profil Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

### **3. Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill) yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam**

Kegiatan Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill) yang dikembangkan dan dibina Dinas Pendidikan Bidang pendidikan nonformal meliputi Program Pendidikan/Kursus, Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM), Keaksaraan Fungsional (KF), Kelompok Belajar Usaha (KBU. Jumlah lembaga kursus periode tahun 2007 di kota Batam sebanyak 74 unit dengan instruktur 284 orang, lokasi kegiatan pendidikan dan keterampilan tersebar disetiap kecamatan yang didominasi oleh kecamatan Batam Kota dan yang tidak ada pada kecamatan Bulang dan Galang. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat berjumlah 36 lembaga. Temuan data ini memang sulit untuk dilakukan analisis karena sangat umum.

### **4. Gambaran Kesenjangan**

1. Masih sangat terbatasnya jumlah peserta yang dapat mengakses kegiatan pelatihan keterampilan, kursus, pemagangan yang diselenggarakan pemerintah daerah sehingga pemerataan penyebarannya sangat terbatas.

2. Masih perlu meningkatkan respons dan minat masyarakat terhadap kegiatan pelatihan keterampilan, kursus, pemagangan yang diadakan lembaga-lembaga kursus pelatihan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Beberapa yang tenggarai menjadi masalah diduga dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

- a) Jenis program pendidikan pelatihan/kursus/pemagangan yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah baik Disnaker maupun Disdik memiliki keterbatasan anggaran sehingga terbatas untuk memberikan peluang kepada masyarakat sasaran.

- b) Kesenambungan program dari mulai peserta diklat/kursus/pemagangan terdaftar dan mengikuti kegiatan program hingga mereka kembali ke daerahnya untuk menerapkan kemampuan yang diperoleh lepas dari kegiatan monitoring dan evaluasi serta pembinaan intensitas maupun kualitasnya.
- c) Abituren diklat/kursus/pemagangan tertentu yang seharusnya dibekali peralatan agar mereka segera dapat mengembangkan keterampilannya, namun yang diperoleh hanya selebar sertifikat.
- d) Sinergitas dan kolaborasi lembaga diklat/kursus/pemagangan dengan dunia usaha sebagai mitra dalam penjaminan mutu sumber daya manusia masih belum dapat dilaksanakan secara baik.
- e) Biaya mengikuti pendidikan kursus pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga swasta sering dipandang masih memerlukan biaya yang sangat tinggi.
- f) Pengelolaan lembaga kursus dan pelatihan yang dilakukan oleh beberapa lembaga pemerintah masih memerlukan persyaratan birokratif dan koordinasi yang agak rumit sehingga kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri seringkali mendapat kendala.
- g) Bebera SMK yang dikelola secara klasik relatif tidak dapat secara cepat menyesuaikan dengan perkembangan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang memerlukan tenaga terampil.
- h) Terbatasnya BLK yang ada di Kota Batam.

#### Hal-hal yang perlu direkomendasikan

- a) Diharapkan adanya program dan kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan program kecakapan hidup (life skill) bagi anak yang putus sekolah melalui kolaborasi dengan program keaksaraan fungsional.
- b) Meningkatkan intensitas pembinaan terhadap lembaga pendidikan latihan keterampilan / kursus/pemagangan yang ada di Kota Batam sehingga dapat memberikan layanan program yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.



- c) Memberikan ruang akses yang lebihh besar terhadap masyarakat miskin yang tidak dapat melakukan studi lanjut setelah pendidikan dasar.
- d) Menumbuhkan minat masyarakat terhadap pendidikan vokasional dan keterampilan yang di adakan lembaga-lembaga kursus / pelatihan terutama bagi penduduk usia produktif
- e) Perlunya peningkatkan program yang dikembangkan pemerintah daerah yang efektif dalam pengentasan kemiskinan.

## **5. Kebijakan PEMDA Kota Batam yang terkait dengan Program Life Skill**

Pemerintah Kota Batam dalam menyikapi pembangunan pendidikan formal maupun nonformal menganggap penting adanya langkah-langkah kebijakan serta terobosan melalui perencanaan program pembangunan pendidikan keterampilan dan pendidikan berbasis luas melalui pendidikan kecakapan hidup (*life skill*). Kebijakan pembangunan pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan berbasis luas atau pendidikan kecakapan hidup (*life skill*) antara lain terinci dalam RPJMD Kota batam Tahun 2006-2011 yang tertuang pada fokus I yaitu : Terwujudnya peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan

### **a) Kebijakan 2006 - 20011**

Secara umum kebijakan yang tertuang di dalam RPJMD Kota Batam adalah meningkatkan kualitas pendidikan, perluasan kesempatan belajar serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dan peserta didik.

### **b) Program Pembangunan , Indikator Keluaran , dan target sasaran**

Program pembangunan pendidikan kecakapan hidup (PKH) atau *life skill*, terkait dengan program penyelenggaraan pendidikan yang indikator keluaran serta target sarannya seperti berikut :

#### **1) Program yang telah dilaksanakan 2006 s/d 2011**

Pengejawantahan program pembangunan yang pendidikan kecakapan hidup (*life skill*) bagi anak, pemuda, dan masyarakat dengan sejumlah kemampuan vokasional maupun profesional dalam rangka memberikan bekal hidup dan

turut serta dalam pencapaian target Dakkar di Kota Batam, telah dilaksanakan berbagai program antara lain:

- 1.1) Telah dilaksanakan sejumlah jumlah program pelatihan baik dalam bentuk kursus, latihan kerja maupun pemaganagan yang didanai oleh APBD Kota Batam maupun oleh APBN (Dana Dekonsentrasi 2007), masing-masing sebanyak 5 program di danai dari APBD Kota Batam, yaitu : a) Pelatihan anyaman Lidi diikuti oleh 15 orang peserta, b) Pelatihan Anyaman Pandan diikuti oleh 15 orang peserta, c) Pelatihan Motor Tempel/Diesel Masyarakat Hinterland diikuti oleh 30 orang peserta, d) Pelatihan Pembuatan Paving Blok diikuti oleh 20 orag peserta, dan e) Pelatihan pengecoran Logam diikuti oleh 15 orang peserta; secara keseluruhan dana APBD 2007 melalui SKPD Disnaker c.q BLK telah memberikan pendidikan kecakapan hidup (life skill) kepada 95 orang penduduk dari berbagai kelurahan dan kecamatan termasuk dari masyarakat hinterland. Kegiatan ini seperti: a) Pelatihan Las dasar diikuti oleh 160 orang peserta, b) Pelatihan Menjahit diikuti oleh 160 orang peserta, c) Pelatihan Tata Rias dan Spa diikuti oleh 160 orang peserta, d) Pelatihan Kewirausahaan diikuti oleh 20 orag peserta, dan e) Pelatihan Padat Karya Produktif diikuti oleh 44 orang peserta; secara keseluruhan dana APBN 2007 melalui SKPD Disnaker telah memberikan pendidikan kecakapan hidup (life skill) kepada 544 orang penduduk dari berbagai kelurahan dan kecamatan termasuk dari masyarakat hinterland.
- 1.2) Telah dilaksanakan kegiatan Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill) oleh Dinas Pendidikan melalui Bidang pendidikan nonformal meliputi Program Pendidikan/Kursus, Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM), Keaksaraan Fungsional (KF), Kelompok Belajar Usaha (KBU) melalui 74 unit lembaga kursus dengan instruktur sebanyak 284 orang dan lokasi kegiatannya tersebar disetiap kecamatan.

- 1.3) Telah melaksanakan pendidikan sistem ganda (PSG) atau "Dual System" bagi siswa SMK yakni suatu sistem pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah dan melakukan kolaborasi, sinergitas, dan kolegialitas antara sekolah dunia industri melalui kerja sama secara legal melalui kegiatan pemagangan/kerja praktek untuk menyeimbangkan bobot taksonomi dalam kegiatan pembelajaran. Melalui program PSG ini diharapkan para siswa mendapatkan pengalaman kerja sebelum mereka memasuki dunia kerja yang sebenarnya.
- 1.4) Telah dilaksanakan pada setiap tingkatan, jenjang dan jenis, serta jalur pendidikan pendidikan dan pembelajaran yang berorientasi Pendidikan Berbasis Luas (BBE) atau Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) atau *Life Skill* sesuai dengan tuntutan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada masing tingkat, jenjang dan jenis pendidikan.

## **2) Program yang direncanakan 2006 s/d 2011**

- 2.1) Meningkatnya relevansi pendidikan dengan dunia kerja (baca : lihat fokus I Indikator Keluaran nomor 13)
- 2.2) Terlaksananya pembelajaran berbasis ICT (ICT Base Learning) dan pengembangan Jurusan ICT di 6 sekolah dan terlaksananya program reengineering di 5 SMK (baca : lihat fokus I Indikator Keluaran nomor 13)
- 2.3) Terlaksananya sistem manajemen mutu berstandar ISO di SMK (baca : lihat Fokus I Indikator Keluaran nomor 13)
- 2.4) Terlaksananya pelatihan Life Skill di SMA/SMK (baca : lihat Fokus I Indikator Keluaran nomor 13)
- 2.5) Terlaksananya program pengembangan SMA berwawasan kelautan di 4 sekolah (baca : lihat Fokus I Indikator Keluaran nomor 13)
- 2.6) Terlaksananya program life skill pemagangan bagi anak putus sekolah sebanyak 40 orang/tahun (baca : lihat Fokus I Indikator Keluaran nomor 20).

### 3). Peta Prioritas Sasaran Pembangunan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) atau Life Skill

- 3.1) Untuk memberikan pemerataan dan kedekatan layanan bagi pengembangan pendidikan kecsakapan hidup (PKH) atau life skill melalui jalur pendidikan formal (SMK), di Kota Batam masih terdapat 5 (lima) kecamatan yang kiranya dapat dikaji lebih lanjut dan dijadikan prioritas pembangunan SMK (bca: mungkin SMK Kecil, SMK Multi Program, SMK Satu Atap dengan SMP, dsb), yaitu Kecamatan Belakang Padang, Galang, Bulang, Sekupang, dan Nongsa.
- 3.2) Untuk memberikan pemerataan dan kedekatan layanan bagi pengembangan pendidikan kecsakapan hidup (PKH) atau life skill melalui jalur pendidikan Nonformal (PNF/PLS), di **kecamatan perkotaan** dapat dikembangkan Kursus Para Profesional (KPP) seperti Modeling, Tata Rias, Perawatan Tubuh, Tata Laksana Pakaian, Tata Boga, Manajemen suatu kegiatan (EO), MC, Pemanfaatan barang limbah, atau jenis keterampilan lainnya. Sedangkan di kecamatan yang wilayahnya terkatagori **hinterland**, pelatihan keterampilan vokasonal , baik melalui kursus, pemagangan, dsb adalah hal solutif yang dapat dikembangkan baik oleh Disnaker , Dinas Pendidikan, lembaga sosial masyarakat (LSM) maupun kelompok masyarakat lainnya.
- 3.3) Lakukan Penguatan terhadap pendidikan dan pembelajaran di setiap tingkat Satuan Pendidikan tentang pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) baik yang terkait dengan Mata Pelajaran Keterampilan ataupun Pengembangan Diri. Selain itu khusus untuk SMK lebih menggiatkan diri untuk terus melakukan harmonisasi dengan pihak industri melalui program pendidikan sistem ganda (PSG) atau Pendidikan "Dual System".

## V PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN BERKELANJUTAN

Tingkat keniraksaraan penduduk Indonesia cukup tinggi dan temuan data di Kota Batam kalaupun tersamarkan dalam sajian datanya, angka buta aksara (termasuk yang absolut) dan yang rentan kembali menjadi buta aksara karena putus sekolah SD/MI angkanya di luar yang diperkirakan. Jika menganalisis data yang dapat diperoleh (baca: pengulangan deskripsi dari bagian sebelumnya) , terdapat hal yang sangat rentan untuk menjadi pertanyaan masyarakat; apakah di Kota Batam memang telah bebas buta aksara atau hanya dalam jumlah yang sangat kecil seperti yang tersaji pada tabel 5.1 kolom ke 4 ?, atau memang terjadi kekeliruan penafsiran sehingga terkesan bahwa Kota Batam (baca: sebagai contoh pada tahun 2005) tidak ada yang buta aksara; pada hal pada kolom 3-nya tersaji data 71.294 orang penduduk yang tidak/belum pernah sekolah, apakah ini tidak buta aksara ?. Ironis memang, sajian data yang diperoleh dari profil pendidikan Kota Batam, nampaknya memerlukan pencermatan lebih lanjut sehingga tidak menyesatkan bagi para pelaku pendidikan di Kota Batam manakala akan menyusun rencana kerja pembangunan pendidikan. Tahun 2006 data buta aksara di Kota Batam sebesar 721 orang, namun penduduk yang tidak/belum pernah sekolah trendnya ditemukan menjadi menurun yaitu menjadi sebesar 52.140 orang penduduk; artinya dalam kurun waktu satu tahun data ini missing (hilang) sebesar 19.154 orang. Pertanyaannya adalah apakah 19.154 orang penduduk itu bersekolah atau mengikuti program pendidikan kesetaraan atau keaksaraan melalui jalur pendidikan nonformal atau bagaimana, namun itulah data yang ditemukan. Tahun 2007 trendnya menjadi naik, jumlah penduduk buta aksara seperti tersaji pada kolom 4 tabel 5.1 jumlah menjadi 757, artinya naik sejumlah 36 orang. Namun yang sangat mengejutkan adalah kenaikan data penduduk yang tidak/belum pernah sekolah angkanya menjadi naik secara spektakuler yaitu menjadi sebesar 96.940 orang penduduk, artinya trendnya naik tajam baik dari tahun 2005 maupun tahun 2006. Selain itu ditemukan data (Data Keadaan Penduduk Kota Batam Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2006), terdapat angka yang cukup besar yaitu 7.725

orang anak usia 7-12 tahun (usia SD) yang tidak menamatkan SD/MI-nya; manakala mereka drop out pada kelas rendah, artinya sangat dimungkinkan mereka buta aksara kembali. Pluktuasi , konsistensi, dan tingkat akurasi data yang disajikan sangat diawatirkan akan menjadi kendala dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan penyusunan dan pengembangan rencana strategis dan operasional SKPD (Dinas Pendidikan Kota Batam) maupun pengambilan kebijakan pada tingkat Pemerintah Daerah Kota Batam.

Tabel 5.1  
Keadaan Umum Pendidikan Kota Batam

Tahun	Jumlah Penduduk	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Buta Huruf
2005	596,515	71,294	721
2006	702,239	52,140	721
2007	720,844	96,940	757

Sumber Profil Pendidikan Batam. 2005, 2006 dan 2007

Pemberantasan buta aksara merupakan salah satu prioritas program yang harus dilaksanakan, karena untuk mengukur keberhasilan pembangunan pada sektor pendidikan buta aksara merupakan sub sasaran yang paling penting dan sangat vital dalam pembangunan sumber daya manusia. Manakala masih besar angka penduduk yang buta aksara akan menjadi indikasi bahwa pembangunan pada sektor pendidikan tidak berhasil. Disadari bahwa bahwa kebodohan, kemiskinan merupakan musuh terbesar dalam setiap upaya pembangunan suatu bangsa, paradigmanya dapat dirumuskan bahwa kebodohan dapat menjadi sumber kemiskinan, dan sebaliknya kemiskinan dapat menjadi sumber kebodohan. Oleh karenanya salah satu aspek penentuan tingkat pendidikan suatu bangsa salah satunya diukur dari tingkat keaksaraan penduduk. Selain itu, tingkat keaksaraan juga merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan nilai indek pembangunan manusia (Human Depelovment Index), walaupun Kota Batam jika dilihat dari data yang

diperoleh merupakan daerah yang Indeks Pembangunan Manusia tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau. Namun demikian jika analisis ini harus menggambarkan kinerja, maka kinerja tahun 2006 menjadi kinerja terbaik dalam rangka menurunkan angka buta aksara (lihat : Tabel 5.1) karena dapat menurunkan angka sebesar 19.155 orang penduduk yaitu dari 71.295 orang penduduk yang belum/tidak pernah sekolah pada tahun 2005 menjadi 52.140 orang penduduk, namun pada kolom berikutnya (Tabel 5.1) tahun 2005 sebesar 0 (Nol) orang penduduk menjadi sebesar 721 pada tahun 2006; dan pada tahun 2007 trend-nya menjadi naik lebih besar lagi menjadi 96.940 orang penduduk yang belum/tidak pernah sekolah dan pada kolom berikutnya tersaji angka sebesar 757 orang penduduk buta aksara. Angka-angka ini akan sulit dipercaya dan tentunya sulit dianalisis, tetapi itu fakta yang ada.

### **1. Gambaran Kesempatan Memperoleh Pendidikan melalui Jalur Pendidikan Nonformal**

Pada bagian sebelumnya kegiatan analisis ini mendapat kesulitan memperoleh data tentang jumlah angka Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang terlayani atau yang dapat mengakses layanan pendidikan termasuk jumlah sekolah dan gurunya, kemudian kegiatan analisis ini juga mendapat kesulitan memperoleh data tentang jumlah penduduk buta aksara yang terinci dan akurat.

Bagian ini sepertinya menjadi pengulangan bahwa data tentang layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformalpun tidak berbeda, karena data tidak terungkap.

Pendidikan Nonformal yang dibina oleh Dinas Pendidikan Bidang pendidikan nonformal meliputi Program Pendidikan/Kursus, Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM), Keaksaraan Fungsional (KF), Kelompok Belajar Usaha (KBU. Jumlah lembaga kursus periode tahun 2007 di kota Batam sebanyak 74 unit dengan instruktur 284 orang, lokasi kegiatan pendidikan dan keterampilan tersebar di setiap kecamatan yang didominasi oleh kecamatan Batam Kota dan yang tidak ada pada kecamatan Bulang dan Galang. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat berjumlah 36 lembaga. Temuan data ini memang sulit untuk dilakukan analisis karena sangat umum.

## 2. Gambaran Kesenjangan

Target tuntas Wajib Belajar Sembilan Tahun bagi penduduk usia pendidikan dasar yaitu usia 7-12 dan usia 13-15 tahun pada tahun 2009 seperti yang dicanang dalam gerakan PWB/PBA pada Permendiknas Nomor 35 Tahun 2006; dan pemberantasan buta aksara 15 tahun ke atas terutama penduduk perempuan diharapkan dapat dikurangi hingga 50%, nampaknya tidak mudah, karena banyak faktor yang mempengaruhi. *Pertama*, angka penduduk miskin Kota Batam menurut data Keadaan Demografi Tahun 2007, menunjukkan angka sebesar 24.700 orang. Angka kemiskinan di perkotaan berjumlah 3.371 orang, dan penduduk miskin perdesaan sebesar 21.329 orang penduduk. *Kedua*, faktor geografis dan kesulitan daya jangkau ke tempat layanan pendidikan bagi beberapa kelurahan pada kecamatan tertentu menjadi kendala bagi kemudahan aksesibilitas masyarakat serta besaran angka melanjutkan ke jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK/ setara, gambarannya dapat dilihat pada tabel 5.2 dan 5.3 di bawah ini :

Tabel 5.2

Hubungan Antara Angka Melanjutkan (AM) Dengan keadaan sekolah dan Daerah  
Kota Batam 2007

Kecamatan	Angka Melanjutkan		Rasio		Tk. Kesulitan ke SMP/ MTs			Tk. Kesulitan ke SM/MA			Sektor Unggulan		
	SMP/MTs	SM/MA	SD/SMP	SMP/SM	M	S	SS	M	S	SS	I	II	III
Belakang Padang	83	115	2	2	100	29	0	50	50	0	1	6	10
Batu Ampar	127	356	2	1	100	0	0	100	0	0	3	6	10
Sekupang	110	113	2	3	100	0	0	100	0	0	4	3	2
Nongsa	99	63	3	4	100	0	0	100	0	0	9	1	3
Bulang	94	19	2	3	83	17	0	50	50	0	1	9	10
Lubuk Baja	58	144	2	1	100	0	0	100	0	0	6	8	9
Sei Beduk	98	67	5	2	100	0	0	100	0	0	3	6	10
Galang	82	73	4	2	86	14	0	67	33	0	1	9	10
Bengkong	75	231	3	1	111	0	0	100	0	0	9	5	10
Batam Kota	193	205	2	1	100	0	0	100	0	0	8	3	8
Sagulung	79	138	5	2	100	0	0	100	0	0	3	5	10
Batu Aji	130	235	3	1	100	0	0	100	0	0	5	3	9
Rata-rata	102	146	3	2	98	5	0	89	11	0	4	5	8

Sumber: Profil Pendidikan Kota Batam 2007



**Tabel 5.3**  
**Data Keadaan Penduduk Kota Batam Menurut Tingkat Pendidikan**  
**Tahun 2006**

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Usia Sekolah					Tingkat Pendidikan									Buta Huruf
		0-4 Thn	5-6 Thn	7-12 Thn	13-15 Thn	16-18 Thn	Belum Sekolah	Tdk Tmt SD	Tmt SD (Tdk lanjut)	Tdkk Tmt SMP/MTs	Tmtt SMP/M Ts (Tdk lanjut)	Tdk Tmt SMA/Sdrajat	Tmt SMA/Se derajat (Tdk lanjut)	Sarjana (D1,D2, D3,S1, S2,S3)		
Sekupang	98,783	2,825	3,435	10,076	2,776	5,196	5,038	1,087	405	474	573	178	30,405	6,421	494	
Batu Aji	60,206	1,361	2,118	6,141	1,692	3,167	3,071	662	247	289	349	108	18,531	3,913	301	
Sagulung	107,920	3,302	3,981	11,008	3,033	5,677	5,504	1,187	442	518	626	194	49,406	5,180	540	
Sei Beduk	71,350	2,326	2,137	7,278	2,005	3,753	3,639	785	293	342	414	128	21,962	4,638	357	
Batam Kota	76,994	3,280	5,002	7,853	2,164	4,050	3,927	847	316	370	447	139	27,548	5,775	385	
Nongsa	42,822	1,824	2,389	4,368	1,203	2,252	2,184	471	176	206	248	77	13,181	3,212	300	
Lubuk Baja	73,882	3,147	1,836	7,536	2,076	3,886	3,768	813	303	355	429	133	44,905	7,758	369	
Batu Ampar	40,969	1,745	2,372	4,179	1,151	2,155	2,089	451	168	197	238	74	23,262	3,482	205	
Bengkong	87,259	3,717	4,958	8,900	2,452	4,590	4,450	960	358	419	593	157	53,036	7,417	436	
Galang	13,488	575	642	1,376	379	709	688	148	55	65	78	24	1,454	202	337	
Bulang	8,766	110	893	982	980	461	477	96	36	42	77	16	1,383	131	219	
Blk Padang	19,800	843	746	2,020	556	1,041	1,010	218	81	95	115	36	8,074	891	297	
Jumlah	702,239	25,055	30,509	71,717	20,467	36,937	35,845	7,225	2,880	3,372	4,187	1,264	293,147	49,020	4,240	

Sumber: Profil Pendidikan Kota Batam 2006

Berbagai masalah yang dihadapi dalam program keaksaraan dan berkelanjutan seperti : besarnya angka buta aksara (termasuk dengan jumlah penduduk yang belum/tidak pernah sekolah), perkembangan dan penurunan Angka Buta Aksara Usia 15-24 Tahun, perkembangan Penurunan Angka Buta Aksara Usia 15 Tahun ke Atas, Pemberantasan Buta Aksara, memperluas ruang dan peluang akses terhadap pendidikan Jalur Pendidikan Nonformal. Uraian di atas adalah gambaran secara umum atas dasar data yang diperoleh; apabila dikaji secara teknis, sebagai berikut :

- a). Tingkat penyelesaian pendidikan dasar (terutama SLTP) masih terkendala oleh kemampuan daya jangkau ke tempat layanan, persepsi tentang daya beli, minat masyarakat terhadap pendidikan sehingga terkesan memarjinal diri dan bukan dimarjinalkan.
- b) Pendirian dan pengembangan lembaga pendidikan nonformal yang dikelola oleh masyarakat memerlukan pembinaan dan peningkatan kapasitasny.

- c) Tenaga pengajar (Tutor, pamong) bukan saja belum memenuhi standar ideal, namun lebih banyak mereka yang sukarela mengabdikan diri untuk membantu masyarakatnya, terlepas dari apa dan bagaimana kualifikasi dan kompetensinya, sehingga mungkin saja mempengaruhi kualitas proses maupun hasil pembelajarannya.
- d) Pemberantasan buta aksara akan selalu mendapat kendala, karena keterbatasan tenaga dan biaya maupun sarana yang diperlukan untuk kepentingan itu.
- e) Tutor terlatih tentang dalam bidang keaksaraan fungsional, metode pembelajaran orang dewasa (andragogy), bagaimana menggali minat dan kebutuhan warga belajar, bagaimana merencanakan program pembelajaran, tehnik memotivasi warga belajar, dan bagaimana mengevaluasi program masih perlu ditingkatkan agar pembinaan, pembimbingan warga belajar dapat dilakukan dengan baik.
- f) Insentif bagi Tutor belum memadai, baik yang berupa material maupun imaterial masih sangat minim dan perlu perhatian lebih bijak.
- g) Buta huruf sangat rentan sekali terhadap kemiskinan. Faktor kemiskinan inilah yang mengakibatkan warga belajar sulit meluangkan waktunya untuk mengikuti program belajar.
- h) Menjaga ketahanan anak untuk tetap di sekolah dan jangan menjadi putus sekolah terutama pada kelas rendah harus terus diupayakan secara terprogram dan sistematis, karena mereka rentan menjadi buta aksara kembali.

Hal yang dapat direkomendasikan adalah :

- a) Besaran angka buta aksara seperti dipaparkan datanya di atas akan menjadi kendala besar terhadap pembangunan sumber daya manusia Kota Batam, manakala langkah-langkah solutif tidak segera dilakukan. Oleh karena itu Tim PUS Kota Batam akan menjadi alternatif untuk melakukan kolaborasi dan sinergitas dalam melakukan kajian operasional/teknis pemberantasan buta aksara.
- b) Kesejahteraan tutor/pamong lebih di diperhatikan baik besaran maupun ketepatan waktunya, karena ini akan sangat berpengaruh kuantitas maupun kualitas layanan bagi warga belajar.

- c) Pembedayaan peran pemerintahan tingkat kelurahan, PKK, sampai pada jajaran pemerintahan yang lebih rendah, tokoh masyarakat, karang taruna harus ditingkatkan peran sertanya.
- d) Pengembangan Taman Bacaan Sarana dan prasarana modul dan alat peraga, kelompok belajar, pemebelajaran di Majelis Ta'lim, harus dikembangkan secara bersama-sama.
- e) Perlu segera disosialisasikan PPRI NO. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, dan PWB/PBA (Permendiknas 35 Tahun 2006) secara intensif kepada masyarakat secara menyeluruh dan sasaran yang tepat, baik melalui lembaga pemerintahan, lembaga sosial masyarakat, perorangan, media cetak MAUPUN elektronik.
- f) Perlu disusun strategi, perencanaan serta manajemen pembinaan yang baik dan membentuk "Mitra PNF" untuk bekerja bersama-sama dan menambah aksarawan baru.
  
- g) Meningkatkan aksesibilitas terhadap pendidikan bagi perempuan yang sudah berkeluarga, pendidikan keaksaraan hendaknya tidak diberikan secara eksklusif, namun dikembangkan secara inklusif dan disesuaikan dengan kegiatan keseharian. Strategi ini akan cukup signifikan terbukti berdampak pada perempuan, karena waktu perempuan kelompok umur tersebut tersita untuk pekerjaan rumah tangga. Untuk ibu-ibu, terutama di pedesaan, pendidikan keaksaraan hendaknya. Misalnya, muatan pendidikan keaksaraan dintegrasikan dengan peran tugas ibu-ibu dalam mengurus anaknya, misalnya kegiatan BKB dan Posyandu.
- h). Untuk memenuhi target Dakar maka bagi aksarawan baru terus dibina agar tidak menjadi buta huruf kembali. Bagi mereka yang mampu terutama perempuan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan dasar yang setara yaitu melalui Paket A dan B. Bagi mereka yang telah menamatkan program pendidikan dasar yang setara, terus didorong untuk melanjutkan ke pendidikan berkelanjutan. Pendidikan berkelanjutan dapat berbentuk program yaitu program pasca keaksaraan, program pendidikan mata pencaharian, program berorientasi masa

depan, program peningkatan kecakapan hidup, program minat perorangan (hobby) dan program kesetaraan, dsb.

### **3. Kebijakan Pemda Kota Batam yang Terkait dengan Keaksaraan**

Pemerintah Kota Batam dalam menyikapi pembangunan pendidikan nonformal terutama menyangkut keaksaraan dan pendidikan berkelanjutan menganggap penting untuk segera merencanakan kebijakan strategis dan mengambil langkah-langkah serta terobosan melalui perencanaan program terkait dengan percepatan pemberantasan buta aksara dan meningkatkan angka penurunan angka keniraksaraan terutama bagi perempuan 15 tahun ke atas. Kebijakan pembangunan pendidikan di Kota Batam yang tertuang dalam RPJM dan Programn Pembangunan Daerah ( Propeda) sebagai berikut :

#### **a) Kebijakan 2006 - 20011**

Secara umum kebijakan yang tertuang di dalam RPJMD Kota Batam terkait dengan percepatan pemberantasan buta aksara dan meningkatkan angka penurunan angka keniraksaraan terutama bagi perempuan 15 tahun ke atas, dibijaki seperti yang tertuang dalam Misi ke IV dan dalam Fokus I RPJMD Kota Batam 2006-2011; yaitu Terwujudnya peningkatan kualitas pemerataan pelayanan pendidikan.

#### **b) Program Pembangunan , Indikator Keluaran , dan target sasaran**

Program pembangunan pendidikan kecakapan hidup (PKH) atau *life skill*, terkait dengan program penyelenggaraan pendidikan yang indikator keluaran serta target sarannya seperti berikut :

##### **1) Program yang telah dilaksanakan 2006 s/d 2011**

Pengejawantahan program pembangunan pendidikan keaksaraan adan pendidikan berkelanjutan melalui percepatan pemberantasan buta aksara dan meningkatkan jumlah aksarawan baru terutama perempuan dan turut serta dalam pencapaian target Dakkar yakni menurunnya angka keniraksaraan

sebesar 50% pada tahun 2015 di Kota Batam. Menyikapi permasalahan ini telah dilaksanakan berbagai program antara lain:

- 1.1) Telah dilaksanakan pemetaan awal mengenai jumlah penduduk buta aksara dan analisis awal tentang jumlah penduduk yang belum/tidak pernah sekolah.
- 1.2) Telah dilaksanakan upaya menekan angka putus sekolah (SD/MI) dan mendorong anak kembali ke sekolah atau pendidikan yang sederajat pada jalur pendidikan nonformal.
- 1.3) Telah dilaksanakan upaya kerjasama dengan kelompok masyarakat pengelola kelompok belajar atau PKBM dalam rangka percepatan pemberantasan buta aksara dan peningkatan angka aksarawan baru (terutama perempuan) menjelang tahun 2015.
- 1.4) Telah dilaksanakan program keaksaraan fungsional melalui Program Keaksaraan yang bertujuan memberantas buta aksara latin, arab, buta bahasa Indonesia dan melalui Program Kesetaraan yang mencakup pendidikan dasar dan menengah yang terdiri atas Paket A setara SD, Paket B setara SLTP dan Paket C setara SLTA, yang berisi serangkaian pengetahuan yang perlu dikuasai oleh orang dewasa untuk meningkatkan taraf hidupnya.
- 1.5) Telah melaksanakan pelatihan tutor, pamong, serta para pengelola PKBM dalam meningkatkan kemampuan teknis pembelajaran dan manajemen kelembagaan.

## **2) Program yang direncanakan 2006 s/d 2011**

- 2.1) Penurunan angka penduduk yang buta huruf dan angka putus sekolah (baca : lihat fokus I Indikator Keluaran nomor 21)
- 2.2) Terlaksananya kelompok belajar melalui Program Paket A untuk 500 orang (baca : lihat fokus I Indikator Keluaran nomor 21)
- 2.3) Tersedianya Modul untuk Program Paket A (baca : lihat Fokus I Indikator Keluaran nomor 21)
- 2.4) Terlaksananya Pembinaan 35 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (baca : lihat Fokus I Indikator Keluaran nomor 24)

2.5) Terlaksananya Pembinaan 35 Kelompok Belajar Usaha (baca : lihat Fokus I Indikator Keluaran nomor 25)

### **3) Peta Prioritas Sasaran Pembangunan Pendidikan Keaksaraan dan Berkelanjutan**

- 3.1) Pemetaan ulang tentang besarnya jumlah penduduk buta aksara (termasuk dengan jumlah penduduk yang belum/tidak pernah sekolah) lengkap dengan peta laki-laki, perempuan, usia, dan zona dimana penduduk tersebut berdomisili,
- 3.2) Mengembangkan RAD teknis dan operasional untuk percepatan pemberantasan buta aksara dan mengurangi angka keniraksaraan penduduk terutama perempuan 15 tahun ke atas.
- 3.3) Membentuk organisasi Mitra PNF/PLS sebagai organisasi yang dapat diajak kolaborasi, sinergitas, dan kolegalitas dalam pendataan, percepatan pemberantasan buta aksara,
- 3.4) Memberikan pembinaan kepada setiap Kepala Cabang Dinas/UPT dan Kepala Satuan Pendidikan (SD) untuk menjaga ketahanan anak di sekolah (terutama anak SD kelas rendah) untuk dapat tetap bersekolah atau tidak putus sekolah, karena anak-anak seusia ini rentan buta aksara kembali,
- 3.5) Membina dan mengembangkan wadah belajar bagi masyarakat melalui Program penguatan Kelembagaan PKBM,
- 3.6). Membina dan mengembangkan wadah belajar bagi masyarakat melalui Program penguatan Kelembagaan PKBM khususnya penyelenggara Program Paket A dan B.
- 3.7) Pembinaan dan peningkatan kemampuan tutor, pamong Keaksaraan Fungsional (KF) dalam rangka percepatan pemberantasan buta aksara dan kemampuan untuk mendorong masyarakat melaksanakan studi lanjut,
- 3.8) Melakukan Sosialisasi, kampanye tentang wajib belajar pendidikan dasar dan pemberantasan buta aksara bagi seluruh lapisan masyarakat.

## IV

### PENDIDIKAN BERKEADILAN GENDER

Kaum perempuan berjuang untuk tidak dimarjinalkan, berjuang untuk kesejajaran dengan kaum laki-laki, berjuang untuk menghindarkan dari deskriminasi, *domestik violence*, *trafiking*; sampai ke berbagai permasalahan ekonomi dan sosial lainnya, seperti bagaimana tingkat aksesibilitas kaum perempuan terhadap pendidikan. Hal terakhir ini menjadi komitmen dunia internasional melalui program Pendidikan Untuk Semua (PUS) yang disepakati di Dakar. Permasalahan Gender tersebut menjadi salah satu target Dakar, yaitu untuk menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak, khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan yang sulit dan mereka yang termasuk etnik minoritas, mempunyai akses dan dapat menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas yang baik dan bermutu, yang difokuskan pada:

*Pertama*, Mencapai perbaikan 50% pada tingkat keniraksaraan orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan, dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan pendidikan berkelanjutan bagi semua orang dewasa. *Kedua*, penghapusan kesenjangan gender pada pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005, 2006, dan 2007, sehingga mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan pada tahun 2015 dengan fokus pada kepastian sepenuhnya bagi anak perempuan terhadap aksesibilitas memperoleh pendidikan dasar yang bermutu.

#### 1. Gambaran Situasi dan Kondisi

Untuk kepentingan analisis ini, kesenjangan gender bidang pendidikan dapat dilihat dari tiga aspek sebagai indikator pengukuran yaitu aksesibilitas, manajemen serta mutu dan relevansi. Kesenjangan akses dalam pendidikan akan digunakan indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Keaksaraan. Secara lebih rinci akan digunakan Indeks Paritas atau keseimbangan (Parity Indeks) dan disparitas terhadap angka partisipasi jenjang pra sekolah, Sekolah Dasar (SD),

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Menengah (SM) serta presentasi penduduk buta aksara. Sedangkan aspek mutu dan relevansi akan dianalisis dengan menggunakan data kualitatif.

Pendidikan Perempuan akan sangat berpengaruh terhadap produktifitas, meningkatkan kesempatan kerja dan tingkat pendapatannya, menurunkan angka kematian bayi dan anak, meningkatkan harapan hidup, mengurangi rata-rata angka kematian ibu, meningkatkan kesehatan keluarga, dan memberikan perempuan kemampuan mengelola secara efisien sumber daya keluarga maupun sumber daya alam pada umumnya.

Harapan di atas, untuk menjadikan kaum perempuan lebih baik yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan diri, pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) akan menjadi hal solutif, karena mereka akan memiliki sejumlah keterampilan yang dapat dijadikan bekal dalam menghadapi tantangan hidup di masyarakat. Untuk mengukur kesenjangan Gender diberlakukan perhitungan Indeks Pembangunan Gender (IPJ) dengan tujuan mengukur tingkat pencapaian dengan memperhitungkan ketimpangan gender.

IPJ dihitung dengan menggunakan variabel yang sama dengan IPM, yang telah disesuaikan dengan tingkat pencapaian rata-rata antara laki-laki dan perempuan.

Akses terhadap pendidikan bagi perempuan di Kota Batam menunjukkan sudah cukup baik, dan tidak menunjukkan data gap yang terlalu besar walaupun angka partisipasi anak laki-laki tetap lebih besar pada setiap jenjang pendidikan. Gambaran datanya dideskripsikan sebagai berikut : **1)** APK Pendidikan tingkat Prasekolah (TK) menunjukkan peserta didik laki-laki sebesar 54,02% dan peserta didik **perempuan** sebesar 48,03%, jadi angka gap hanya sebesar **5,99%** yang menunjukkan bahwa peserta didik perempuan lebih kecil dari peserta didik laki-laki. **2)** APK Pendidikan tingkat Sekolah Dasar menunjukkan peserta didik laki-laki sebesar 109,02% dan peserta didik **perempuan** sebesar 96,10%, jadi angka gapnya hanya sebesar **12,92%** yang menunjukkan bahwa peserta didik perempuan lebih kecil dari peserta didik laki-laki. **3)** APK Pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) menunjukkan peserta didik laki-laki sebesar 91,68% dan peserta didik **perempuan** sebesar 86,44%,



jadi angka gapnya hanya sebesar **5,24%** yang menunjukkan bahwa peserta didik perempuan lebih kecil dari peserta didik laki-laki. 4) APK Pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) menunjukkan peserta didik laki-laki sebesar 62,54% dan peserta didik **perempuan** sebesar 59,31%, jadi angka gapnya hanya sebesar **3,23%** yang menunjukkan bahwa peserta didik perempuan lebih kecil dari peserta didik laki-laki.

Jika mencermati angka gap di atas baik pada Pendidikan Prasekolah (TK), Sekolah dasar, SMP, maupun SMA; secara umum tidak menunjukkan angka gap sangat besar, dan hanya pada tingkat Sekolah dasar aksesibilitas perempuan memiliki gap 12,92%, sedangkan pada jenjang lainnya sangat tidak signifikan.

Tabel 6.1

Jumlah Penduduk Seluruh Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Kota Batam

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan
Bengkong	69,152	33,517	35,635
Batu Ampar	44,535	23,097	21,438
Belakang Padang	20,046	10,181	9,865
Lubuk Baja	74,226	38,047	36,179
Galang	14,280	7,470	6,810
Bulang	9,481	4,797	4,684
Sekupang	74,572	37,121	37,451
Nongsa	42,048	23,586	18,422
Batam Kota	105,388	53,127	52,261
Sei Beduk	69,811	26,208	43,603
Sagulung	120,142	62,082	58,060
Batu Aji	80,654	36,459	44,195
Jumlah	724,335	355,692	368,603

Sumber: Profil Dinkes 2007

**Tabel 6.2**  
**Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jender Kota Batam 2007**

Kecamatan	Tingkat TK		Tingkat SD		Tingkat SMP		Tingkat SM	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Belakang padang	28.64	22.58	119.37	94.96	90.20	82.20	59.59	65.72
Batuampar	36.15	34.85	83.28	136.17	83.98	96.46	101.63	54.94
Sekupang	67.85	67.73	120.54	89.44	86.70	91.01	49.27	68.98
Nongsa	40.57	47.78	128.41	84.43	94.36	79.12	32.77	21.13
Bulang	7.29	9.09	114.26	90.28	136.67	61.15	40.18	56.81
Lubuk Baja	59.56	59.66	155.10	77.82	102.40	91.15	67.44	87.04
Sei Beduk	57.34	26.19	97.20	105.73	82.55	82.91	16.80	7.68
Galang	-	-	109.00	96.11	64.81	55.56	31.93	38.65
Bengkong	58.85	51,87	98.90	109.32	99.18	84.72	71.19	98.94
Batam Kota	91.48	85.62	107.75	95.58	92.53	91.16	72.20	60.49
Sagulung	38.68	39.34	101.21	99.37	88.71	90.36	67.74	69.17
Batu Aji	55.95	43.78	96.46	106.13	93.37	87.44	62.59	40.53
Rata-rata	54.02	48.03	109.02	96.10	91.68	86.44	62.54	59.31

Sumber: Profil Pendidikan Kota Batam 2007

## 2. Akses Terhadap Pendidikan

Tingkat ketidaksetaraan gender dalam pendidikan adalah ditunjukkan oleh tingkat aksesibilitas anak perempuan terhadap setiap bentuk layanan pendidikan. Analisis situasi dan kondisi Pendidikan Untuk semua mencoba melihat ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dengan menggunakan indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang mencerminkan presentase penduduk kelompok usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada jalur pendidikan formal. Tabel 7.3 memberikan gambaran keadaan Angka Partisipasi Sekolah di Kota Batam tahun 2005/2006/2007. Berdasarkan gambaran APS pada tabel 7.3 dapat kita lihat bahwa kesenjangan pendidikan untuk setiap kelompok umur tidak menunjukkan angka yang signifikan. Kesejangan pendidikan pada tahun 2005 untuk kelompok 7-12 tahun, gambaran datanya menunjukkan angka aksesibilitas anak perempuan sebesar 31.052 anak, lebih besar dari anak laki-laki yang hanya sebesar 28.716 anak, artinya kalau melihat angka tersebut, ketimpangan atau angka gap sebesar 2.336 anak yang menunjukkan bahwa anak perempuan jumlahnya lebih besar yang mengakses pendidikan setingkat SD. Pada

tahun 2006 (data tidak ditemukan). Pada tahun 2007 untuk kelompok usia 7-12 tahun, gambaran datanya menunjukkan angka aksesibilitas anak perempuan sebesar 37.885 anak, lebih besar dari anak laki-laki yang hanya sebesar 35.028 anak, artinya kalau melihat angka tersebut, ketimpangan atau angka gap sebesar 2.857 anak yang menunjukkan bahwa anak perempuan jumlahnya lebih besar yang mengakses pendidikan setingkat SD.

Kesejangan pendidikan pada tahun 2005 untuk kelompok 13-15 tahun, gambaran datanya menunjukkan angka aksesibilitas anak perempuan sebesar 6.776 anak, lebih kecil dari anak laki-laki yaitu sebesar 8.739 anak, artinya kalau melihat angka tersebut, ketimpangan atau angka gap sebesar 1.963 anak yang menunjukkan bahwa anak laki-laki jumlahnya lebih besar yang mengakses pendidikan setingkat SMP. Pada tahun 2006 (data tidak ditemukan). Pada tahun 2007 untuk kelompok usia 13-15 tahun, gambaran datanya menunjukkan angka aksesibilitas anak perempuan sebesar 12.547 anak, lebih besar dari anak laki-laki yang hanya sebesar 12.150 anak, artinya kalau melihat angka tersebut, ketimpangan atau angka gap sebesar 397 anak yang menunjukkan bahwa anak perempuan jumlahnya lebih besar yang mengakses pendidikan setingkat SMP.

Kesejangan pendidikan pada jenjang SMA pada tahun 2005 untuk kelompok 16-18 tahun, gambaran datanya menunjukkan angka aksesibilitas anak perempuan sebesar (tidak ditemukan data). Pada tahun 2006 (data tidak ditemukan). Pada tahun 2007 untuk kelompok usia 16-18 tahun, gambaran datanya menunjukkan angka aksesibilitas anak perempuan sebesar 12.243 anak, lebih besar dari anak laki-laki yang hanya sebesar 10.568 anak, artinya kalau melihat angka tersebut, ketimpangan atau angka gap sebesar 1.675 anak yang menunjukkan bahwa anak perempuan jumlahnya lebih besar yang mengakses pendidikan setingkat SMA. Sedangkan sebaran angka perbandingan antara anak perempuan dengan anak laki-laki per kecamatan di lihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS), dapat dilihat pada tabel 6.4 di bawah.

Tabel 6.3  
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur di Kota Batam  
Tahun 2005,2006 dan 2007

Kelompok Umur/ Jenis Kelamin	2005	2006	2007
7-12 Tahun			
Perempuan	31,052	-	37,885
Laki-laki	28,716	-	35,028
Total	59,768	71,716	72,913
13-15 Tahun			
Perempuan	6,776	-	12,547
Laki-laki	8,739	-	12,150
Total	15,515	20,467	24,697
16-18 Tahun			
Perempuan	-	-	12,243
Laki-laki	-	-	10,568
Total	31,360	36,938	22,811

Sumber Profil Pendidikan Batam 2007

Tabel 6.4  
Anka Partisipasi Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Batam 2007

Kecamatan	APS 7-12 Tahun		APS 13-15 Tahun	
	L	P	L	P
Belakang padang	1,012	1,370	510	601
Batuampar	2,327	1,363	905	848
Sekupang	3,451	4,468	1,586	1,446
Nongsa	2,031	2,915	834	910
Bulang	596	772	210	399
Lubuk Baja	3,002	5,815	1,210	1,231
Sei Beduk	2,175	1,866	510	515
Galang	1,045	1,130	486	504
Bengkong	4,801	4,151	1,225	1,309
Batam Kota	5,116	5,121	2,489	2,455
Sagulung	6,022	5,911	1,355	1,421
Batu Aji	3,450	3,003	830	908
Jumlah	35,028	37,885	12,150	12,547

Sumber Profil Pendidikan Kota Batam 2007

#### a). Aksesibilitas Terhadap Pendidikan Pra-sekolah (TK/RA)

Proporsi anak usia dini yang sedang mengikuti pendidikan prasekolah (TK) menurut jenis kelamin memperlihatkan angka sebesar 7.614 anak laki-laki dan 7.147 anak perempuan, angka gap menunjukkan anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan sebanyak 467 anak atau 3,16%. Sedangkan proporsi anak usia dini yang sedang mengikuti pendidikan prasekolah (RA) menurut jenis kelamin memperlihatkan angka sebesar 1.605 anak laki-laki dan 1.400 anak perempuan, angka gap menunjukkan anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan sebanyak 205 anak atau 6,82% (baca: lihat Tabel 6.5)

Tabel 6.5  
Jumlah Siswa TK/RA Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Batam 2007

Kecamatan	Siswa TK			Siswa RA		
	L	P	Total	L	P	Total
Belakang padang	118	91	209	0	0	0
Batuampar	376	336	712	218	225	443
Sekupang	920	909	1,829	432	250	682
Nongsa	340	312	652	157	123	280
Bulang	14	17	31	0	0	0
Lubuk Baja	885	843	1,728	251	239	490
Sei Beduk	570	513	1,083	547	563	1,110
Galang	0	0	0	0	0	0
Bengkong	665	623	1,288	0	0	0
Batam Kota	1,728	1,607	3,335	0	0	0
Sagulung	1,105	1,066	2,171	0	0	0
Batu Aji	893	830	1,723	0	0	0
Jumlah	7,614	7,147	14,761	1,605	1,400	3,005

Sumber: Profil Pendidikan 2007, <http://pendis.depag.go.id/> (data diolah ulang)

#### b). Aksesibilitas Terhadap Sekolah Dasar

Proporsi anak usia 7-12 tahun yang sedang mengikuti pendidikan SD menurut jenis kelamin memperlihatkan angka sebesar 36.473 anak laki-laki dan 34.708 anak perempuan, angka gap menunjukkan anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan sebanyak 1.765 anak atau 2,47%. Sedangkan proporsi anak usia 7-12 tahun yang sedang mengikuti pendidikan MI menurut jenis kelamin memperlihatkan angka

sebesar 1.715 anak laki-laki dan 1.701 anak perempuan, angka gap menunjukkan anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan sebanyak 14 anak atau 0,41% (Baca: lihat Tabel 6.6)

Tabel 6.6  
Jumlah Siswa Sekolah Dasar Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan  
Di Kota Batam 2007

Kecamatan	Siswa SD			Siswa MI		
	L	P	Total	L	P	Total
Belakang padang	1,118	1,212	2,330	90	89	179
Batuampar	1,731	1,662	3,393	207	194	401
Sekupang	3,888	3,733	7,621	272	263	535
Nongsa	2,608	2,461	5,069	0	0	0
Bulang	644	670	1,314	37	27	64
Lubuk Baja	4,632	4,497	9,129	24	28	52
Sei Beduk	2,114	1,973	4,087	0	0	0
Galang	1,139	1,086	2,225	0	0	0
Bengkong	4,201	3,919	8,120	547	619	1,166
Batam Kota	5,513	4,915	10,428	0	0	0
Sagulung	5,557	5,393	10,950	538	481	1,019
Batu Aji	3,328	3,187	6,515	0	0	0
Jumlah	36,473	34,708	71,181	1,715	1,701	3,416

Sumber: Profil Pendidikan Kota Batam 2007

**c). Aksesibilitas Terhadap Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah tsanawiyah (SMP/MTs)**

Proporsi anak usia 13-15 tahun yang sedang mengikuti pendidikan SMP menurut jenis kelamin memperlihatkan angka sebesar 10.262 anak laki-laki dan 10.043 anak perempuan, angka gap menunjukkan anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan sebanyak 219 anak atau 1,08%. Sedangkan proporsi anak usia 13-15 tahun yang sedang mengikuti pendidikan MTs menurut jenis kelamin memperlihatkan angka sebesar 877 anak laki-laki dan 803 anak perempuan, angka gap menunjukkan anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan sebanyak 74 anak atau 4,40% (Baca: lihat Tabel 6.7)

Tabel 6.7  
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan  
Di Kota Batam 2007

Kecamatan	Siswa SMP			Siswa MTs		
	L	P	Total	L	P	Total
Belakang padang	352	393	745	108	101	209
Batuampar	714	773	1,487	46	45	91
Sekupang	1,267	1,212	2,479	108	104	212
Nongsa	648	599	1,247	139	121	260
Bulang	231	208	439	56	36	92
Lubuk Baja	1,239	1,122	2,361	0	0	0
Sei Beduk	375	390	765	46	37	83
Galang	260	254	514	55	26	81
Bengkong	896	776	1,672	319	333	652
Batam Kota	2,303	2,238	4,541	0	0	0
Sagulung	1,202	1,284	2,486	0	0	0
Batu Aji	775	794	1,569	0	0	0
Jumlah	10,262	10,043	20,305	877	803	1,680

Sumber: Profil Pendidikan Kota Batam 2007

**d). Aksesibilitas Terhadap Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)**

Proporsi anak usia 16-8 tahun yang sedang mengikuti pendidikan SMA menurut jenis kelamin memperlihatkan angka sebesar 3.190 anak laki-laki dan 4.255 anak perempuan, angka gap menunjukkan anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan sebanyak 1.065 anak atau 14,31% yang menunjukkan akses anak perempuan terhadap pendidikan jenjang SMA lebih besar dibanding anak laki-laki.. Sedangkan yang sedang mengikuti pendidikan MA menurut jenis kelamin memperlihatkan angka sebesar 316 anak laki-laki dan 491 anak perempuan, angka gap menunjukkan anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan sebanyak 175 anak atau 21,68% yang menunjukkan akses anak perempuan terhadap pendidikan jenjang SMA lebih besar dibanding anak laki-laki. Dan yang sedang mengikuti pendidikan SMK menurut jenis kelamin memperlihatkan angka sebesar 3.104 anak laki-laki dan 2.519 anak perempuan, angka gap menunjukkan anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan sebanyak 585 anak atau 10,40% yang menunjukkan akses anak perempuan terhadap pendidikan jenjang SMK lebih kecil dibanding anak laki-laki (Baca: lihat Tabel 6.8).

Tabel 6.8  
Jumlah Siswa SMA,MA dan SMK Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan  
di Kota Batam 2007

Kecamatan	Siswa SMA			Siswa MA			Siswa SMK		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
Belakang padang	327	356	683	24	39	63	0	0	0
Batuampar	192	171	363	11	24	35	732	556	1,288
Sekupang	530	786	1,316	43	55	98	0	0	0
Nongsa	84	82	166	33	38	71	0	0	0
Bulang	52	75	127	11	12	23	0	0	0
Lubuk Baja	483	436	919	0	0	0	351	595	946
Sei Beduk	0	0	0	26	42	68	79	29	108
Galang	144	126	270	0	0	0	0	0	0
Bengkong	320	705	1,025	43	57	100	361	379	740
Batam Kota	789	831	1,620	0	0	0	499	432	931
Sagulung	198	522	720	106	201	307	429	143	572
Batu Aji	71	162	233	19	23	42	653	385	1,038
Jumlah	3,190	4,252	7,442	316	491	807	3,104	2,519	5,623

Sumber: Profil Pendidikan Kota Batam 2007

#### e) Keaksaraan

Berpedoman pada Konvensi Dakar yang menargetkan bahwa menjelang tahun 2015 harus terjadi perbaikan 50 persen tingkat keniraksaraan orang dewasa terutama kaum perempuan. Terkait dengan target tersebut perlu dilakukan analisis situasi terhadap tingkat keniraksaraan penduduk Kota Batam. Sajian data tahun 2005-2007 tentang keadaan umum pendidikan Kota Batam (sebagai data terungkap yang menggambarkan angka keniraksaraan, namun tidak menunjukkan perbedaan proporsi perempuan dan laki-laki yang masih buta aksara) menyebutkan bahwa pada tahun 2005 jumlah penduduk 596.515, yang buta aksara sebesar 721 orang penduduk, dan tidak/belum pernah sekolah sebesar 71.294 orang penduduk. Tahun 2006 dengan jumlah penduduk 702.239 orang, penduduk yang buta aksara sebesar 721 orang, dan tidak/belum pernah sekolah sebesar 52.140 orang penduduk. Sedangkan pada tahun 2007, dari jumlah penduduk 720.844, penduduk yang buta aksara sebesar 757 orang, dan tidak/belum pernah sekolah sebanyak 96.940 orang penduduk (baca: Lihat Tabel 6.9).

Data yang terungkap tidak menggambarkan secara rinci angka proporsi laki-laki dan perempuan.



Tabel 6.9

Keadaan Umum Pendidikan Kota Batam

Tahun	Jumlah Penduduk	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Buta Huruf
2005	596,515	71,294	721
2006	702,239	52,140	721
2007	720,844	96,940	757

Sumber: Profil Pendidikan Kota Batam, 2005, 2006,2007

### 3. Gambaran Kesenjangan

Target yang disepakati dalam Konvensi Dakar adalah : bahwa fokus sampai dengan 2015 adalah pencapaian target agar semua anak menyelesaikan pendidikan dasar dan menyediakan pendidikan dasar yang bermutu.

Penurunan tingkat buta aksara harus direncanakan dengan baik pada 3 tahun terakhir. Proporsi penduduk umum 15 tahun ke atas yang buta aksara terutama perempuan pada tahun 2015 harus mengalami penurunan sebesar 50%, Kesenjangan gender menurut IPBA (Indeks Pemberantasan Buta Aksara) harus didata secara khusus apabila ingin memperoleh data yang akurat termasuk perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data yang ditemukan terdapat hal yang harus segera dilakukan dalam rangka pencapaian pada target Dakar pada tahun 2015; yaitu: a) memperkecil angka disparitas jumlah maupun mutu serta pendidikan yang bias gender mulai dari pendidikan usia dini, 7-12, 13-15, 16-18 tahun , .b) melakukan intervensi yang intensif kepada penduduk perempuan untuk mengakses layanan perawatan dan pendidikan.

Beberapa masalah yang harus menjadi bahan kajian lebih lanjut tentang pendidikan berkeadilan gender di Kota Batam antara lain: a) Meminimalisir pemahaman dan pola pikir masyarakat dan orang tua yang cenderung menggunakan menganggap anak perempuan sebagai manusia yang tidak penting untuk memiliki kemampuan lebih dari laki-laki. Anak perempuan seringkali menanggung beban kerja domestik yang berat di usia yang muda pada lingkungan keluarga (terutama di perdesaan), seringkali

diorientasikan kepada hal-hal praktis dan rendahnya orientasi kinerja akademik. Di beberapa kelompok masyarakat masih berpendapat bahwa anak perempuan tidak dapat memberikan hasil investasi karena setelah menikah dia akan menjadi anggota keluarga suaminya. Nilai-nilai sosial budaya yang masih dianut oleh sebagian masyarakat seperti di atas sangat merugikan bagi kaum perempuan,. b) Pendidikan dinilai belum memberikan nilai tambah yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh orang tua. Hal ini berakibat pada rendahnya motivasi orang tua untuk menyekolahkan anak terutama bagi anak perempuan, c) Proses pembelajaran di sekolah ataupun pada lembaga pendidikan nonformal kurang sensitif gender dan bias laki-laki, termasuk pada substansi isi buku pelajaran maupun ilustrasi buku, d) Ekonomi keluarga yang kurang menguntungkan merupakan faktor dominan untuk membatasi akses anak perempuan terhadap pendidikan, kecenderungan orang tua memprioritaskan pendidikan bagi anak lakilakinya.

Untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam pendidikan dasar perlu dilakukan suatu gerakan aksi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama sesuai dengan beberapa kebijakan yang telah dibuat Pemerintah seperti Permendikna N0. 35 Tahun 2006 tentang PWB/PBA, PPRI N0. 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Gerakan tidak hanya terbatas pada sosialisasi akan tetapi harus dengan Rencana Aksi dan aktualisasinya baik dalam rencana program maupun secara operasional di lapangan, dan gerakan ini mencakup upaya meningkatkan akses terhadap pendidikan, meningkatkan mutu dan relevansi dan memperbaiki manajemen.

Secara lebih rinci rekomendasi yang diusulkan dapat diuraikan sebagai berikut:

**a)** Meningkatkan partisipasi pendidikan sebagai upaya pemerataan memperoleh pendidikan bagi semua dengan upaya meningkatkan akses dan daya tampung pendidikan, menurunkan angka putus sekolah siswa perempuan dan meningkatkan angka melanjutkan lulusan SD ke SLTP, melalui berbagai upaya berikut.

(1) Memberikan perhatian khusus pada anak-anak perempuan pada lingkungan keluarga yang status sosial ekonominya lemah dan anak-anak yang tinggal di lokasi yang sulit dijangkau dengan sarana asrama, transportasi dan komunikasi.

- (2) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan lanjutan tingkat pertama
- (3) Menyelenggarakan pelayanan-pelayanan terintegrasi untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggungjawab serta membantu keluarga yang kurang mampu untuk mewujudkan tanggungjawab memberikan pendidikan kepada anak-anak khususnya anak perempuan.
- (4) Dalam upaya menurunkan angka buta aksara, pemerintah mengkoordinasikan pelaksanaan “wajib membelajarkan kepada penduduk buta aksara (terutama perempuan) bagi semua pegawai pemerintah di semua instansi pemerintah, khususnya tenaga kependidikan” dan diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dan diukur.
- (5) Mendorong tersedianya layanan pendidikan keaksaraan fungsional dan Pemberantasan Buta Aksara melalui Paket A dan Paket B di setiap perdesaan dan daerah hinterland.
- (6) Mendorong Partisipasi masyarakat, LSM dan organisasi keagamaan serta tim penggerak PKK dan Mitra PNF dalam melaksanakan program Penuntasan Buta Aksara.
- (7) Penyediaan wadah belajar bagi masyarakat Buta Aksara di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- (8) Menggalakkan program advokasi dan KIE tentang pentingnya keadilan dan kesetaraan gender dalam keluarga sedini mungkin dan mendorong orang tua agar tetap bisa menjalankan tanggungjawabnya membesarkan dan mengasuh anak selama masih sekolah, sehingga anak-anak dapat melanjutkan sekolah minimal sampai selesai pendidikan dasar.
- (9) Mengadakan kampanye pendidikan kepada masyarakat tentang berbagai bidang teknologi, lingkungan dan informasi yang mungkin dapat diikuti kaum perempuan.
- (10) Mengembangkan program informasi dan pendidikan yang memadai dengan menggunakan berbagai macam bahasa, terutama melalui media massa yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat terutama orang tua, akan betapa pentingnya pendidikan yang bersifat nondiskriminatif dan pentingnya pendidikan dasar.

### **b) Meningkatkan mutu dan relevansi**

(1) Menganalisis kurikulum dan menyesuaikan substansi bahan materi ajar yang lebih sensitif gender agar menghasilkan lulusan yang mampu menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan, hidup bersama dan mengenai diri sendiri sehingga menjadi manusia yang utuh keberadaannya, dapat menjaga kelangsungan hidup, serta memanfaatkan alam semesta.

(2) Meningkatkan kualitas tenaga pendidik, yaitu yang memiliki pendidikan yang sesuai dengan bidang studi yang diajar serta memiliki dedikasi, disiplin, dan etika kerja yang baik, di samping memahami masalah gender dan bersikap lebih sensitif gender dalam menghadapi siswa.

(3) Melakukan pengawasan/pembinaan/supervisi, evaluasi dan melakukan penjaminan mutu terhadap kebijakan dan program yang sensitif gender.

### **c) Manajemen**

(1) Melakukan analisis terhadap kebijakan yang masih bias gender mulai dari perundang-undangan, kurikulum dan bahan ajar, dan pola pikir pendidik serta tenaga kependidikan.

(2) Meningkatkan peran pusat-pusat studi untuk melakukan berbagai studi tentang masalah gender di bidang pendidikan.

(3) Mengakomodasi dan menindaklanjuti temuan dan rekomendasi penelitian tentang kesenjangan gender di bidang pendidikan.

(4) Melakukan analisis data berdasarkan gender terutama yang menyangkut faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender di setiap wilayah.

## **4. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Batam tentang Pendidikan Berkeadilan Gender**

Kebijakan pembangunan pendidikan Pemerintah Daerah Kota Batam terkait dengan Misi ke IV yang berbunyi : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, menguasai IPTEK dan bermuatan IMTAQ melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat serta pembinaan kepemudaan dan olahraga.

Pemerintah daerah telah menyikapi pembangunan pendidikan dan menganggap penting untuk mengambil langkah-langkah kebijakan dalam mengambil terobosan baru untuk mendukung program pembangunan, adapun kebijakan pembangunan pendidikan berkeadilan gender di Kotam Batam tertuang dalam RPJMD 2006-2011 sebagai berikut:

**a) Kebijakan 2006 – 20011**

Secara umum kebijakan yang terkait dengan pendidikan berkeadilan gender, tertuang dalam kebijakan untuk mencapai Misi ke IV Kota Batam melalui kebijakan : Meningkatkan kualitas pendidikan, perluasan kesempatan belajar serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dan peserta didik. Kebijakan ini secara strategis disebutkan pada Fokus I yaitu : Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan.Selain itu Kebijakan Pemerintah Kota Batam terkait dengan keadilan gender tertuang dalam dalam Misi ke V yang berbunyi : Menggali, meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai seni budaya daerah lainnya serta mengembangkan kehidupan kemasyarakatan yang harmonis, bertoleransi dan berbudi pekerti. Kebijakan ini secara strategis dituangkan pada Fokus III-nya yaitu : Terwujudnya kualitas kehidupan dan perlindungan perempuan dan anak.

**b) Program Pembangunan , Indikator Keluaran , dan target sasaran**

Program pembangunan pendidikan, terkait dengan program penyelenggaraan pendidikan berkeadilan gender yang indikator keluaran serta target sarannya seperti berikut :

**1) Program yang telah dilaksanakan 2006 s/d 2011**

Pengejawantahan program pembangunan yang terkait dengan layanan pendidikan dasar dan dalam rangka turut serta pencapaian target Dakkar di Kota Batam, telah dilaksanakan berbagai program antara lain:

- 1.1) Meningkatkan aksesibilitas pendidikan dasar setingkat SD/MI bagi perempuan di Kota Batam pada posisi rerata APK sebesar 86,44%, (baca: data tahun 2007)

- 1.2) Telah mengupayakan perhatian khusus pada anak-anak perempuan pada lingkungan keluarga yang status sosial ekonominya lemah dan anak-anak yang tinggal di lokasi yang sulit dijangkau dengan sarana asrama, transportasi dan komunikasi.
- 1.3) Menyelenggarakan pelayanan-pelayanan terintegrasi untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggungjawab serta membantu keluarga yang kurang mampu untuk mewujudkan tanggungjawab kepada anak-anak khususnya anak perempuan.
- 1.4) Telah melakukan upaya menurunkan angka buta aksara dan mengkoordinasikan pelaksanaan “wajib membelajarkan kepada penduduk buta aksara (terutama perempuan) bagi semua pegawai pemerintah di semua instansi pemerintah, khususnya tenaga kependidikan” dan diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dan diukur.
- 1.5) Telah mengupayakan tersedianya layanan pendidikan keaksaraan fungsional dan Pemberantasan Buta Aksara melalui Paket A dan Paket B di setiap perdesaan dan daerah hinterland serta menambah aksarawan baru terutama perempuan
- 1.6) Telah dilakukan upaya-upaya koordinasi dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, LSM dan organisasi keagamaan serta tim penggerak PKK dan Mitra PNF dalam melaksanakan program Penuntasan Buta Aksara terutama bagi kaumperempuan.
- 1.7) Menggalakkan program advokasi dan KIE tentang pentingnya keadilan dan kesetaraan gender dalam keluarga sedini mungkin dan mendorong orang tua agar tetap bisa menjalankan tanggungjawabnya membesarkan dan mengasuh anak selama masih sekolah, sehingga anak-anak dapat melanjutkan sekolah minimal sampai selesai pendidikan dasar.
- 1.8) Mengadakan kampanye pendidikan kepada masyarakat tentang berbagai bidang teknologi, lingkungan dan informasi yang mungkin dapat diikuti kaum perempuan.

- 1.9) Mengembangkan program informasi dan pendidikan yang memadai dengan menggunakan berbagai macam bahasa, terutama melalui media massa yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat terutama orang tua, akan betapa pentingnya pendidikan yang bersifat nondiskriminatif dan pentingnya pendidikan dasar.
- 1.10) Menganalisis kurikulum dan menyesuaikan substansi bahan materi ajar yang lebih sensitif gender.
- 1.11) Meningkatkan kualitas tenaga pendidik, yaitu yang memiliki pemahaman masalah gender dan bersikap sensitif gender dalam pembelajaran.
- 1.12) Melakukan pengawasan/pembinaan/supervisi, evaluasi dan melakukan penjaminan mutu terhadap kebijakan dan program yang sensitif gender.

## **2) Program yang direncanakan 2006 s/d 2011**

- 2.1) Terlaksananya Bimbingan Penyuluhan (konseling) dan pendampingan terhadap perempuan dan anak (baca:lihat Fokus III, Indikator keluaran nomor 01)
- 2.2) Meningkatnya penyelesaian kasus perempuan dan anak sebanyak 100-150 kasus/tahun (baca : lihat fokus III Indikator Keluaran nomor 02)
- 2.3) Terpeliharanya Gedung Shelter (baca : lihat Fokus III Indikator Keluaran nomor 03)
- 2.4) Pembinaan kualitas serta penguatan kelembagaan perempuan untuk 50 lembaga/tahun (baca : lihat Fokus III Indikator Keluaran nomor 04).

## **3) Peta Prioritas Sasaran Pembangunan Pendidikan Berkeadilan Gender**

Mengingat hampir diseluruh negara yang menjadi perhatian dunia, dan di beberapa daerah di Indonesia kaum perempuan adalah subjek pembangunan yang menjadi perhatian khusus, karena berbagai alasan; seperti tingkat aksesibilitasnya terhadap pendidikan masih cukup rendah, kecenderungan penduduk buta aksara angkanya lebih besar kaum perempuan, menjadi objek eksploitasi dan kekerasan, dan sebagainya. Oleh karena itu maka beberapa hal

yang kiranya penting menjadi fokus perhatian dan prioritas dalam pembangunan kaum perempuan adalah :

- 3.1) Mendorong semua pihak di daerah kecamatan, kelurahan untuk terus meningkatkan angka aksesibilitas anak perempuan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (minimal SMP/MTs), karena untuk pendidikan setingkat SD/MI sudah cukup baik.
- 3.2) Mendorong pemerintah untuk memberi keberpihakan kepada kaum perempuan dalam pengembangan program keterampilan, vokasional sehingga mereka memiliki kemandirian.
- 3.3) Melakukan up date dan pemetaan ulang secara cermat, akurat tentang angka buta aksara dengan menggambarkan berapa angka keniraksaraan kaum laki-laki, perempuan, kelompok usia penduduk, domisili, sehingga kantong-kantong daerah sasaran akan menjadi jelas (Zoning)
- 3.4) Dinas Pendidikan Kota Batam harus membuat RAD teknis dan operasional untuk melaksanakan percepatan pemberantasan buta aksara dan menambah aksarawan baru terutama bagi kaum perempuan sebelum tahun 2015.
- 3.5) Dinas Pendidikan harus melakukan kegiatan analisa KTSP, pembinaan, dan sosialisasi kepada kepala sekolah, guru, yang bertujuan untuk memilah secara cermat substansi-substansi yang diharapkan memiliki kecenderungan sensitif gender,
- 3.6) Dinas Pendidikan harus melakukan bekerja sama lintas sektor dan lintas instansi untuk melakukan penguatan lembaga perempuan.



## VII

### MUTU PENDIDIKAN

Bangsa Indonesia yang masih dikategorikan sebagai negara berkembang, dalam penjalannya terus mencari bentuk tentang bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang maju, lepas dari segala bentuk ketertinggalan. Pendidikan adalah salah satu sektor yang harus menjadi perhatian dan sekaligus menjadi pilar untuk menjadikan bangsa ini maju dan masyarakatnya memiliki kemampuan (minimal) sejajar dengan bangsa lainnya. Namun pendidikan masih tetap dalam kecemasan, banyak pemikir yang sinis terhadap praktik pendidikan yang hanya bersifat "schooling" dan kering dari praktik yang mengarahkan anak untuk "learning", sehingga harapan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu semakin jauh. Mengukur mutu, akan sangat sulit karena ukurannya tidak pernah ajeg, yakni selalu berubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan bahkan kepentingan akan atribut itu. Selain itu banyak indikator manakala akan menunjuk bahwa pendidikan itu bermutu atau tidak bermutu. Standar takaran telah ditetapkan oleh pemerintah yakni 8 standar seperti tertuang pada PPRI No. 19/2005 tentang : Standar Nasional Pendidikan (SNP), yaitu Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan.

Gambaran tentang standar tersebut di atas adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) manakala pendidikan itu diharapkan memiliki mutu yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Untuk kepentingan ini terdapat beberapa indikator yang kiranya dapat memberi gambaran tentang mutu pendidikan dari sudut pandang input/intake, proses, output, outcomes.

#### **1. Situasi dan Kondisi dan gambaran mutu input**

Cukup banyak alasan mengapa pendidikan memberikan peran besar terhadap pengembangan sumber daya manusia dan pembentukan secara utuh dan bermutu. Pendidikan sebagai upaya pengembangan sumberdaya manusia telah lama disadari bahwa pengejawantahannya harus mulai diberikan sejak dini, sebab pada usia-usia

awal inilah yang akan menjadi pondasi bagi pendidikan dan pengembangan potensi lebih lanjut. Disadari bahwa pembentukan sumber daya manusia bermutu tidaklah mudah; karena bukan hanya memerlukan strategi yang tepat, namun memerlukan program yang baik dan berorientasi mutu serta pendanaan yang cukup memadai, daya tampung dan daya jangkau yang mudah terhadap lembaga-lembaga pendidikan (satuan pendidikan) bagi masyarakat. Jumlah Sekolah T/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA, MA dan SMK harus sangat memadai bukan hanya daya tampungnya tetapi mutu layanannya. Gambaran yang berhubungan layanan pendidikan, kita dapat mengamati lebih dahulu sebaran jumlah sekolah di Kota Batam .

Tabel 7.1

Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan Di Kota Batam

Kecamatan	SD/MI	SLTP/MTs	SMA/SMK/MA
Belakang Padang	17	7	4
Bulang	12	6	2
Galang	25	7	3
Sei Beduk	14	3	2
Nongsa	18	7	2
Sekupang	24	11	4
Lubuk Baja	22	9	9
Batu Ampar	10	6	7
Batam kota	33	14	11
Sagulung	30	6	3
Batu Aji	15	6	6
Bengkong	24	9	7
<b>Jumlah</b>	244	91	60

Sumber Profil Pendidikan 2007

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah SD/MI, SMP/MTs, SA/MA/SMK di Kota Batam jika dilihat per kecamatan gambarannya seperti tersaji pada tabel 8.1.

Tabel 7.2

Jumlah Guru Menurut Kecamatan di Kota Batam tahun 2007

<b>Kecamatan</b>	<b>SD/MI</b>	<b>SMP/MTs</b>	<b>SMA/SMK/MA</b>
Belakang Padang	209	81	48
Bulang	107	59	20
Galang	215	64	29
Sei Beduk	141	46	30
Nongsa	199	99	19
Sekupang	345	199	95
Lubuk Baja	342	163	149
Batu Ampar	149	102	111
Batam kota	423	291	173
Sagulung	414	122	99
Batu Aji	297	114	127
Bengkong	349	152	136
<b>Jumlah</b>	<b>3190</b>	<b>1492</b>	<b>1036</b>

Apabila dianalisis dan dipersandingkan antara tabel 7.1 dengan tabel 7.2, seperti dapat dilihat perkecamatan, di Kecamatan Belakang Padang dari 17 SD/MI yang ada dibina oleh 209 guru, artinya jika diambil angka rerata bahwa tiap SD/MI dibina oleh 12 orang guru, dilihat dari sudut jumlah sangat memadai dan lebih dari angka ideal jika rombongan belajar atau kelas tunggal, namun demikian jika terdapat kelas rangkap kondisi ini cukup memadai. Di Kecamatan Bulang dari 12 SD/MI yang ada dibina oleh 107 guru, artinya jika diambil angka rerata bahwa tiap SD/MI dibina oleh 9 orang guru, dilihat dari sudut jumlah memadai dan pada posisi angka ideal jika rombongan belajar atau kelas tunggal, namun demikian jika terdapat kelas rangkap kondisi ini memerlukan upaya pembagian tugas yang lebih baik. Kecamatan Galang memiliki 25 SD/MI yang ada dibina oleh 215 guru, artinya jika diambil angka rerata bahwa tiap SD/MI dibina oleh 9 orang guru, dilihat dari sudut jumlah memadai dan pada posisi angka ideal jika rombongan belajar atau kelas tunggal, namun demikian jika terdapat kelas rangkap kondisi ini memerlukan upaya pembagian tugas yang lebih baik. Kecamatan Sei Beduk memiliki 14 SD/MI yang ada dibina oleh 141 guru, artinya jika diambil angka rerata bahwa tiap SD/MI dibina oleh 10 orang guru, dilihat dari sudut jumlah sangat memadai dan pada posisi angka ideal jika rombongan belajar atau kelas tunggal, namun demikian jika terdapat kelas rangkap kondisi ini memerlukan upaya pembagian tugas yang lebih baik. Kecamatan Nongsa memiliki 18 SD/MI yang ada dibina oleh 199 guru, artinya jika diambil angka rerata bahwa tiap SD/MI dibina oleh 11 orang guru, dilihat dari sudut jumlah sangat memadai dan pada

posisi angka ideal jika rombongan belajar atau kelas tunggal, dan jika terdapat kelas rangkapun kondisi ini cukup baik untuk dapat melayani sasaran didiknya.

Kecamatan Skupang memiliki 24 SD/MI yang ada dibina oleh 345 guru, artinya jika diambil angka rerata bahwa tiap SD/MI dibina oleh 14 orang guru, dilihat dari sudut jumlah sngat memadai dan pada posisi angka sangat ideal jika rombongan belajar atau kelas tunggal, dan jika terdapat kelas rangkap sekalipun kondisi ini sangat baik untuk dapat melayani sasaran didiknya. Kecamatan Lubuk Baja memiliki 22 SD/MI yang ada dibina oleh 342 guru, artinya jika diambil angka rerata bahwa tiap SD/MI dibina oleh 16 orang guru, dilihat dari sudut jumlah sangat memadai sebagai SD/MI besar dan pada posisi angka sangat ideal jika rombongan belajar atau kelas tunggal, dan jika terdapat kelas rangkap sekalipun kondisi ini sangat baik untuk dapat melayani sasaran didiknya. Kecamatan Batu Ampar memiliki 10 SD/MI yang ada, dibina oleh 149 guru, artinya jika diambil angka rerata bahwa tiap SD/MI dibina oleh 15 orang guru, dilihat dari sudut jumlah sangat memadai sebagai SD/MI besar dan pada posisi angka sangat ideal jika rombongan belajar atau kelas tunggal, dan jika terdapat kelas rangkap sekalipun kondisi ini sangat baik untuk dapat melayani sasaran didiknya. Kecamatan Batam Kota memiliki 33 SD/MI yang ada, dibina oleh 423 guru, artinya jika diambil angka rerata bahwa tiap SD/MI dibina oleh 13 orang guru, dilihat dari sudut jumlah sangat memadai sebagai SD/MI dan pada posisi angka sangat ideal jika rombongan belajar atau kelas tunggal, dan jika terdapat kelas rangkap sekalipun kondisi ini sangat baik untuk dapat melayani sasaran didiknya. Kecamatan Sagulung memiliki 30 SD/MI yang ada, dibina oleh 414 guru, artinya jika diambil angka rerata bahwa tiap SD/MI dibina oleh 14 orang guru, dilihat dari sudut jumlah sangat memadai sebagai SD/MI besar dan pada posisi angka sangat ideal jika rombongan belajar atau kelas tunggal, dan jika terdapat kelas rangkap sekalipun kondisi ini sangat baik untuk dapat melayani sasaran didiknya. Kecamatan Batu Aji memiliki 15 SD/MI yang ada, dibina oleh 297 guru, artinya jika diambil angka rerata bahwa tiap SD/MI dibina oleh 20 orang guru, dilihat dari sudut jumlah sangat SD/MI yang berada di kecamatan ini adalah SD besar dan pada posisi angka sangat ideal dan luar biasa. Mungkin SD/MI secara keseluruhan memiliki kelas rangkap. Kecamatan Bengkong memiliki 24 SD/MI yang ada, dibina oleh 349 guru, artinya jika diambil

angka rerata bahwa tiap SD/MI dibina oleh 15 orang guru, dilihat dari sudut jumlah SD/MI yang berada di kecamatan ini adalah SD/MI besar dan pada posisi angka sangat ideal dan dapat melayani kelas rangkap.

Menganalisis data di atas, jika dilihat dari kuantitas pendidik/guru, Kota Batam surplus tenaga pendidik untuk SD/MI. Persoalan berikut bagaimana jika dilihat dari sisi kelayakan tenaga pendidik tersebut. Sajian data pada tabel 8.3 (di bawah) menunjukkan dalam rerata bahwa pendidik/guru yang layak angkanya sebesar 78.54%, semi layak 2,73%, dan pendidik/guru yang dikategorikan tidak layak hanya sebesar 18,73%. Andai data ini dipercaya, maka Pemerintah daerah Kota Batam hanya memiliki 21% guru saja yang harus ditingkatkan kualifikasi, kompetensinya. Namun 79% guru di atas telah tersertifikasi ?, itulah yang harus menjadi bahan kajian SKPD Dinas Pendidikan Kota Batam (baca: lihat tabel 7.3)

Menganalisis dan mempersandingkan antara tabel 8.1 dengan tabel 8.2, seperti dapat dilihat perkecamatan, di Kecamatan Belakang Padang dari 7 SMP/MTs yang ada dibina oleh 81 guru, artinya jika diambil angka rerata bahwa tiap SMP/MTs dibina oleh 12 orang guru, dilihat dari sudut jumlah sangat tidak memadai sekalipun rombongan belajar atau kelas tunggal sekalipun (Baca: Lihat Kerangka Dasar Kurikulum dalam Permendiknas 22 Tahun 2006) . Di Kecamatan Bulang dari 6 SMP/MTs yang ada dibina oleh 59 guru, artinya jika diambil angka rerata bahwa tiap SMP/MTs dibina oleh 10 orang guru, dilihat dari sudut jumlah tidak memadai dan pada posisi kekurangan guru walaupun rombongan belajar atau kelas tunggal sekalipun (Baca: Lihat Kerangka Dasar Kurikulum dalam Permendiknas 22 Tahun 2006) . Kecamatan Galang memiliki 7 SMP/MTs yang ada dibina oleh 64 guru, artinya jika diambil angka rerata bahwa tiap SMP/MTs dibina oleh 9 orang guru, dilihat dari sudut jumlah tidak memadai memadai dan pada posisi angka kekurangan guru walaupun rombongan belajar atau kelas tunggal sekalipun (Baca: Lihat Kerangka Dasar Kurikulum dalam Permendiknas 22 Tahun 2006) . Kecamatan Sei Beduk memiliki 3 SMP/MTs yang ada dibina oleh 46 guru, artinya jika diambil angka rerata bahwa tiap SMP/MTs dibina oleh 15 orang guru, dilihat dari sudut jumlah memadai dan pada posisi rombongan belajar atau kelas tunggal sekalipun (Baca: Lihat Kerang Dasar Kurikulum dalam Permendiknas 22 Tahun 2006). Kecamatan

Nongsa memiliki 7 SMP/MTs yang ada dibina oleh 99 guru, artinya jika diambil angka rerata bahwa tiap SMP/MTs dibina oleh 14 orang guru, dilihat dari sudut jumlah memadai dan pada posisi rombongan belajar atau kelas tunggal (Baca: Lihat Kerang Dasar Kurikulum dalam Permendiknas 22 Tahun 2006). Kecamatan Sekupang memiliki 11 SMP/MTs yang ada dibina oleh 199 guru, artinya jika diambil angka rerata bahwa tiap SMP/MTs dibina oleh 18 orang guru, dilihat dari sudut jumlah memadai rombongan belajar atau kelas tunggal (Baca: Lihat Kerangka Dasar Kurikulum dalam Permendiknas 22 Tahun 2006). Kecamatan Lubuk Baja memiliki 9 SMP/MTs yang ada dibina oleh 163 guru, artinya jika diambil angka rerata bahwa tiap SMP/MTs dibina oleh 18 orang guru, dilihat dari sudut jumlah memadai sebagai SMP/MTs rombongan belajar atau kelas tunggal (Baca: Lihat Kerangka Dasar Kurikulum dalam Permendiknas 22 Tahun 2006). Kecamatan Batu Ampar memiliki 6 SMP/MTs yang ada, dibina oleh 102 guru, artinya jika diambil angka rerata bahwa tiap SMP/MTs dibina oleh 17 orang guru, dilihat dari sudut jumlah sangat memadai sebagai SMP/MTs posisi angka sangat rombongan belajar atau kelas tunggal (Baca: Lihat Kerang Dasar Kurikulum dalam Permendiknas 22 Tahun 2006). Kecamatan Batam Kota memiliki 14 SMP/MTs yang ada, dibina oleh 291 guru, artinya jika diambil angka rerata bahwa tiap SMP/MTs dibina oleh 21 orang guru, dilihat dari sudut jumlah sangat memadai sebagai SMP/MTs pada posisi jika rombongan belajar atau kelas tunggal pada tiaptingkatnya (Baca: Lihat Kerang Dasar Kurikulum dalam Permendiknas 22 Tahun 2006). Kecamatan Sagulung memiliki 6 SMP/MTs yang ada, dibina oleh 122 guru, artinya jika diambil angka rerata bahwa tiap SMP/MTs dibina oleh 20 orang guru, dilihat dari sudut jumlah sangat memadai sebagai SMP/MTs pada posisi rombongan belajar atau kelas tunggal pada tiap tingkatnya (Baca: Lihat Kerangka Dasar Kurikulum dalam Permendiknas 22 Tahun 2006). Kecamatan Batu Aji memiliki 6 SMP/MTs yang ada, dibina oleh 114 guru, artinya jika diambil angka rerata bahwa tiap SMP/MTs dibina oleh 19 orang guru, dilihat dari sudut jumlah memadai sebagai SMP/MTs yang rombongan belajar atau kelas tunggal pada tiap tingkatnya (Baca: Lihat Kerangka Dasar Kurikulum dalam Permendiknas 22 Tahun 2006). Kecamatan Bengkong memiliki 9 SMP/MTs yang ada, dibina oleh 152 guru, artinya jika diambil angka rerata bahwa tiap SMP/MTs dibina oleh 17 orang guru,

dilihat dari sudut jumlah berada pada posisi memadai sebagai SMP/MTs yang rombongan belajar atau kelas tunggal pada tiap tingkatan kelasnya (Baca: Lihat Kerangka Dasar Kurikulum dalam Permendiknas 22 Tahun 2006).

Menganalisis data di atas, jika dilihat dari kuantitas pendidik/guru, Kota Batam kurang tenaga pendidik untuk SMP/MTs. (Lihat Tabel 7.2).

Sedangkan sajian data pada tabel 8.3 (di bawah) menunjukkan dalam rerata bahwa pendidik/guru yang layak angkanya sebesar 71,58%, semi layak 19,77%, dan pendidik/guru yang dikategorikan tidak layak hanya sebesar 8,65%. Andai data ini dipercaya, maka Pemerintah daerah Kota Batam hanya memiliki 28% guru saja yang harus ditingkatkan kualifikasi, kompetensinya. Namun 72% guru di atas apakah telah tersertifikasi ?, itulah yang harus menjadi bahan kajian SKPD Dinas Pendidikan Kota Batam.

Sedangkan apabila menganalisis dan mempersandingkan antara tabel 7.1 dengan tabel 7.2, seperti dapat dilihat perkecamatan, di Kecamatan Belakang Padang dari 4 SMA/SMK/MA yang ada dibina oleh 48 guru, artinya jika diambil angka rerata bahwa tiap SMA/SMK/MA dibina oleh 12 orang guru, dilihat dari sudut jumlah tidak memadai sekalipun rombongan belajar atau kelas tunggal (Baca: Lihat Kerangka Dasar Kurikulum dalam Permendiknas 22 Tahun 2006). Di Kecamatan Bulang dari 2 SMA/SMK/MA yang ada dibina oleh 20 guru, artinya jika diambil angka rerata bahwa tiap SMA/SMK/MA dibina oleh 10 orang guru, dilihat dari sudut jumlah tidak memadai sekalipun rombongan belajar atau kelas tunggal tunggal pada tiap tingkatannya (Baca: Lihat Kerangka Dasar Kurikulum dalam Permendiknas 22 Tahun 2006). Kecamatan Galang memiliki 3 SMA/SMK/MA yang ada dibina oleh 29 guru, artinya jika diambil angka rerata bahwa tiap SMA/SMK/MA dibina oleh 10 orang guru, dilihat dari sudut jumlah tidak memadai (terutama untuk SMK) sekalipun rombongan belajar atau kelas tunggal (Baca: Lihat Kerang Dasar Kurikulum dalam Permendiknas 22 Tahun 2006). Kecamatan Sei Beduk memiliki 2 SMA/SMK/MA yang ada dibina oleh 30 guru, artinya jika diambil angka rerata bahwa tiap SMA/SMK/MA dibina oleh 15 orang guru, dilihat dari sudut jumlah memadai (terutama untuk SMK) sekalipun rombongan belajar atau kelas tunggal pada tiap

tingkatannya (Baca: Lihat Kerangka Dasar Kurikulum dalam Permendiknas 22 Tahun 2006). Kecamatan Nongsa memiliki 2 SMA/SMK/MA yang ada dibina oleh 19 guru, artinya jika diambil angka rerata bahwa tiap SMA/SMK/MA dibina oleh 10 orang guru, dilihat dari sudut jumlah tidak memadai (terutama untuk SMK) sekalipun rombongan belajar atau kelas tunggal (Baca: Lihat Kerangka Dasar Kurikulum dalam Permendiknas 22 Tahun 2006). Kecamatan Sekupang memiliki 4 SMA/SMK/MA yang ada dibina oleh 95 guru, artinya jika diambil angka rerata bahwa tiap SMA/SMK/MA dibina oleh 24 orang guru, dilihat dari sudut jumlah cukup memadai walaupun tidak pada posisi ideal dan jika rombongan belajar atau kelas tunggal pada tiap tingkatannya (Baca: Lihat Kerangka Dasar Kurikulum dalam Permendiknas 22 Tahun 2006). Kecamatan Lubuk Baja memiliki 9 SMA/SMK/MA yang ada dibina oleh 149 guru, artinya jika diambil angka rerata bahwa tiap SMA/SMK/MA dibina oleh 17 orang guru, dilihat dari sudut jumlah tidak memadai (terutama untuk SMK) sekalipun rombongan belajar atau kelas tunggal pada tiap tingkatannya (Baca: Lihat Kerangka Dasar Kurikulum dalam Permendiknas 22 Tahun 2006). Kecamatan Batu Ampar memiliki 7 SMA/SMK/MA yang ada, dibina oleh 111 guru, artinya jika diambil angka rerata bahwa tiap SMA/SMK/MA dibina oleh 16 orang guru, dilihat dari sudut jumlah tidak memadai (terutama untuk SMK) sebagai sekalipun rombongan belajar atau kelas tunggal pada tiap tingkatannya (Baca: Lihat Kerangka Dasar Kurikulum dalam Permendiknas 22 Tahun 2006). Kecamatan Batam Kota memiliki 11 SMA/SMK/MA yang ada, dibina oleh 173 guru, artinya jika diambil angka rerata bahwa tiap SMA/SMK/MA dibina oleh 16 orang guru, dilihat dari sudut jumlah tidak memadai (terutama untuk SMK) sekalipun rombongan belajar atau kelas tunggal pada tiap tingkatannya (Baca: Lihat Kerangka Dasar Kurikulum dalam Permendiknas 22 Tahun 2006). Kecamatan Sagulung memiliki 3 SMA/SMK/MA yang ada, dibina oleh 99 guru, artinya jika diambil angka rerata bahwa tiap SMA/SMK/MA dibina oleh 33 orang guru, dilihat dari sudut jumlah cukup memadai sebagai SMA/SMK/MA dengan rombongan belajar atau kelas tunggal pada tiap tingkatannya (Baca: Lihat Kerangka Dasar Kurikulum dalam Permendiknas 22 Tahun 2006). Kecamatan Batu Aji memiliki 6 SMA/SMK/MA yang ada, dibina oleh 127 guru, artinya jika diambil angka rerata bahwa tiap SMA/SMK/MA dibina oleh 21



orang guru, dilihat dari sudut jumlah memadai manakala rombongan belajar dan tau kelas tunggal pada tiap tingkatannya (Baca: Lihat Kerangka Dasar Kurikulum dalam Permendiknas 22 Tahun 2006). Kecamatan Bengkong memiliki 7 SMA/SMK/MA yang ada, dibina oleh 136 guru, artinya jika diambil angka rerata bahwa tiap SMA/SMK/MA dibina oleh 19 orang guru, dilihat dari sudut jumlah SMA/SMK/MA yang berada di kecamatan ini adalah SMA/SMK/MA pada posisi angka memadai (tapi tidak untuk SMK) sekalipun rombongan belajar dan tau kelas tunggal pada tiap tingkatannya (Baca: Lihat Kerangka Dasar Kurikulum dalam Permendiknas 22 Tahun 2006).

Menganalisis data di atas, jika dilihat dari kuantitas pendidik/guru, Kota Batam kekurangan tenaga pendidik untuk SMA/SMK/MA, karena pada jenjang sekolah menengah terdapat jurusan/program studi dengan tuntutan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan SNP (PPRI 19/2005). Persoalan berikut bagaimana jika dilihat dari sisi kelayakan tenaga pendidik tersebut. Sajian data pada tabel 7.3 (di bawah) rerata bahwa pendidik/guru yang layak angkanya sebesar 86.97%, semi layak 9.27%, dan pendidik/guru yang dikategorikan tidak layak hanya sebesar 3.76%. Andai data ini dipercaya, maka Pemerintah daerah Kota Batam hanya memiliki 13% guru saja yang harus ditingkatkan kualifikasi, kompetensinya. Namun 87% guru di atas apakah telah tersertifikasi ?, itulah yang harus menjadi bahan kajian SKPD Dinas Pendidikan Kota Batam. menunjukkan dalam

Tabel 7.3  
Indikator Mutu Pendidik

Angka Kelayakan Mengajar	SD/MI	SMP/MTs	SM/MA
Layak	78.54	71.58	86.97
Semi Layak	2.73	19.77	9.27
Tidak Layak	18.73	8.65	3.76

Sumber: Profil Pendidikan 2007 diadopsi dari sebagian data tabel 4.5

Tabel 7.4  
Gambaran Umum Sekolah SD/MI Kota Batam 2007

SD/MI	Negeri	Swasta	Jumlah
Lembaga	129	115	244
Rombel	1448	913	2361
Siswa Baru TK.I	11051	7541	18592
Jumlah Siswa	48205	26393	74598
Guru	1745	1067	2812
Ruang Kelas	949	804	1753
Lulusan	4813	1540	6353
Angka Putus Sekolah	19	10	29
Angka Mengulang	1078	183	2156
Rasio Md/RB	33.3	28.9	31.1
Rasio RK/RB	0.7	0.9	0.8
Rasio Mrd/Guru	27.6	24.7	26.2
Rasio Mrd/Sekolah	374	230	302

Sumber Profil Pendidikan Kota Batam 2007

Tabel 7.5

Gambaran Umum Sekolah SMP/MTs Kota Batam 2007

SMP/MTs	Negeri	Swasta	Jumlah
Lembaga	35	56	91
Rombel	34	294	648
Murid	14115	7870	21985
Guru	773	810	1583
Ruang Kelas	328	334	662
Lulusan	2882	1965	4847
Angka Putus Sekolah	30	40	70
Angka Mengulang	78	74	152
Rasio Md/RB	40	27	33.9
Rasio RK/RB	0.93	1.14	1
Rasio Mrd/Guru	18	10	13.9
Rasio Mrd/Sekolah	403	141	242

Sumber Profil Pendidikan Kota Batam 2007

Tabel 7.6

Gambaran Umum Sekolah SMA,MA Kota Batam 2007

SMA/MA	Negeri	Swasta	Jumlah
Lembaga	17	26	43
Rombel	150	117	267
Murid	5449	2752	8201
Guru	350	364	714
Ruang Kelas	158	127	285
Lulusan	1237	804	2041
Angka Putus Sekolah	92	51	143
Angka Mengulang	8	9	17
Rasio Mrd/RB	36.7	23.5	30.9
Rasio RK/RB	1.1	1.1	1.1
Rasio Mrd/Guru	15.7	7.6	11.6
Rasio Mrd/Sekolah	323	106	192

Sumber Profil Pendidikan Kota Batam 2007

## 2. Gambaran Mutu output

Perkembangan mutu output di Kota Batam jika melihat rerata NUN sebagai hasil Ujian Nasional SMP/MTs/Sederajat 2004/2005, 2005/2006 dan 2006/2007 masih menunjukkan prestasi yang belum menggembirakan (lihat Tabel 7.7) karena masih pada garis pasinggrid. Dari data yang terungkap untuk 3 (tiga) mata pelajaran, yaitu : pada tahun pelajaran 2004/2005 rerata NEM/NUN Mata Pelajaran Bhs. Indonesia sebesar 6,07, Matematika 6,16, dan Bhs. Inggris 5,76. Tahun 2005/2006 rerata NUN Mata Pelajaran Bhs. Indonesia sebesar 6,15, Matematika 6,20, dan Bhs. Inggris 5,80. Sedangkan pada tahun 2006/2007 rerata NUN Mata Pelajaran Bhs. Indonesia sebesar 6,60, Matematika 6,35, dan Bhs. Inggris 6,10.

Rerata NUN sebagai hasil Ujian Nasional SMA/MA/Sederajat pada tahun 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 dan masih menunjukkan prestasi cukup baik (lihat Tabel 7.7) dan berada pada posisi di atas garis pasinggrid. Dari data yang terungkap untuk 3 (tiga) mata pelajaran, yaitu : pada tahun pelajaran 2004/2005 rerata NEM/NUN Mata Pelajaran Bhs. Indonesia sebesar 6,89, Matematika 6,29, dan Bhs. Inggris 6,85. Tahun 2005/2006 rerata NEM/NUN Mata Pelajaran Bhs. Indonesia sebesar 6,95, Matematika 6,35, dan Bhs. Inggris 6,90. Sedangkan pada tahun 2006/2007 rerata NUN Mata Pelajaran Bhs. Indonesia sebesar 7,10, Matematika 6,40, dan Bhs. Inggris 7,0. (baca: Lihat Tabel 7.7).

Tabel 7.7

Rata-rata NEM/NUN Jenjang SMP/MTs di Kota Batam 2005, 2006 dan 2007

Tahun	SLTP/MTs		
	B. Ind	Mtk	B.Ing
2005	6,07	6,16	5,76
2006	6,15	6,2	5,8
2007	6,6	6,35	6,1

Gambaran data lain yang terungkap tentang rata-rata NUN SMP/MTs tahun 2007 tergambaran seperti pada tabel 8.9 di bawah ini :

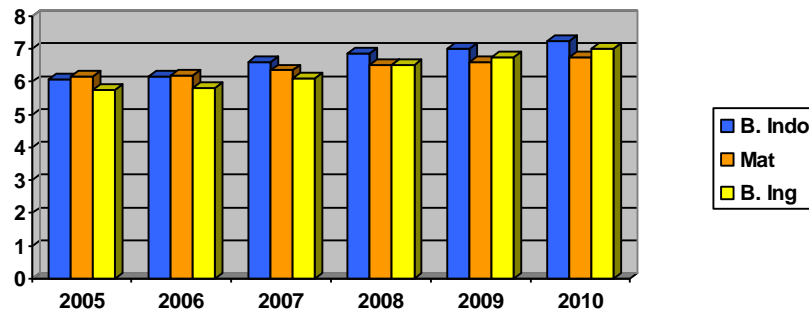
Tabel 7.8  
Rata-rata NUN SMP Menurut Kecamatan di Kota Batam 2007

Kecamatan	Rata-rata UAN
Belakang Padang	2,64
Batu Ampar	2,42
Sekupang	4,45
Nongsa	6,17
Bulang	6,68
Lubuk Baja	2,7
Sei Beduk	8,45
Galang	2,81
Bengkong	6,11
Batam Kota	3,95
Sagulung	5,92
Batu Aji	5,36
<b>Rata-rata Batam</b>	<b>4,8</b>

Sumber : Profil Pendidikan Kota Batam 2007

Selain data di atas, ada secercah harapan yang menggembirakan bahwa SKPD Dinas pendidikan Kota Batam telah membuat proyeksi 2005-2010 untuk 3 (tiga) mata pelajaran; yaitu Bhs. Indonesia, Matematika, dan Bhs. Inggris bagi siswa SMP/MTs/Sederajat yang sangat baik dalam dalam rangka mendorong semua jajaran pelaku pendidikan baik pengelola, pembina, maupun para pendidik dan tenaga kependidikan dan pastinya bagi para pengambil kebijakan pada level yang lebih tinggi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia di Kota Batam. Angka proyeksi tersebut lebih jelasnya divisualisasikan pada Gambar 7.1 bdi bawah ini

Gambar 7.1  
Rata-rata NUN SMP/MTs Kota Batam 2007



B. Indo	6.07	6.15	6.6	6.85	7	7.25
Mat	6.16	6.2	6.35	6.5	6.6	6.75
B. Ing	5.76	5.8	6.1	6.5	6.75	7

Sumber: Profil Pendidikan Kota Batam 2007

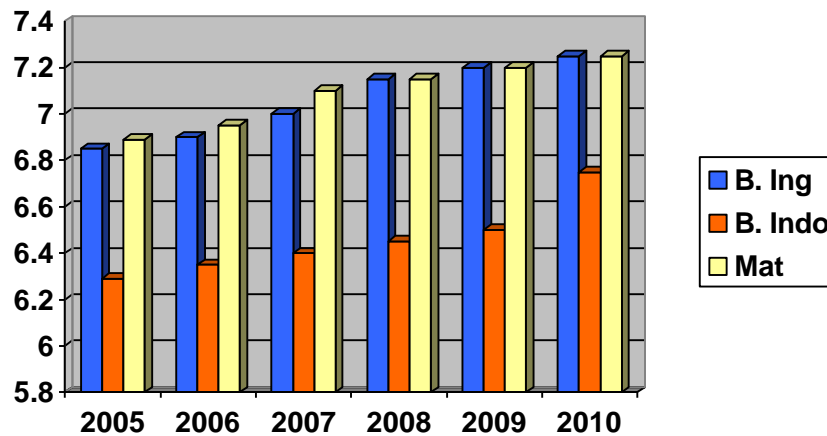
Tabel 7.9  
Rata-rata NEM/NUN SMA di Kota Batam 2005. 2006 dan 2007

Tahun	SMA/SMK/MA		
	B. Ind	Mtk	B.Ing
2005	6,89	6,29	6,85
2006	6,95	6,35	6,9
2007	7,1	6,4	7

Sumber Profil Pendidikan 2007

Selain data di atas, ada secercah harapan yang menggembirakan bahwa SKPD Dinas pendidikan Kota Batam telah membuat proyeksi 2005-2010 untuk 3 (tiga) mata pelajaran; yaitu Bhs. Indonesia, Matematika, dan Bhs. Inggris bagi siswa SMA/MA/SMK yang sangat baik dalam dalam rangka mendorong semua jajaran pelaku pendidikan baik pengelola, pembina, maupun para pendidik dan tenaga kependidikan dan pastinya bagi para pengambil kebijakan pada level yang lebih tinggi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia di Kota Batam. Angka proyeksi tersebut lebih jelasnya divisualisasikan pada Gambar 7.2 di bawah ini :

Gambar 7.2  
Rata-rata NUN SMA di Kota Batam



B. Indo	6.85	6.9	7	7.15	7.2	7.25
Mat	6.29	6.35	6.4	6.45	6.5	6.75
B. Ing	6.89	6.95	7.1	7.15	7.2	7.25

Sumber: Profil Pendidikan Kota Batam 2007

### 3. Gambaran Kesenjangan dengan Target Dakar

Mutu, relevansi dan daya saing seperti diurai pada sebelumnya merupakan salah satu dari tiga masalah besar pendidikan yang dihadapi bangsa ini. Konvensi Dakar yang terkait dengan pendidikan bermutu atau mutu adalah upaya memberikan fasilitas/kemudahan aksesibilitas terhadap pendidikan yang memiliki atribut dan diberikan kepada semua anak-anak bangsa ini. Ketika ukuran-ukuran yang digunakan terkait dengan input dalam proses pendidikan serta output dan outcome, sehingga dapat sesuai dengan standar diharapkan. Ketika mengikuti alur pikir input/intake-proses-output-outcome, mengisyaratkan bahwa masukan (input/intake) dalam komposisi tertentu yang diproses dengan metode tertentu akan membuahkan dua macam hasil, yaitu hasil jangka pendek (output) dan hasil jangka panjang (outcome). Input pendidikan terdiri dari kurikulum, siswa, guru, sarana/prasarana, dana, dan masukan lain sesuai dengan karakteristiknya. Beberapa hal yang berkenaan dengan apakah pendidikan bermutu atau tidak bermutu, tentu banyak faktor yang berkontribusi oleh faktor input pendidikan seperti siswa (intake/rawinput), Instrumental input (guru, kurikulum, sarana pendidikan/media pembelajaran, buku teks dan buku pelajaran, dsb). Seperti gambaran data pada bagian di atas, kuantitas pendidik/guru, Kota Batam surplus tenaga pendidik untuk SD/MI. Namun dari sisi kelayakan tenaga

pendidik tersebut gambaran datanya tersaji pada tabel 8.3 (di bawah) menunjukkan dalam rerata bahwa pendidik/guru yang layak angkanya sebesar 78.54%, semi layak 2,73%, dan pendidik/guru yang dikategorikan tidak layak hanya sebesar 18,73%. Andai data ini dipercaya, maka Pemerintah daerah Kota Batam hanya memiliki 21% guru saja yang harus ditingkatkan kualifikasi, kompetensinya.

Sajian data pada tabel 7.3 (di atas) menunjukkan dalam rerata bahwa pendidik/guru SMP/MTs yang layak angkanya sebesar 71,58%, semi layak 19,77%, dan pendidik/guru yang dikategorikan tidak layak hanya sebesar 8,65%. Andai data ini dipercaya, maka Pemerintah daerah Kota Batam hanya memiliki 28% guru saja yang harus ditingkatkan kualifikasi, kompetensinya. Namun 72% guru di atas apakah telah tersertifikasi ?, itulah yang harus menjadi bahan kajian SKPD Dinas Pendidikan Kota Batam.

Data pada tabel 7.3 (di di atas) menunjukkan dalam rerata bahwa pendidik/guru SMA/MA/SMK yang layak angkanya sebesar 86.97%, semi layak 9.27%, dan pendidik/guru yang dikategorikan tidak layak hanya sebesar 3.76%. Andai data ini dipercaya, maka Pemerintah daerah Kota Batam hanya memiliki 13% guru saja yang harus ditingkatkan kualifikasi, kompetensinya. Namun 87% guru di atas apakah telah tersertifikasi ?, itulah yang harus menjadi bahan kajian SKPD Dinas Pendidikan Kota Batam.

Dengan tidak menapikan hasil kinerja sekolah tentang bagaimana upaya peningkatan mutu lulusan, namun kebijakan Nasional tentang UN (Ujian Nasional) yang selama ini menjadi salah satu tolok ukur dalam menentukan mutu output, maka untuk kepentingan analisis ini (terkait dengan mutu output), gambaran tentang NUN para siswa SMP/MTs dan SMA/MA/SMK/ Sederajat adalah menjadi gambaran bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kota Batam (Dinas Pendidikan) berjuang untuk meningkat HNUN tiap tahunnya.

Perkembangan mutu output di Kota Batam jika melihat rerata NUN sebagai hasil Ujian Nasional SMP/MTs/Sederajat 2004/2005, 2005/2006 dan 2006/2007 masih menunjukkan prestasi yang belum menggembirakan (lihat Tabel 7.7) karena masih pada garis pasinggrid. Dari data yang terungkap untuk 3 (tiga) mata pelajaran, yaitu :

pada tahun pelajaran 2004/2005 rerata NEM/NUN Mata Pelajaran Bhs. Indonesia sebesar 6,07, Matematika 6,16, dan Bhs. Inggris 5,76. Tahun 2005/2006 rerata NUN Mata Pelajaran Bhs. Indonesia sebesar 6,15, Matematika 6,20, dan Bhs. Inggris 5,80. Sedangkan pada tahun 2006/2007 rerata NUN Mata Pelajaran Bhs. Indonesia sebesar 6,60, Matematika 6,35, dan Bhs. Inggris 6,10.

Rerata NUN sebagai hasil Ujian Nasional SMA/MA/Sederajat pada tahun 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 dan masih menunjukkan prestasi cukup baik (lihat Tabel 8.7) dan berada pada posisi di atas garis pasinggrid. Dari data yang terungkap untuk 3 (tiga) mata pelajaran, yaitu : pada tahun pelajaran 2004/2005 rerata NEM/NUN Mata Pelajaran Bhs. Indonesia sebesar 6,89, Matematika 6,29, dan Bhs. Inggris 6.85. Tahun 2005/2006 rerata NEM/NUN Mata Pelajaran Bhs. Indonesia sebesar 6,95, Matematika 6,35, dan Bhs. Inggris 6.90. Sedangkan pada tahun 2006/2007 rerata NUN Mata Pelajaran Bhs. Indonesia sebesar 7,10, Matematika 6,40, dan Bhs. Inggris 7.0. (baca: Lihat Tabel 7.7).

Belum cukup memberi gambaran keberhasilan pendidikan dalam mempersiapkan lulusannya dengan gambaran atribut bermutu. Kesiapan lulusan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, kesiapan lulusan dalam menghadapi kehidupan di masyarakat atau memasuki dunia kerja, adalah indikator yang dapat mengukur mutu outcome.

Beberapa gambaran masalah yang dihadapi Kota Batam dalam peningkatan mutu pendidikan dan/atau pendidikan bermutu digambarkan sebagai berikut :

- a). Terbatasnya kepemilikan buku mata pelajaran terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin, bahkan bagi mereka yang diperdesaan/hinterland yang disebabkan kesulitan mengakses atau membeli.
- b) Tingkat kelayakan guru terutama untuk SMP/Mts, SMA/MA/SMK kendati jumlahnya tidak terlampau besar namun tidak juga kecil, baik dalam katagori tidak relevan dengan mata pelajaran yang dibinanya ( mismacth), kualifikasi dan kompetensi, maupun profesionalitasnya.



- c) HNUN SMP/MTs dan SMA/MA/SMK angka reratanya masih pada pasinggrid bahkan ada yang di bawah pasinggrid.

Hal yang dapat direkomendasikan dalam rangkan pengembangan pendidikan bermutu dan atau mutu pendidikan seperi berikut :

- a) Upaya pemenuhan jumlah anak yang memiliki dan atau dapat belajar menggunakan buku pelajaran, alat peraga dan sumber belajar lainnya harus menjadi kebijakan dan rencana program operasional Dinas Pendidikan Kota Batam.
- b) Peningkatan mutu guru serta tenaga kependidikan baik kualifikasi, kompetensi, dan profesionalismenya perlu ditingkatkan, baik melalui pelatihan maupun studi lanjut..
- c) Melihat mutu lulusan dari tolok ukur Hasil Nilai Ujian Nasional (HNUN), maka sekolah harus dipacu untuk terus meningkatkan mutu manajemen, mutu pembelajaran, dan melakukan penjaminan mutu sekolah.
- d) Sesuai dengan hakikat pendidikan berbasis luas (BBE), tolok ukur kemampuan menguasai keterampilan kecakapan hidup (life skill), pembinaan harus mendorong pendidikan di sekolah tidak hanya berorientasi pada kecakapan akademik. tetapi juga mencakup kecakapan lain (self awareness, thinking skill, social skill, dan vocational skill).

#### **4. Kebijakan Pemda Kota Batam yang terkait dengan Peningkatan Mutu Pendidikan**

Kebijakan pembangunan pendidikan Pemerintah Daerah Kota Batam terkait dengan Misi ke IV yang berbunyi : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, menguasai IPTEK dan bermuatan IMTAQ melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagimasyarakat serta pembinaan kepemudaan dan olahraga.

Pemerintah daerah telah menyikapi pembangunan pendidikan dan menganggap penting untuk mengambil langkah-langkah kebijakan dalam mengambil terobosan baru untuk mendukung program pembangunan yang terkait dengan pendidikan

bermutu atau mutu pendidik , adapun kebijakan pembangunan pendidikan bermutu dan/atau mutu pendidikan di Kotam Batam tertuang dalam RPJMD 2006-2011 sebagai berikut:

**a) Kebijakan 2006 – 20011**

Secara umum kebijakan yang terkait dengan pendidikan berkeadilan gender, tertuang dalam kebijakan untuk mencapai Misi ke IV Kota Batam melalui kebijakan : Meningkatkan kualitas pendidikan, perluasan kesempatan belajar serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dan peserta didik. Kebijakan ini secara strategis disebutkan pada Fokus I yaitu : Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan.

**b) Program Pembangunan , Indikator Keluaran , dan target sasaran**

Program pembangunan pendidikan, terkait dengan program penyelenggaraan pendidikan berkeadilan gender yang indikator keluaran serta target sasarnya seperti berikut :

**1) Program yang telah dilaksanakan 2006 s/d 2011**

Pengejawantahan program pembangunan yang terkait dengan layanan pendidikan dasar dan dalam rangka turut serta pencapaian target Dakkar di Kota Batam, telah dilaksanakan berbagai program antara lain:

- 1.1) Telah dilakukan pengembangan mutu guru SD/MI yang ditunjukkan dengan angka rerata tingkat kelayakan sebesar 78.54%,
- 1.2) Telah dilakukan pengembangan mutu guru SMP/MTs yang ditunjukkan dengan angka rerata tingkat kelayakan sebesar 71,58%,
- 1.3) Telah dilakukan pengembangan mutu guru SMP/MTs yang ditunjukkan dengan angka rerata tingkat kelayakan sebesar 86,97%,
  
- 1.4) Telah dilakukan upaya pada tahun 2006/2007 menaikkan rerata HNUN SMA/MA/Sederajat Mata Pelajaran Bhs. Indonesia sebesar 7,10, Matematika 6,40, dan Bhs. Inggris 7.0,

- 1.5) Telah dilakukan upaya pada tahun 2006/2007 menaikan rerata HNUN SMP/MTs Mata Pelajaran Bhs. Indonesia sebesar 6,60, Matematika 6,35, dan Bhs. Inggris 6,10.
- 1.6) Telah dikembangkan Konsep Akademik dan RIP Sekolah Model setingkat SMA Bertarap Internasional,
- 1.7) Secara bertahap telah dibangun dan dikembangkan Lab SD, SLTP, dan SLTA,
- 1.8) Secara bertahap telah dibangun perpustakaan SD, SLTP, dan SLTA,
- 1.9) Secara kuantitas pendidik/guru di Kota Batam surplus tenaga pendidik untuk SD/MI bekerja sama dengan berbagi lembaga pendidikan guru
- 1.10) Secara bertahap telah dilakukan upaya penambahan jumlah pendidik/guru SMP/MTs di Kota Batam bekerja sama dengan berbagi lembaga pendidikan guru
- 1.11) Secara bertahap telah dilakukan upaya penambahan jumlah pendidik/guru SMA/MA di Kota Batam bekerja sama dengan berbagi lembaga pendidikan guru.

## **2) Program yang direncanakan 2006 s/d 2011**

- 2.1) Pembangunan sekolah model setingkat SMA (baca:lihat Fokus I, Indikator keluaran nomor 01)
- 2.2) Terbangunnya laboratorium SD 20 unit, SMP 13 unit, SMA 4 unit, dan SMK 2 unit (baca : lihat Fokus III Indikator Keluaran nomor 03)
- 2.3) Terbangunnya perpustakaan SD, SMP, SMA, dan SMK (baca : lihat Fokus I Indikator Keluaran nomor 03)
- 2.4) Meningkatnya rasio guru terhadap jam mengajar (SD, SMP, SMA, SMK = 1 : 24). (baca : lihat Fokus I Indikator Keluaran nomor 11)
- 2.5) Meningkatnya sertifikasi dan kompetensi guru, dan meningkatnya persentase pencapaian nilai kelulusan SD (6,5), SLTP (6,5), dan SLTA (6,5), (baca : lihat Fokus I Indikator Keluaran nomor 11)
- 2.6) Meningkatnya persentase kelulusan SD (99%), SLTP (97%), dan SLTA (97%),(baca : lihat Fokus I Indikator Keluaran nomor 11)

- 2.7) Meningkatnya kompetensi guru mata pelajaran, kepala sekolah, pengawas SD sebanyak 1100 orang, SLTP 860 orang, dan SLTA sebanyak 540 orang (baca : lihat Fokus I Indikator Keluaran nomor 11),
- 2.8) Terpilihnya guru dan siswa yang berprestasi tingkat SD, SLTP, dan SLTA (baca : lihat Fokus I Indikator Keluaran nomor 11),
- 2.9) Terbentuknya Badan Akreditasi Sekolah dan terlaksananya akreditasi SD, SMP, SMA dan SMK (baca : lihat Fokus I Indikator Keluaran nomor 12),
- 2.10) Meningkatnya relevansi pendidikan dengan dunia kerja (baca : lihat Fokus I Indikator Keluaran nomor 13).
- 2.11) Meningkatnya rasio buku teks terhadap siswa SD (1:1), SLTP (1:1), SLTA 1 : 1). (baca : lihat Fokus I Indikator Keluaran nomor 15)
- 2.12) Tersedianya sarana penunjang pembelajaran (media/lab) SD (1 : 1), SLTP (1 : 1), SLTA (1 : 1) (baca : lihat Fokus I Indikator Keluaran nomor 16),
- 2.13) Tersedianya alat laboratorium 51 sekolah, alat peraga 250 paket, alat media 100 paket, komputer 300 unit (baca : lihat Fokus I Indikator Keluaran nomor 16),
- 2.14) Tersedianya peralatan penunjang SMK, peralatan mekatronik 5 paket, peralatan keahlian teknik komputer dan jaringan TKJ 100 unit, Mesin Milling CNC Type produksi 2 unit, standarisasi Mesin Bubut konvensional 24 unit, Multimeter Digital (baca : lihat Fokus I Indikator Keluaran nomor 17),
- 2.15) Terlaksananya orientasi tugas/kewenangan kepala sekolah dan komite sekolah (baca : lihat Fokus I Indikator Keluaran nomor 18),
- 2.16) Terlaksananya peningkatan mutu pendidikan dengan pola partisipasi masyarakat
- 2.17) Terlaksananya Olympiade MIPA dan Bahasa Inggris 1 kali/tahun (baca : lihat Fokus I Indikator Keluaran nomor 28),
- 2.18) Terlaksananya Gebyar SMK/SMA 76 sekolah (baca : lihat Fokus I Indikator Keluaran nomor 29),

- 2.19) Terlaksananya seleksi dan Promosi Kompetensi siswa (baca : lihat Fokus I Indikator Keluaran nomor30),
- 2.20) Terlaksananya pembinaan Budi pekerti (baca : lihat Fokus I Indikator Keluaran nomor 31),
- 2.21) Tersedianya 1 Unit Gedung perpustakaan Daerah yang representatif (baca : lihat Fokus I Indikator Keluaran nomor 36),

### **3) Peta Prioritas Sasaran Pembangunan Mutu Pendidikan**

Beberapa hal yang kiranya penting menjadi fokus perhatian dan prioritas dalam pembangunan mutu pendidikan adalah :

- 3.1) Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru sesuai dengan SNP (Standar Nasional Pendidikan) pada setiap tingkat, jenjang, jenis, dan jalur pendidikan.
- 3.2) Meningkatkan jumlah guru untuk tenaga pendidik SMP, SMA, SMK dengan tingkat kelayakan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.
- 3.3) Melengkapi SD, SMP, SMA dan SMK dengan laboratorium dan kelengkapan perangkatnya.
- 3.4) Melengkapi SD, SMP, dan SMK dengan perpustakaan dan kelengkapan perangkatnya,
- 3.5) Meningkatkan rasio buku teks untuk siswa SD, SMP, SMA, SMK melalui APBD atau APBN dan/atau mengakses Buku Elektronik yang telah disiapkan oleh Pemerintah Pusat melalui APBD)
- 3.6) Melengkapi peralatan penunjang, lab, dan perangkat bengkel kerja SMK
- 3.7) Meningkatkan Hasil Nilai Ujian Nasional baik bagi siswa SMP/MTs/ sederajat maupun bagi siswa SMA/MA/SMK/ sederajat dari angka rerata yang telah dicapai pada tahun pelajaran 2006/2007 dan 2007/2008.